

Siswanto Masruri, dkk.

DARI MUTU MENUJU CITRA PTKI



Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

Siswanto Masruri, dkk.

DARI MUTU MENUJU CITRA PTKI

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
2016

DARI MUTU MENUJU CITRA PTKI

Penulis:

Siswanto Masruri | Anton Bawono | Munawar Ahmad
Singgih Basuki | Fattah Setiawan S.

Editor:

R. Lukman Fauroni

Desain Cover:

Nur Syamsi

Tata letak :

Wakhyudin

ISBN: 978-602-278-035-9

Cetakan Pertama, Desember 2016

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta 10710

Hak Cipta dilindungi UU No 19/Th.2002/RI

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan perguruan tinggi harus didasarkan pada kesadaran bersama, yaitu budaya peningkatan kualitas yang terus menerus dan berkesinambungan. Implementasi mutu diharapkan dapat menumbuhkembangkan budaya mutu dalam proses pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dampaknya terhadap kemajuan masyarakat. Dengan implementasi mutu, peran dan kontribusi perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penguatan mutu diarahkan agar dapat meningkatkan daya saing, termasuk di dalamnya kontribusi PTKI dalam membangun dinamisasi pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami menyambut baik penerbitan buku, *Dari Mutu Menuju Citra PTKI* yang ditulis oleh Siswanto Masruri, dkk. sebagai upaya mendorong pengembangan dan implementasi Mutu di lingkungan PTKI. Semoga buah karya ini berdaya manfaat.

Jakarta, 13 November 2016
Direktur,

Amsal Bakhtiar

PROLOG

Pendidikan Tinggi yang bermutu paling tidak telah memiliki empat kondisi ril. *Pertama*, telah dikelola secara efektif dan efisien. *Kedua*, secara aktif melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses Tri Dharmanya. *Ketiga*, mampu menggunakan teknologi secara tepat guna. Dan keempat, telah menerapkan manajemen mutu.

Dengan demikian, suatu perguruan tinggi dapat dinyatakan telah bermutu apabila, telah mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misi-misinya. Telah mampu memenuhi kebutuhan dan memuaskan stakeholders yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan profesional. Untuk mencapai tahadap itu maka, setiap perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin ketercapaian mutu.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan tentang beberapa aspek dalam penguatan mutu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Tulisan pertama mengkaji implementasi mutu pendidikan tinggi dari persepektif Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Dalam tulisan ini, diurai strategi pemenuhan kelayakan keseluruhan standar nasional pendidikan tinggi. Standar dimaksud meliputi; kemampuan merealisasikan visi dan misi PTKI, pengelola dan pengelolaan lembaga, kualitas mahasiswa dan lulusan, pengembangan sumber daya manusia PTKI. Kemudian, kelayakan kurikulum dan

atmosfir pendidikan, standar pengelolaan dana, sarpras dan sistem informasi, serta kelayakan penelitian pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama

Pada tulisan kedua digagas penguatan mutu akademik dengan menjadikan PTKI sebagai organisasi pembelajaran (OP), yaitu suatu organisasi terbuka dan kaya sumber belajar, yang mampu menjadi pusat sumber belajar bagi semua lapisan masyarakat dengan komitmen penuh seluruh anggota sivitas akademika.

Tulisan ketiga, mengkaji proses dan upaya pencapaian PTKI menuju riset university belajar dari kasus UIN Sunan Kalijaga. Dalam tulisan ini diudar pengalaman UIN Sunan Kalijaga dalam upaya mencapai World Class University, yang salah satunya bertumpu pada membenahan strategi risetnya melalui Lembaga Penelitian. Untuk meraih capaian WCU bukan terletak pada pengembangan paradigmatik keilmuannya, melainkan bagaimana agar paradigma yang telah ditetapkan dapat dijadikan sebagai mesin epistemologi sekaligus metodologi dalam keseluruhan pengembangan keilmuannya.

Dengan kekayaan pluralitas NKRI, maka, PTKI diarahkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dinamisasi kemajemukan untuk kemajuan bangsa. Inilah di antara benang merah tulisan keempat. Realitas kemajemukan, harus diposisikan sebagai kekayaan budaya sekaligus khazanahnya untuk pencapaian peradaban Indonesia yang lebih maju dan mandiri.

Di antara kelemahan implementasi kerja sama PTKI adalah mendulang MOU, namun belum optimal

dalam konsekuensinya. Tulisan terakhir dalam buku ini meneguhkan kerja sama sebagai jembatan dan lalu lintas untuk mewujudkan kemitraan kerja sama akademik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sivitas akademika PTKI. Implikasinya, sivitas akademika mendapatkan keuntungan dalam belajar dan bekerja serta mampu bersaing secara akademis mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan kehidupan umat dan kemanusiaan.

Semoga buku ini menjadi pendorong dalam merealisasikan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) yang bermutu, berdaya saing tinggi dan kontributif untuk kemajuan dan keberdayaan bangsa. Antar PTKI dapat saling belajar dan mengukuhkan tali silaturahmi, bukan hanya sekedar saling menyapa, melainkan saling mendukung, memajukan dan mengayomi dalam keseluruhan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Editor

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Prolof.....	v
Daftar Isi	ix

BAGIAN PERTAMA, MUTU AKADEMIK

Implementasi Mutu Pendidikan Tinggi Perspektif Spme

Anton Bawono	3
--------------------	---

Pengembangan Mutu Akademik Melalui Organisasi Pembelajaran

Fattah Setiawan S.....	41
------------------------	----

Pengembangan PTKI Menuju Riset University

Munawar Ahmad	67
---------------------	----

BAGIAN KEDUA, KERJASAMA DAN KONTRIBUSI

Kontribusi PTKI dalam Pengembangan Kerukunan

Singgih Basuki	111
----------------------	-----

Kerja Sama, Kerja Citra (Upaya Meningkatkan Citra PTKI di Indonesia)

Siswanto Masruri.....	149
-----------------------	-----

Bagian Pertama:

Mutu Akademik

IMPLEMENTASI MUTU PENDIDIKAN TINGGI PERSPEKTIF SPME

Anton Bawono

Kemampuan Meraih Mimpi

Pengelola lembaga perguruan tinggi, baik ditingkat prodi maupun institusi harus memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaiannya. Dalam merumuskan visinya lembaga harus mampu menjelaskan secara cermat, yang dapat dilakukan dengan menunjukkan indikator kejelasannya. Indikator kejelasan dapat berupa: kejelasan sasaran yang ingin diwujudkan dan kejelasan pada aspek sasaran lulusan.

Visi lembaga harus sangat realistis untuk diwujudkan, dengan mengingat kemampuan, potensi dan kesiapan lembaga serta dukungan semua sivitas akademika serta *stakeholder* untuk bersama-sama mewujudkan visi tersebut. Kerealistikan mewujudkan visi tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Kesiapan insfrastruktur.
2. Tata pamong yang efektif.
3. Kualitas mahasiswa yang tinggi.
4. Kualitas sumber daya manusia meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang unggul.
5. Melibatkan *stakeholder* dalam merumuskan mata kuliah dan silabi.
6. Kurikulum yang berorientasi ke masa depan.
7. Kesiapan pendanaan yang cukup.
8. Jaringan kerjasama dalam dan luar negeri yang semakin kuat.
9. Prasarana dan sarana pendukung yang memadai.

Lembaga ataupun program studi haruslah punya misi yang operasioal. Pengembangan misi merupakan sarana guna melaksanakan visi. Misi seperti halnya visi, haruslah yang jelas, sehingga memenuhi indikator kejelasan misi, meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada materi-materi yang mendukung pencapaian kompetensi.
2. Penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas, baik dari aspek dosen yang sesuai dengan bidangnya, serta kualifikasi materi yang diajarkan berdasarkan standar internasional.
3. Pembelajaran yang aplikatif sesuai tuntutan kompetensi.
4. Pembelajaran yang aplikatif sesuai dengan tuntutan perkembangan tekhnologi informasi.

5. Kemampuan melakukan penelitian pada bidang kompetensi masing-masing dosen.
6. Kemampuan melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kompetensinya.

Misi tersebut di samping memiliki kejelasan juga harus realistis. Untuk menunjukkan kerealistikan sebuah misi, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Kualifikasi dosen program studi yang mumpuni. Untuk program studi S1 minimal diampu oleh sejumlah dosen lulusan S2 sesuai program studi. Lebih bagus jika diampu mayoritas oleh dosen lulusan S3 dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan kompetensi program studi..
2. Rasio perbandingan dosen dan mahasiswa yang ideal pada kisaran 1: 28 untuk ilmu sosial dan kisaran 1: 18 untuk ilmu eksak.
3. Kualitas input yang semakin baik dengan dibuktikan oleh terbukti mahasiswa program studi tersebut yang diterima, yang kesemuanya menjadikan program studi tersebut sebagai pilihan pertama. Di samping itu sistem kompetisi seleksi masuknya dilakukan secara ketat dengan perbandingan minimal 1: 5.
4. Kurikulum program studi tersebut harus berorientasi ke masa depan.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh lembaga atau program studi, untuk dapat mencapai misi tersebut, antara lain:

1. Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa melakukan penelitian di bidang kompetensi ke prodian.

2. Melibatkan mahasiswa dalam berbagai penelitian dosen.
3. Advokasi dan layanan kepada mahasiswa dalam membentuk profesionalisme bidang kompetensinya, bimbingan konsultasi psikologi, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkembang melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM). Mahasiswa juga dibekali berbagai macam praktek mata kuliah. Selain itu mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti praktikum pengembangan profesi.
4. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika pada setiap aktivitas pembelajaran, pendidikan, dan layanan kehidupan masyarakat.
5. Menyebarkan dan mengembangkan etika sesuai kompetensinya.
6. Misi tersebut dirumuskan dengan melibatkan *stakeholder*.

Visi dan misi lembaga ataupun program studi haruslah yang memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu harus mengandung hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan akhir dari proses pembelajaran, menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi pada bidang program studi yang diambilnya.
2. Sarjana yang dihasilkan adalah yang bermutu dengan dasar nilai minimal yang harus di peroleh selama proses studi.
3. Sarjana yang dihasilkan adalah mereka yang telah mengikuti kegiatan ilmiah kemahasiswaan selama mereka menempuh studi.

4. Selama studi para mahasiswa harus memiliki daya saing dengan diberi kesempatan untuk melakukan praktikum, baik di laboratorium kampus sendiri maupun di luar kampus.
5. Sarjana yang dihasilkan disiapkan untuk menjadi praktisi maupun ilmunan pada kompetensi program studi yang diambil.
6. Sarjana yang dihasilkan disiapkan untuk bisa mengikuti perkuliahan pada jenjang pascasarjana, baik yang linier maupun lintas keilmuan.

Untuk mencapai sasaran dan bagaimana strategi yang harus digunakan lembaga ataupun program studi. Sasaran yang akan dicapai seyogyanya harus dijabarkan dalam beberapa tahap, sampai pada target mimpi yang akan diraih. Berikut contoh tahapan dalam mencapai sasaran:

Tabel 1
Tahapan Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
1	Penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai kerangka kurikulum Nasional Indonesia yang sesuai kebutuhan masyarakat.	50%	80%	100%
2	Meningkatnya jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan serta dapat berkarya dimasyarakat sesuai dengan bidang keahlian dalam tahun pertama.	25%	50%	100%

No	Sasaran	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
3	Meningkatnya jumlah dan kualitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang relevan dengan studi.	75%	80%	100%
4	Meningkatnya jumlah minimal karya ilmiah dosen yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional.	4 karya / tahun	6 karya / tahun	8 karya / tahun
5	Tercapainya persentase minimal lulusan sarjana program studi yang berprestasi dan tepat waktu.	50%	80%	100%
6	Meningkat kualitas pelayanan di bidang akademik dan non akademik.	75%	80%	100%
7	Meningkatnya kinerja dosen dan karyawan.	75%	90%	100%
8	Kerjasama dengan berbagai lembaga di luar program studi,	10 lembaga	15 Lembaga	> 20 lembaga

Adapun strategi dalam pencapaian lulusan dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 2
Strategi Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Strategi Pencapaian
1	Penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia yang sesuai kebutuhan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama program studi berdasarkan nomenklatur yang sudah ditetapkan oleh kementerian Agama RI dengan PMA terbaru. 2. Melaksanakan sosialisasi program studi kepada masyarakat luas, melalui leaflet, brosur, media masa (TV, surat kabar), <i>comparative study</i> (Studi Banding), dan kegiatan sosialisasi lainnya untuk menjangkau

No	Sasaran	Strategi Pencapaian
		<p>calon mahasiswa baru.</p> <p>3. Melakukan <i>review</i> kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia, serta dalam rangka mencapai penguasaan <i>core competence</i> sebagai ahli yang profesional untuk berbagai sebaran profesi dengan melengkapi materi perkuliahan tentang tata nilai (etika).</p>
2	<p>Meningkatnya jumlah minimal lulusan yang mendapatkan pekerjaan serta dapat berkarya di masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dalam tahun pertama.</p>	<p>1. Melakukan peninjauan kurikulum/<i>review</i> kurikulum, minimal 4 tahun sekali yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat/<i>stakeholder</i> dengan melibatkan civitas program studi, akademisi, praktisi dan <i>stakeholders</i> lainnya.</p> <p>2. Melaksanakan Praktikum Pengembangan Profesi, dengan tujuan agar memiliki pengalaman riil di dunia kerja dan sekaligus menjalin hubungan (<i>link</i>) dengan calon pengguna lulusan.</p> <p>3. Melakukan pelacakan alumni serta melaksanakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemantauan aktivitas alumni dan peran alumni dalam masyarakat.</p> <p>4. Pembentukan ikatan alumni program studi.</p>
3	<p>Meningkatnya jumlah, kualitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang relevan dengan</p>	<p>1. Memberikan dukungan dana penyelenggaraan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.</p> <p>2. Meningkatkan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa program studi.</p>

No	Sasaran	Strategi Pencapaian
	program studi.	3. Meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa dengan menyelenggarakan kegiatan ilmiah secara rutin seperti seminar, workshop, forum diskusi ilmiah rutin dan pengadaan buku.
4	Meningkatnya jumlah minimal karya ilmiah dosen yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional maupun yang terindeks scopus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan koleksi jurnal terakreditasi agar menjadi bahan acuan dalam proses pembelajaran dan mengenalkan format serta konten artikel yang layak diterbitkan di jurnal terakreditasi. 2. Melaksanakan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah untuk diterbitkan di jurnal terakreditasi maupun yang terindeks scopus. 3. Mengirimkan dosen program studi pada berbagai forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional.
5	Tercapai persentase minimal lulusan sarjana program studi yang berprestasi dan tepat waktu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan studi mahasiswa dan melaporkannya kepada ketua jurusan. 2. Menyusun SOP Bimbingan Akademik. 3. Menyusun SOP pengajuan skripsi sehingga mahasiswa dapat menyelesaikannya secara tepat waktu. 4. Menyusun Buku Pedoman Akademik sebagai guiden bagi mahasiswa dan dosen.. 5. Mengoptimalkan peran Pembimbing Akademik melalui proses pembimbingan akademik sehingga mahasiswa dapat diberikan saran strategi pembelajaran yang optimal.

No	Sasaran	Strategi Pencapaian
6	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang akademik dan non akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem informasi akademik (SIAKAD) secara <i>on-line</i> yang dapat diakses melalui internet untuk menunjang kegiatan akademik serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas akademika. 2. Memberikan kesempatan bagi tenaga kependidikan untuk mengikuti <i>interpersonalskill</i> dan <i>service quality</i>. 3. Melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dengan menyusun pedoman- pedoman sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Penjaminan Mutu Akademik Program Studi. b) Sistem perkuliahan program studi. c) Sistem Ujian mata kuliah. d) Evaluasi Perkuliahan Program Studi. e) Pembuatan soal ujian Program Studi. f) Uji kompetensi dasar Program studi. g) Ujian komprehensif dan (<i>munasqosyah</i>) skripsi bagi mahasiswa Program Studi. h) Penulisan skripsi bagi mahasiswa Program Studi. i) Review kurikulum Program Studi. j) Bimbingan akademik Program Studi. k) Penyusunan Proposal Penelitian bagi mahasiswa Program Studi.

No	Sasaran	Strategi Pencapaian
		l) Penggunaan Laboratorium Program Studi. m) Penciptaan Suasana Akademik dan kode etik Program Studi. n) Penulisan modul bagi dosen Program Studi. o) Pelayanan akademik Program Studi. u) Praktikum Pengabdian Pada Masyarakat v) Petunjuk teknis Studi banding. w)Praktikum Pengembangan Profesi. x) Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi. y) Penjaminan Mutu Program Studi. z) <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP). aa)Tata tertib mahasiswa dan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Program Studi.
7	Meningkatkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Mendorong peningkatan kinerja dosen dengan menerapkan program <i>Quality Assurance</i> (QA) penjaminan mutu yang secara sistemik menjadi bagian dari penerapan penjaminan mutu di tingkat institut maupun fakultas
8	Kerjasama dengan berbagai lembaga di luar program studi	1. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen program studi. 2. Menjalin <i>networking</i> atau kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.

Visi, misi dan tujuan program studi haruslah disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika di pro-

gram studi maupun lembaga. Adapun langkah-langkahnya dapat melakukan sebagai berikut:

1. Secara umum, dilakukan dengan:

- a. Menerbitkan dan mendistribusikan buku saku tentang visi, misi, dan spirit Program Studi kepada seluruh civitas akademika.
- b. Mencantumkan visi, misi, dan tujuan Program Studi dalam buku pedoman akademik, maupun buku-buku pedoman lain yang relevan.
- c. Memasang tulisan pada tempat/ruangan strategis di lingkungan kampus.
- d. Mencantumkan dalam brosur, pamflet, x-banner, leaflet, website program studi, informasi pendaftaran mahasiswa baru, jejaring sosial yang dikelola oleh program studi seperti Facebook HMJ maupun WA.

2. Kepada dosen, dilakukan dengan:

Menyampaikan dan menyegarkan kembali pada setiap kegiatan rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan oleh Program Studi maupun lembaga.

3. Kepada mahasiswa, dilakukan dengan:

- a. Menyampaikan pada setiap kegiatan orientasi mahasiswa baru (OPAK) dalam *back to progdi*.
- b. Pelaksanaan kuliah umum yang diagendakan setiap awal tahun ajaran baru.
- c. Menyampaikan pada kesempatan pertemuan-pertemuan/pembinaan dengan mahasiswa.

4. Kepada tenaga kependidikan/karyawan, dilakukan dengan:

- a. Menyampaikan dan menyegarkan kembali pada setiap kegiatan koordinasi rutin yang dilaksanakan.
- b. Menyampaikan pada setiap kegiatan pertemuan seperti rapat kerja unit-unit dan sebagainya.

Pengelola dan Pengelolaan Lembaga

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong harus menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.

Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas (BAN PT, Buku 3A standar 2, 2008).

Budaya organisasi untuk mendukung tata pamong melalui pembangunan budaya organisasi serta penegakan aturan, penegakan aturan dikawal oleh sistem penjaminan mutu, tata aturan seperti buku panduan dosen, Buku Etika Dosen dan Mahasiswa. Bagi mahasiswa, sosialisasi tata

pamong dan penegakan aturan dilaksanakan secara rutin melalui program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru, dosen menyampaikan dan mengontrol dalam setiap pembelajaran di kelas, dan penegakan aturan didukung sepenuhnya oleh tata kelola institusi yang telah berjalan secara baik dan rapi.

Kepemimpinan yang efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam lembaga maupun program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi kedepan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam program studi (BAN PT, Buku 3A standar 2, 2008).

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional lembaga maupun program studi (BAN PT, Buku 3A standar 2, 2008). Kepemimpinan operasional dilandasi oleh nilai tentang kemampuan unsur pimpinan untuk menumbuhkan konsensus dan pemahaman di setiap unit di dalamnya, sehingga semua upaya dan langkah pengem-

bangun didasarkan pada visi, misi, kesadaran terhadap mutu, dan memacu pada harapan-harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dengan demikian keberhasilan kepemimpinan dapat diukur dari tumbuhnya kultur akademik yang menjamin kebebasan akademik, komunikasi dan interaksi yang efektif, kreatif, konstruktif, inovatif serta berjalannya fungsi koordinasi antar semua komponen di dalam lembaga maupun program studi. Dalam pola kepemimpinan seperti ini, pemimpin dituntut untuk selalu menjaga akuntabilitas program studi dengan tetap menempatkan semua unsur sebagai kolega dan mitra kerja, bukan sebagai bawahan atau pesuruh. Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan operasional, pimpinan menerapkan dua strategi utama yaitu: koordinasi dan komunikasi (komunikasi formal maupun informal).

Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi lembaga maupun program studi (BAN PT, Buku 3A standar 2, 2008). Kepemimpinan organisasi di program studi merupakan bagian dari organisasi kelembagaan di institut/universitas. Dalam struktur organisasi, program studi/jurusan di bawah koordinasi fakultas. Dengan demikian fakultas merupakan jalur konsultasi vertikal langsung terkait dengan berbagai kebijakan yang diambil. Program studi membawahi dosen-dosen yang berada di bawah naungannya. Program studi mengkoordinasikan tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing dosen agar dapat melaksanakan tupoksinya dengan

baik. Dosen-dosen program studi secara struktural harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Program Studi/ jurusan, dan program studi/jurusan harus mempertanggung jawabkan segala kegiatannya kepada Dekan.

Pertanggung jawaban pelaksanaan berbagai kegiatan akademik di program studi/jurusan kepada dekan disampaikan setiap tahun pada rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh lembaga. Sedangkan, pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dosen program studi/jurusan dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh program studi. Dalam rapat-rapat koordinasi tersebut sekaligus dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program-program kegiatan, serta perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan pimpinan lembaga maupun program studi dalam menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik, serta keaktifan dan eksistensi kaprodi dalam organisasi profesi (BAN PT, Buku 3A standar 2, 2008). Dosen-dosen program studi/jurusan memiliki peran dan tanggung jawab sosial kepada Masyarakat. Peranan tersebut diwujudkan dengan keaktifan dan keikutsertaannya pada berbagai kegiatan publik.

Dalam hal sistem pengelolaan fungsional dan operasional dilaksanakan dengan baik sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOP) melalui rangkaian proses *planning, organizing, staffing, leading* dan *controlling* dalam kegiatan internal maupun *eksternal* (BAN PT, Buku 3A standar 2, 2008). Kegiatan program studi/jurusan maupun

fakultas mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) program studi/jurusan maupun fakultas. Program studi/jurusan berkoordinasi dengan fakultas, kemudian dituangkan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang bertujuan mengembangkan Program Studi/jurusan.

Proses pengorganisasian dimaksudkan untuk menentukan posisi, tugas dan tanggung jawab setiap komponen dalam implementasi perencanaan. Dalam hal ini Program studi/jurusan mengembangkan paradigma pemberdayaan, yaitu dengan mengupayakan sebanyak mungkin dosen, staf dan mahasiswa terlibat dalam pelaksanaan program.

Staffing merupakan fungsi yang sangat strategis dalam program studi/jurusan untuk melaksanakan sistem yang didesain dan diorganisasikan oleh program studi/jurusan itu sendiri. Penempatan staf, baik dosen maupun karyawan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Program Studi/jurusan dilakukan dengan mempertimbangkan profesionalitas. Sebagai contoh dalam penugasan dosen untuk mengampu mata kuliah dan membimbing, maka faktor spesialisasi dan kompetensi sangat diperhatikan. Disamping dosen dan staff dibekali dengan *job description*, prosedur dan pedoman kerja.

Kepemimpinan Ketua Program Studi/jurusan lebih diarahkan kepada *academic leader*, artinya upaya-upaya kepemimpinan program studi ditujukan pada peningkatan suasana dan peningkatan mutu akademik. *Concern* program studi/jurusan ditujukan pada upaya peningkatan mutu perkuliahan, meningkatkan produktivitas dosen dalam menghasilkan karya ilmiah, meningkatkan semangat

belajar mahasiswa dan sebagainya. Untuk menjalankan fungsi kepemimpinan ini, salah satunya kaprodi/kajur bersama fakultas melaksanakan rapat koordinasi secara periodik. Rapat koordinasi dengan dosen dilakukan pada awal semester, tengah semester dan akhir semester.

Pada tahap *controlling* ketua program studi/jurusan maupun fakultas selalu membandingkan antara realisasi kegiatan dengan target, tujuan maupun standar yang telah ditetapkan oleh institusi. Proses yang dilakukan meliputi:

- a. **Pengukuran kepuasan stakeholder**, bersama-sama dengan lembaga penjamin mutu setiap akhir semester menyebarkan angket kepuasan dosen, karyawan dan mahasiswa. Masing-masing *stakeholder* diukur berdasarkan beberapa aspek.
- b. **Audit Mutu Internal**, setiap akhir semester semua dosen harus melaporkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Kinerja Dosen serta membuat Rencana Beban Kerja Dosen. Selain itu disetiap semester forum dosen serumpun melakukan telaah soal ujian baik UTS maupun UAS sebagai salah satu cara untuk menjamin mutu dan kesesuaian soal ujian dengan kompetensi mata kuliah yang sudah ditempuh oleh mahasiswa.
- c. **Tindakan koreksi dan pencegahan**, yaitu berbagai kebijakan yang dibuat oleh institusi yang harus dilaksanakan oleh fakultas maupun program studi yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan koreksi dan pencegahan. Seperti adanya pedoman kode etik dosen dan mahasiswa, buku pedoman akademik, *job discription*, Pedoman Bimbingan Akademik, Pembinaan

Kegiatan Kemahasiswaan.

- d. **Penanganan aduan**, disetiap kesempatan, selalu terbuka untuk menerima kritik/saran/aduan baik secara langsung maupun secara tertulis maupun secara *on-line*, ketua program studi/jurusan selalu membuat umpan balik dari setiap persoalan/kritik/saran/aduan yang ada.

Meningkatkan Kualitas Mahasiswa dan Lulusan

Ketika sebuah program studi/jurusan sudah menjadi favorit, maka tugas kita adalah mempertahankan. Akan tetapi jika program studi/jurusan yang kita kelola tersebut kurang diminati, maka tugas kita adalah meningkatkan animo mahasiswa. Antara daya tampung dengan calon mahasiswa baru yang ikut seleksi memiliki rasio yang idial, yang memungkinkan dapat benar-benar memilih mahasiswa baru yang berkualitas yang siap menerima materi dan menerapkan ilmu pengetahuan pada program studi/ jurusan kita. Di samping itu, tidak kalah penting adalah jumlah mahasiswa secara keseluruhan yang diterima dan mahasiswa yang sedang aktif (dikelola), jika dibandingkan dengan dosen yang dimiliki, rasionya masih ideal yaitu, untuk prodi ilmu sosial berada dalam kisaran 27 – 33 mahasiswa. Untuk prodi eksak pada kisaran 17 – 23 mahasiswa.

Selama dalam proses pembelajaran, mahasiswa harus selalu terpantau prestasinya, bisa melalui dosen pembimbing akademik. Hal ini dilakukan dalam upaya, bisa mencetak alumni yang berkualitas dengan kemampuan akademik dan non akademik. Kemampuan akademik

sebagai ukurannya adalah nilai IPK, nilai IPK rata-rata tiap alumni harus diatas 3. Sedangkan dalam hal kemampuan non akademik dapat dilihat dari minat, nalar dan bakat mahasiswa dalam kompetisi-kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kelulusan yang baik tidak sekedar dengan nilai IPK yang tinggi tetapi bagaimana lembaga dapat meluluskan mahasiswa tersebut dengan tepat waktu. Lembaga yang baik adalah yang mampu meluluskan mahasiswanya dengan masa studi 4 tahun dengan jumlah minimal 50% dari jumlah total mahasiswa pada angkatan tersebut. Disamping itu juga tidak memiliki catatan terkait mahasiswa DO ataupun mengundurkan diri dengan jumlah maksimal 6%. Dalam proses pembelajaran, maka sudah sebagai keharusan lembaga harus menyediakan kepada mahasiswa pelayanan yang sangat baik, terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Bimbingan dan konseling
2. Minat dan bakat (ekstra kurikuler)
3. Pembinaan *soft skill*
4. Layanan beasiswa
5. Layanan kesehatan

Mahasiswa yang telah lulus seharusnya mendapatkan perhatian secara khusus, karena dari mereka inilah kita bisa dapat mendapatkan banyak informasi. Beberapa cara untuk mendapatkan rekam jejak para alumni, antara lain dapat melalui: lembar kendali ligalisir, Blog atau media sosial; seperti: *e-mail*; *facebook*, *whatsApp*, *BBM*, dan sarana lain yang dirasa efektif dan efisien, temu alumni yang

dilakukan secara periodik.

Lembaga yang baik seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap para alumninya, untuk bisa segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya// kompetensinya. Hal-hal yang bisa dilakukan lembaga antara lain adalah:

1. Memberikan informasi tentang kesempatan bekerja di berbagai instansi pemerintah/ swasta kepada mahasiswa/ lulusan.
2. Membentuk wadah untuk mengumpulkan informasi tentang kesempatan kerja dan membantu lulusan memperoleh pekerjaan (*job placement center*).
3. Mengundang pihak yang memerlukan tenaga lulusan ke kampus untuk memberi penjelasan tentang kesempatan kerja.
4. Menawarkan kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga lulusan.
5. Kerja sama antara Program Studi maupun lembaga dengan pihak pengguna lulusan maupun asosiasi.

Pelacakan alumni ini harus dilakukan secara intensif dan datanya haruslah terekam secara komprehensif. Hal ini dilakukan memiliki banyak manfaat, antara lain: dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring alumni, yang banyak memberikan kemaslahatan, baik buat para calon alumni, maupun bagi lembaga.

Selain itu fungsi jejaring dapat memperkuat daya tawar para alumni di lapangan/dunia kerja. Untuk lebih

jelas dan detil untuk perbaikan, maka lembaga dapat minta pendapat dari para pengguna lulusan terkait kemampuan mahasiswa kita, berkenaan dengan hal-hal berikut ini: Integritas (etika dan moral), Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), Bahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerjasama tim dan Pengembangan diri.

Membangun Sumberdaya Manusia

Sistem pengelolaan sumber daya manusia bagi calon dosen maupun tenaga kependidikan harus memiliki pedoman tertulis yang lengkap (Pedoman tertulis tentang Pengelolaan SDM); dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten (dokumen sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan), dan juga ditunjukkan dengan mengacu pada aturan pemerintah, Kementerian terkait dan institusi yang bersangkutan, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat harus terdokumentasi dengan baik. Terdokumentasi dalam sistem informasi terintegrasi, untuk memudahkan monitoring dan evaluasi, hal ini dapat menggunakan SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) pada menu dosen.

Dosen tetap di dalam sebuah perguruan tinggi yang mengajar pada sebuah program studi, bidang keahlian dosen tersebut harus sesuai dengan kompetensi program

studi yang bersangkutan. Untuk melihat kemampuan dan keunggulan sebuah lembaga ataupun program studi terkait tenaga pengajar/dosennya disamping kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu dosen tersebut adalah berjabatan akademik lektor kepala, pendidikannya S3 dan telah memiliki sertifikasi tenaga pendidik.

Jumlah dosen yang dimiliki harusnya proposional dengan jumlah mahasiswa, rasio untuk bisa dikatakan unggul, per dosen untuk prodi ilmu sosial antara 27 – 33 mahasiswa, sedang untuk prodi yang eksak antara 17 – 23 mahasiswa. Tugas dosen itu meliputi tridarma perguruan tinggi, dari ketiga hal tersebut untuk menjadi lembaga atau program studi yang unggul, jumlah total rata-rata persemesternya maksimal 13 SKS. Sedangkan rata-rata tatap muka dikelas antara 11 – 13 kali persemester. Dengan tingkat kehadiran di kelas minimal 95%.

Upaya dalam peningkatan sumberdaya manusia dapat pula dilakukan dengan cara mengundang tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Ini dilakukan rata-rata perbulan satu tenaga ahli/pakar, sehingga rata-rata pertahun sebanyak 12 tenaga ahli/pakar. Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin. Disamping itu pimpinan lembaga harus selalu memperhatikan pendidikan dosennya untuk dapat ditingkatkan stratanya, kesemuanya diarahkan untuk mengambil dan menyelesaikan program strata tiga

(S3) dengan keilmuan sesuai dengan kompetensi program studi dimana dosen tersebut bernaung.

Dosen yang baik adalah dosen yang selalu ingin belajar dan bersedia membagi ilmunya pada pihak lain. Selalu belajar adalah ketika dosen tersebut bersedia mengikuti workshop, seminar dan kegiatan akademik lainnya untuk menjadi peserta. Sedangkan dosen yang bersedia membagi ilmunya dan sangat kompeten keilmuannya yaitu ketika dosen tersebut sangat dibutuhkan oleh banyak pihak untuk menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan-kegiatan akademik antara lain seperti seminar dan workshop.

Kompetensi dosen juga dapat diukur dengan kemampuan dosen tersebut untuk bisa mendapatkan hibah untuk pengembangan diri dan ilmu pengetahuan dari lembaga-lembaga terpercaya baik di tingkat nasional maupun internasional. Disamping itu dosen harus selalu *update* keilmuannya dalam jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi, baik tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini pimpinan harus selalu mendorong, dosen-dosen untuk mengikuti keanggotaan masyarakat dalam bidang ilmu tingkat internasional.

Peran pustakawan tidak kalah penting untuk mengelola dan selalu dapat *update* perpustakaan untuk kepentingan segenap sivitas akademika, sehingga dari sisi jumlah dan tingkat pendidikannya harus memadai. Laboran, teknisi, operator, dan programmer dari sisi jumlah juga harus cukup dan memiliki kegiatan yang cukup pula untuk melayani kegiatan civitas akademika. Tenaga

administrasi harus didorong oleh lembaga untuk memiliki pendidikan minimal strata satu, disamping dari sisi jumlah untuk pelayanan juga harus memenuhi. Tenaga kependidikan ini juga harus selalu didorong untuk dapat meningkatkan kemampuannya dan karirnya dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan ataupun workshop, disamping memberikan beberapa fasilitas bisa berupa dana untuk dapat digunakan meningkatkan kompetensi dari tenaga kependidikan tersebut.

Kurikulum dan Atmosfir Pendidikan

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi (BAN PT, Buku 3A standar 5, 2008).

Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi,

pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi (BAN PT, Buku 3A standar 5, 2008).

Kurikulum harus sesuai dengan visi dan misi lembaga disamping memiliki standar kompetensi yang sudah sesuai dengan KKNI dan kurikulum tersebut sudah berorientasi ke masa depan dengan memasukkan kurikulum dengan mata kuliah yang telah berintegrasi dan interkoneksi dengan teknologi informasi maupun bahasa-bahasa internasional. Dalam kurikulum tersebut sebagian besar ataupun semuanya sebaran mata kuliahnya memberikan bobot pada tugas-tugas (prektikum/praktek, PR atau makalah). Tiap mata kuliah yang ada juga telah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP maupun RPS.

Di kurikulum tersebut pada beberapa semester terakhir harus memiliki mata kuliah pilihan sebagai bentuk konsentrasi atau kompetensi yang dimiliki oleh seorang alumni. Untuk mematangkan dan memberikan kesempatan pilihan pada mahasiswa, lembaga atau program studi harus memberikan fleksibilitas pilihan minimal dua kali dari kewajiban yang harus dipilih. Dan untuk memberikan kemampuan atau kompetensi yang unggul, mata kuliah pilihan sebagai konsentrasinya minimal 9 sks, sedangkan yang menjadi mata kuliah pilihan yang ditawarkan minimal 2 kali yang harus diambil.

Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, lembaga atau program studi harus menyediakan tempat

praktikum atau laboratorium yang dimiliki sendiri oleh perguruan tinggi. Mata kuliah praktikum atau praktikum mata kuliah harus dilengkapi dengan modul yang memadai agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai yang ditargetkan.

Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dapat mengikuti perkembangan zaman, berorientasi kedepan, telah melibatkan iptek dan sesuai dengan visi dan misi lembaga maupun program studi. Pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal, eksternal dan umpan balik dari program studi. Review kurikulum harus sudah dapat dilakukan minimal 4 tahun sekali, adapun mekanisme peninjauan kurikulum melalui forum workshop *review* kurikulum, yang dihadiri oleh para dosen program studi dan para *stakeholder*. Dengan melibatkan *stakeholder* dari para pemangku kepentingan dan pengguna lulusan dalam *review* kurikulum, maka kurikulum baru yang dihasilkan akan menghasilkan lulusan yang diinginkan pasar.

Dalam pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajarannya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

Pengampu mata kuliah serumpun diwajibkan membentuk *team teaching* untuk menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan perkuliahan, mulai dari penelaahan satuan acara perkuliahan, desain kegiatan pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran, dan sistem evaluasi. Pengembangan materi perkuliahan ini juga memperhatikan masukan-masukan dari dosen lain pada waktu rapat koordinasi menjelang perkuliahan dan masukan-masukan dari para lulusan atau pengguna terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki para lulusan program studi.

Untuk menjamin mutu soal ujian agar sesuai dengan SAP, Silabus maupun RPS maka setiap akan dilakukan ujian tengah semester (UTS) ataupun ujian akhir semester (UAS), soal ujian di kaji dan di diskusikan untuk dinilai oleh kelompok dosen serumpun dengan dibuktikan berita acara. Sehingga mutu soal ujian yang diberikan kepada mahasiswa akan sesuai dengan yang ditargetkan oleh lembaga atau program studi.

Untuk menjamin kelancaran studi mahasiswa dan rangkaian aktivitas akademik di kampus, melalui bimbingan intensif dengan dosen pembimbing, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan diri secara maksimal sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Untuk menjamin kualitas pembimbingan akademik, tiap dosen dibatasi maksimal 20 mahasiswa persemester. Pembimbingan dosen dengan mahasiswa dilaksanakan secara terjadwal dan insidental dengan menggunakan pedoman pembimbingan akademik yang tercetak dan dipedomani secara baik dan konsisten. Pembimbingan terjadwal dilakukan setiap se-

mester dua kali, yaitu pada tengah semester dan akhir semester, sedangkan pembimbingan insidental dilakukan setiap saat jika dipandang perlu, sehingga rata-rata minimal 3 kali dalam satu semester.

Masalah-masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan studi yang sedang dijalani, maupun masalah pribadi dan keluarga. Persoalan yang terkait dengan studi misalnya teknik atau strategi pengambilan matakuliah, penyelesaian skripsi, cuti kuliah. Persoalan yang terkait dengan masalah pribadi dan keluarga misalnya ekonomi keluarga, kuliah sambil kerja, kesulitan mengikuti perkuliahan karena kemampuan diri dan sebagainya. Manfaat pembimbingan akademik bagi mahasiswa yang utama adalah terselesaikannya studi mahasiswa tepat waktu. Selain itu, mahasiswa dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat yang dimilikinya.

Dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi lembaga atau program studi menyediakan panduan tertulis yang dilaksanakan dengan konsisten dalam pelaksanaan pembimbingan skripsi. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang mengikuti aturan-aturan standar ilmiah, dengan analisis. Dalam proses pelaksanaan pembimbingan skripsi, didasarkan pada panduan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Panduan tersebut meliputi: kriteria dan syarat mengambil mata kuliah skripsi, dosen pembimbing skripsi, sistematika penulisan skripsi dan lain-lain.

Sosialisasi panduan pembimbingan skripsi ditujukan kepada para dosen pembimbing skripsi dan para maha-

siswa yang akan menyelesaikan skripsi. Bagi para dosen, sosialisasi ditempuh melalui pemberitahuan secara resmi dalam forum rapat koordinasi dosen program studi dan pemberian buku pedoman panduan pembimbingan skripsi dan buku pedoman penulisan skripsi. Adapun bagi para mahasiswa, sosialisasi panduan pembimbingan skripsi telah dimulai semenjak mereka mengikuti mata kuliah Metodologi Penelitian. Mata kuliah tersebut banyak menguraikan tentang panduan penulisan skripsi. Selain itu, panduan pembimbingan skripsi bagi mereka, juga disosialisasikan secara resmi melalui website lembaga.

Pelaksanaan karya tugas akhir (skripsi) ada di semester 7 atau 8, di bawah bimbingan para dosen pembimbing, setidaknya-tidaknya 8 kali pertemuan. Teknis pelaksanaan skripsi, dimulai dari pemilihan judul skripsi oleh mahasiswa semester 7 atau 8. Pemilihan judul tersebut sebelumnya telah dipresentasikan dalam Mata Kuliah Seminar Proposal. Setelah itu, mahasiswa mengajukan proposal penelitian kepada Ketua Program Studi. Apabila disetujui, maka ketua prodi akan menunjuk seorang dosen sebagai pembimbing skripsi dengan kualifikasi berpendidikan minimal strata 2 yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk mahasiswa strata 1. Setiap dosen pembimbing maksimal 4 mahasiswa.

Setelah ditetapkan seorang pembimbing, maka proses pembimbingan barulah dimulai. Mahasiswa membawa SK Pembimbing dan menyerahkannya pada pembimbing. Pada setiap bimbingan, mahasiswa diharuskan membawa lembar konsultasi dan menuliskan isi bimbingan, maha-

siswa diharuskan membawa lembar konsultasi dan menuliskan isi bimbingan dan kemudian ditandatangani oleh pembimbing. Dengan estimasi penyelesaian tugas akhir/skripsi maksimal 6 bulan. Dalam rangka pencapaian hal tersebut, dilakukan monitoring dari beberapa pihak. Pertama, monitoring yang dilakukan oleh ketua program studi terhadap para dosen pembimbing skripsi, agar mahasiswa bimbingannya dapat menyelesaikan tepat waktu. Kedua, pembimbingan secara intens yang dilakukan oleh pembimbing skripsi terhadap bimbingannya masing-masing.

Untuk sistem pembelajaran yang diterapkan oleh lembaga ataupun program studi setidaknya dalam tiga tahun selalu dilakukan upaya perbaikan. Perbaikan dan peningkatan berkaitan dengan:

- a. Materi
- b. Metode pembelajaran
- c. Penggunaan teknologi pembelajaran
- d. Cara-cara evaluasi

Upaya untuk menjaga kualitas pendidikan harus juga dilakukan menjaga suasana akademik yang berkualitas. Yang dimaksud dengan suasana akademik adalah karakteristik khusus kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi yang diwujudkan melalui nilai-nilai yang dianut, sikap, kebiasaan, dan tindakan-tindakan yang ditampilkan seluruh civitas akademik yang menunjukkan suasana ilmiah dan mengedepankan suasana pengembangan keilmuan. Kebijakan suasana akademik ini harus tertulis secara

lengkap dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan suasana akademik ini harus meliputi: informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa.

Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika harus ada dan tersedia milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai. Jenis prasarana dan sarana itu antara lain *Hot Spot Area* di lingkungan kampus, Sistem akademik on line, laboratorium, perpustakaan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Belajar di Kelas.

Untuk mendukung dan menciptakan suasana akademik, sangat perlu interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll) yang dilakukan minimal tiap bulan sekali. Interaksi akademik ini, antara dosen dan mahasiswa harus di Upayakan dengan baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik. Selain usaha yang ditujukan pada peningkatan kualitas dosen dan pengajaran, hubungan dosen dan mahasiswa juga menjadi fokus dalam pengembangan suasana akademik. Disamping itu suasana akademik dapat dilakukan dengan kegiatan pengembangan perilaku kecendekiawanan. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. Pelestarian lingkungan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.

Pengelolaan Dana, Sarpras dan Sistem Informasi

Program studi ataupun jurusan harus memiliki peran aktif dalam perencanaan, pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, mengingat prodi merupakan bagian yang secara langsung berhubungan dengan dosen dan mahasiswa. Sehingga program studi harus memiliki otonomi dalam melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.

Penggunaan dana untuk operasional yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah dalam sebuah program studi idialnya dalam satu tahun per mahasiswa minimal senilai Rp. 18.000.000,00. Untuk meningkatkan kemampuan dosen dengan penelitiannya, setiap dosen tetap minimal memiliki bantuan dana penelitian per tahun Rp. 3.000.000,00. Sedangkan dana pengabdian masyarakat yang diterima oleh setiap dosen tetap rata-rata pertahun minimal Rp. 1.500.000,00.

Untuk memberikan suasana kenyamanan bagi dosen tetap dalam menyelesaikan tugas-tugas dikampus, setiap dosen tetap minimal memiliki ruangan 6 M², sehingga jika lembaga bisa memberikan jauh lebih besar, tentunya akan memberikan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi dan menghasilkan kualitas yang lebih baik.

Untuk prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam

proses pembelajaran, Prasarananya harus lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran. Sedangkan prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik), harus lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.

Bahan pustaka dalam bentuk buku teks, isinya harus sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan prodi, banyaknya buku teks yang harus disediakan di dalam perpustakaan minimal sejumlah 400 judul. Untuk sebagai referensi yang berupa skripsi/tesis/disertasi yang sesuai dengan bidang ilmu minimal sejumlah 200 judul. Diperpustakaan juga harus tersedia jurnal ilmiah yang terakreditasi dikti maupun jurnal internasional. Kedua jurnal ini harus secara lengkap (urut) nomor dan volumenya juga harus selalu *ter-update*, sehingga jurnal-jurnal yang terbaru selalu dimiliki.

Untuk jurnal nasional yang terakreditasi dikti minimal memiliki tiga jurnal, yang temanya sesuai dengan bidang ilmu program studi. Sedang untuk jurnal internasional minimal memiliki dua judul jurnal, yang temanya juga sesuai dengan bidang ilmu program studi. Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir harus memiliki minimal 9 judul dengan tema yang sesuai dengan bidang ilmu program studi.

Perpustakaan dalam rangka mencapai tujuannya sebagai pusat informasi, sehingga memberikan manfaat bagi proses belajar mengajar baik bagi mahasiswa dan dosen, harus mampu membangun jejaring kerjasama

dengan beberapa perpustakaan di luar perguruan tinggi yang dapat diakses dan sangat baik fasilitasnya.

Lembaga harus menjamin ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/ balai kesehatan, *green house*, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan program studi memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal).

Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program studi dalam proses pembelajaran (*hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.*) telah dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. Tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, dan akses on-line ke koleksi perpustakaan. Aksesibilitas data dalam sistem informasi harus sudah ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN).

Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerja sama

Penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dosen, dengan melakukan penelitian dosen akan lebih bisa meng*update* keilmuannya dengan situasi yang ada. Penelitian dosen bisa dibiayai dari lembaga luar negeri, lembaga diluar perguruan tinggi, perguruan tinggi sendiri maupun dibiayai oleh dosen sendiri secara mandiri.

Penelitian yang dibiayai dari lembaga luar negeri, dapat menunjukkan kemandirian dan kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan. Lembaga perguruan tinggi karenanya harus mendorong dosen-dosennya untuk bisa mendapatkan hibah penelitian dari luar lembaga terutama dari lembaga luar negeri, dengan rata-rata satu penelitian per dosen pertahun. Untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan mahasiswa tahap akhir dalam melakukan penelitian, mahasiswa tahap akhir seharusnya dilibatkan dalam penelitian dosen. Jumlah mahasiswa tahap akhir seharusnya minimal 25% bisa terlibat dalam penelitian yang dilakukan dosen mereka.

Penulisan artikel oleh dosen harus didorong oleh lembaga untuk pengembangan diri dosen yang bersangkutan secara khusus dan juga sosialisasi lembaga pada umumnya. Keterlibatan dosen dalam penulisan artikel/ karya ilmiah/ seni dapat berupa tingkat internasional, nasional dan lokal.

Lembaga harus banyak mendorong dosennya untuk memiliki banyak keterlibatan dalam penulisan artikel/ karya ilmiah/ seni dalam tingkat internasional. Karena, jika dosen memiliki keterlibatan dalam penulisan artikel/ karya ilmiah/ seni dalam tingkat internasional maka pointnya tinggi. Dan tak kalah penting adalah bahwa karya-karya dosen tersebut harus sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Hasil penelitian yang dihasilkan oleh para dosen disamping diorientasikan untuk publikasi internasional tetapi karya mereka juga diarahkan untuk didaftarkan ke kemenkumham untuk bisa mendapatkan HaKI. Lembaga

harus banyak mendorong karya-karya dosen untuk bisa mendapatkan HaKI dari kemenkumham minimal dua yang sesuai dengan program studi.

Kegiatan pengabdian masyarakat hampir sama dengan penelitian, terkait sumber pendanaannya, yaitu bisa dibiayai dari lembaga luar negeri, lembaga diluar perguruan tinggi, perguruan tinggi sendiri maupun dibiayai oleh dosen sendiri secara mandiri. Seperti halnya penelitian, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen harus didorong oleh lembaga untuk bisa mendapatkan hibah atau bantuan pendanaan dari lembaga dari luar negeri, dengan tema yang sesuai dengan keilmuan program studi.

Kiprah para dosen dalam melaksanakan pengabdian masyarakat juga harus selalu di dorong untuk dapat melibatkan para mahasiswa tahap akhir. Disamping itu mahasiswa tahap akhir harus banyak didorong untuk melakukan pengabdian masyarakat yang sesuai kompetensinya (program studi) secara mandiri dan memiliki tanggung jawab penuh atas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan.

Perguruan tinggi tidak dapat hanya sendirian untuk membangun dan mencetak lulusan yang berkualitas unggul, akan tetapi perguruan tinggi harus menggandeng banyak pihak termasuk *stakeholder* dalam bentuk kerjasama. Kerjasama yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi tidak hanya berkuat skala lokal tetapi nasional dan internasional. Kerjasama tersebut harus memberikan ke-

untungan kepada kedua belah pihak, yaitu pihak perguruan tinggi dan lembaga yang diajak kerjasama.

Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan sumberdaya manusia atau banyak hal yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan secara akademik dan etika moral tidak bertentangan. Lembaga dalam menjalin kerjasama harus sesuai dengan bidang keilmuan program studi baik itu yang berupa kerjasama dengan lembaga dari dalam negeri dan luar negeri. Semakin banyak kerjasama yang sesuai program studi ini akan semakin banyak membuka peluang yang menguntungkan secara akademik dan kemajuan program studi.

PENGEMBANGAN MUTU AKADEMIK MELALUI ORGANISASI PEMBELAJARAN

Fattah Setiawan S.

Pendahuluan

Dunia Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Perjalanan panjang itu memberikan penguatan pada kekhasan dari pada perguruan tinggi yang lain. Konsekwensinya adalah beban permasalahan menjadi lebih besar menghadapi perubahan dalam pasar pendidikan tinggi nasional. Perubahan cepat akibat kehidupan global juga harus dicermati karena berdampak pada pengetahuan, ketrampilan serta aspek kehidupan akademik lainnya yang ada dalam PTKI.

Label Islam telah memberikan karakteristik khas pada struktur organisasi PTKI dalam merespon perubahan kebutuhan masyarakat terhadap mutu akademik yang sesuai dengan dunia kerja. Seperti dua sisi mata uang, kekhasan pendidikan Islam memudahkan dalam fokus

keunggulan kompetitif terhadap para pesaingnya. Di sisi lain, ciri itu dapat melemahkan PTKI menghadapi perubahan cepat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan berkualitas di masyarakat.

Organisasi PTKI yang tidak bisa merespon semua perkembangan dan perubahan secara cepat berdampak pada keberlanjutannya dalam masyarakat. Kebutuhan implementasi organisasi ideal dalam mencapai tujuannya menjadi prioritas bagi PTKI. Organisasinya merupakan mekanisme formal pengelolaan dalam kerangka mewujudkan pola tetap di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang dalam kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Di dalamnya terdapat unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran satuan kerja. Semuanya berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial sehingga menentukan struktur, proses koordinasi dan pengendalian pekerjaan PTKI dalam tujuan mengembangkan mutu akademik.

Max Weber dalam Nurlaina menjabarkan tujuh prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan organisasi guna mencapai tujuannya, yaitu;¹

1. Pembagian Kerja; Pekerjaan dipecah-pecah sehingga jelas pembagian masing-masing anggota.
2. Hirarki kewenangan yang jelas, struktur organisasi

¹ Nurlina, "Model Organisasi Ideal pada Perguruan Tinggi Islam," *Didaktika, Jurnal Kependidikan Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone*, Volume 10, Tahun 2015, h. 82-96

disusun bertingkat dan memastikan jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi, garis komando dan garis koordinasi diciptakan untuk memperjelas alur pelaporan diantara anggota organisasi.

3. Formalisasi yang tinggi; perilaku anggota organisasi perlu disusun dalam peraturan dan prosedur formal sebagai sebuah sistem. Poin ini sangat besar organisasi memiliki relevansi dalam hal itu. Semakin tumbuh besar, formalisasi organisasi semakin perlu agar semua hal berjalan standar.
4. Impersonal, tindakan dan keputusan dalam organisasi tidak melibatkan perasaan pribadi. konflik kepentingan perlu diredam dalam pengambilan keputusan.
5. Keputusan personalia berdasarkan kemampuan, seleksi dan promosi anggota berdasarkan pada kualifikasi, prestasi dan kapasitas.
6. Jenjang karir bagi anggota organisasi; asumsinya keanggotaan organisasi seseorang adalah seterusnya (*continuous basis*) sehingga dapat mengejar karir dan menjaga komitmen terhadap organisasi.
7. Pemisahan yang jelas kehidupan pribadi dan organisasi, pengambilan keputusan dilakukan semaksimal mungkin berjalan rasional.

Ketujuh prinsip organisasi ideal itu dikembangkan dengan kebutuhan terhadap ruang dan peluang bagi setiap anggota untuk dapat saling belajar mengenai kehidupan dalam organisasi dalam mencapai tujuannya. Implementasi manajemen harus menciptakan lingkungan bagi anggota,

karyawan maupun staf untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Bohm Dawood dkk. menegaskan semua orang di tiap lininya selalu berusaha meningkatkan kapasitasnya secara berkelanjutan dalam produksi hasil yang menjadi tujuannya.²

Peningkatan kapasitas melalui pembelajaran organisasional menjadi elemen penting dalam organisasi pembelajaran (OP). Pembelajaran adalah dasar dalam kehidupan sehari-hari, kunci sukses dari setiap organisasi dan usaha utama bagi PTKI. Dengan dasar itu, pendekatan OP bagi PTKI telah akrab untuk menjadi kebutuhan bagi keberlanjutan organisasinya terhadap dinamika perkembangan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

Tulisan ini bertujuan menjelaskan implementasi OP dalam organisasi PTKI tanpa kehilangan identitas diri sebagai lembaga pendidikan tinggi berciri khas Islam guna menghadapi kompetisi dan perubahan pasar terhadap mutu akademik pendidikan tinggi. Uraian berdasar kajian literatur ini diawali dengan penjelasan tentang detil OP dalam menghadapi kompetisi dan perubahan yang dihadapi oleh PTKI. Setelah membahas kondisi PTKI di Indonesia, kemudian dianalisa bagaimana dapat diimplementasikan dalam organisasi PTKI terutama dalam pengembangan mutu akademik yang tercakup dalam tridarma perguruan tinggi; pendidikan, penelitian dan pengabdian.

² Saeeda Dawood, Mammona, Fahmeeda, Aijaz Ahmed, "Learning Organization—Conceptual and Theoretical Overview," *International Journal Of Humanities Social Sciences And Education (IJHSSE)*, Volume 2, Issue 4, April 2015, h. 93-98

Organisasi Pembelajaran

Organisasi Pembelajaran dalam literatur manajemen dan organisasi dikenal dengan istilah *learning organization* dan *organizational learning* (pembelajaran organisasi). Malhotra mengutip Ang dan Joseph yang mengkontraskan keduanya dalam kerangka proses yang berhadapan dengan struktur.³ Sebagian yang lain menyatakan keduanya memiliki perbedaan karakter, yaitu;⁴

1. OP merupakan suatu format organisasi, sedangkan pembelajaran organisasi adalah proses atau aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam organisasi
2. OP butuh usaha/upaya untuk mewujudkannya sedangkan pembelajaran organisasi dapat terwujud sekalipun tanpa usaha/upaya.
3. OP merupakan kebutuhan sedangkan pembelajaran organisasi sebagai bentuk tertentu dari suatu organisasi.

Pendapat lain menggunakan keduanya dalam kaitan yang erat hingga bisa dipertukarkan. Tsang menyebut proses organisasi menjadi *learning organization* setelah implementasi *organizational learning*. Keterkaitan keduanya dalam proses menjadikan perbedaan antara keduanya sulit diuraikan dalam implementasinya.⁵

³ Yogesh Malhotra, "Organizational Learning and Learning Organizations: An Overview," <http://www.brint.com/papers/orglrng.htm>

⁴ Mumuh Mulyana, Mita Febtyanisa, Min Rohayati. "Organisasi Pembelajaran dan Pembelajaran Organisasi," <http://moebarak.files.wordpress.com/2011/12/01-perbedaan-organisasi-pembelajaran-dan-pembelajaran-organisasi.pdf>

⁵ Yeni Absah, "Pembelajaran Organisasi: Strategi Membangun Kekuatan Perguruan Tinggi," *Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 1, Nomor*

Tsang mendukung Dill dalam Absah, mendefinisikan OP sebagai kegiatan yang berorientasi pada tindakan (*action-oriented*) dan fokus pada implementasi sebuah pendekatan konkret dan menentukan. Garvin menunjuk OP sebagai keahlian organisasi guna menciptakan, memperoleh, menginterpretasikan, mentrasfer dan membagi pengetahuan, yang bertujuan memodifikasi perilakunya untuk menggambarkan pengetahuan dan wawasan baru. Taylor memahaminya dalam kesempatan yang diberikan kepada pegawai sehingga organisasi menjadi lebih efisien.⁶

Dengan suatu proses kajian literatur, wawancara dan investigasi lain, Pedler, Boydell dan Burgoyne dalam Jayaginting mendefinisikan organisasi pembelajaran sebagai sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari seluruh anggotanya dan secara terus menerus mentransformasi diri.⁷ Dalam pengertian itu, Pedler, dkk. menekankan dua sifat organisasi pembelajaran, perusahaan pembelajar bukan organisasi yang semata-mata mengikuti banyak pelatihan. Sifatnya selanjutnya pengembangan ketrampilan individu dalam konsep kesetaraan. Pedler, dkk lebih lanjut menjelaskan organisasi pembelajaran memerlukan pembentukan suasana dimana anggota-anggotanya secara individu terdorong untuk belajar dan mengembangkan potensi penuh mereka. Organisasi kemudian memperluas budaya belajar ini sampai pada

1, Januari 2008: 33 - 41

⁶ *Ibid.*

⁷ Eka Danta Jayaginting, "Peranan Organisasi Pembelajaran Dalam Meningkatkan Kompetensi Kerja," [http:// repository.usu.ac.id/bitstream/ 123456789/ 3640/ 1/ psikologi-eka2.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3640/1/psikologi-eka2.pdf)

pelanggan, pemasok dan stakeholder lain yang signifikan. OP menempatkan Strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pusat kebijakan bisnis dengan menekankan posisinya berada dalam proses transformasi organisasi secara terus menerus.⁸

Pembelajaran Individual dan Organisasional

Tujuan proses transformasi ilmu pengetahuan melalui organisasi, sebagai aktivitas sentral perusahaan dalam mencari secara luas ide-ide baru, masalah-masalah baru dan peluang-peluang baru untuk pembelajaran, dan mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif dalam menghadapi perubahan kebutuhan pasar. Lundberg dalam Mulyana dkk. Menyatakan, pembelajaran dalam organisasi diarahkan pada pemerolehan dan pengembangan ketrampilan dan pengetahuan serta aplikasinya. Sistem OP kemudian tidak semata-mata dihitung jumlah pembelajaran masing-masing anggota tetapi proses transformasi membangun pemahaman kolektif yang luas terhadap keadaan internal maupun eksternal melalui kegiatan-kegiatan dan sistem-sistem secara keseluruhan. Pembelajaran pun tidak hanya tentang penataan kembali atau perancangan kembali unsur-unsur organisasi.⁹

Smith menilai bahwa sistem OP kelanjutan dari ide masyarakat pembelajar (*the learning society*). Ia merujuk kepada Schon dalam penjabaran ide tersebut. Kehilangan stabilitas berarti masyarakat dan lembaga di lingkungannya

⁸ *Ibid.*

⁹ Jayaginting, "Peranan ..."

selalu dalam proses transformasi berkelanjutan. Kestabilan yang muncul juga tidak menjamin kehidupan masyarakat bisa bertahan. Masyarakat harus belajar memahami, mengarahkan, mempengaruhi dan mengelola perubahan-perubahan tersebut. Masyarakat perlu memiliki kapasitas untuk mengatasinya sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan maupun kelembagaannya. Schon kemudian menjelaskan bahwa masyarakat harus beradaptasi saat pembelajaran yang bisa mengarahkan institusinya dapat mengelola perubahan situasi dan kondisi. Masyarakat perlu membentuk institusinya (organisasi) dalam sebuah system pembelajaran, yaitu system yang mampu mengatasi proses transformasi dalam dirinya sendiri.¹⁰

Proses OP dalam pembentukan masyarakat belajar kemudian menjadikan pembelajaran dalam dua sandaran yang kuat. Belajar adalah kebutuhan alamiah bagi setiap orang tak terbatas dan berkelanjutan hingga akhir hayatnya. Untuk merespon perubahan, Pembelajaran individual perlu dikomunikasikan kepada yang lain secara terus menerus menuju pemahaman bersama dalam sebuah organisasi yang pada akhirnya membentuk system pembelajaran berguna bagi semua yang terlibat. Dawood dkk. menggambarkan tahapan pembelajaran dalam diagram berikut ini;¹¹

¹⁰ M. K. Smith. 'The Learning Organization', *The Encyclopedia Of Informal Education*, <http://www.infed.org/biblio/learning-organization.htm>.

¹¹ Dawood dkk. "Learning Organization–Conceptual ... ", h. 93-98



Proses pembelajaran yang mengkerucut pada model *generate* inilah yang ditawarkan oleh Senge sebagai pengembangan ide OP. Ia menegaskan organisasi secara terus menerus mengembangkan kemampuan dalam menciptakan masa depannya. Dalam organisasi semacam itu, upaya sekedar mempertahankan keberadaannya dipandang belum memadai. Pilihan Belajar untuk bertahan hidup atau belajar untuk beradaptasi merupakan hal yang penting dalam organisasi semacam itu, tetapi dalam *organisasi pembelajaran* konsep *adaptive learning* harus dikombinasikan dengan *generative learning* guna menumbuhkembangkan kapasitas organisasi untuk mencipta.¹²

OP mengkombinasikan pembelajaran yang mensyaratkan pemikiran kembali (refleksi) pola-pola yang

¹² Mulyana dkk. "Organisasi ..."

menyambung dan mempertautkan potongan-potongan sebuah organisasi serta mempertautkan pola-pola dengan lingkungan yang relevan. Proses seolah-olah mengikat beberapa sub-proses, misalnya perhatian, penafsiran, pencarian, pengungkapan dan penemuan, pilihan, pengaruh dan penilaian sehingga bisa ditandai dalam pengertian kognitif dan perilaku. Pengembangan pemahaman sistemik bisa muncul setelah kesadaran-kesadaran alamiah individu-individu telah di-*share* menjadi pemahaman kolektif dalam organisasi termasuk proses bagaimana mereka belajar. Senge menyatakan:

“People continually expand their capacity to create the results they desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning how to learn together.¹³”

OP memang dicirikan dengan keterlibatan total individu pekerja dalam sebuah pembangunan proses kolaboratif. Organisasi secara terus-menerus mengembangkan kemampuan dalam menciptakan masa depannya melalui pembelajaran bersama yang berdampak pada upaya terus-menerus meningkatkan kapasitas daya cipta. Tatanan selalu berupaya memfasilitasi semua organ untuk belajar dan secara terus-menerus melakukan transformasi. Perusahaan mengembangkan budaya pembelajaran kolaboratif dan kolektif dalam melakukan perubahan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai bersama.

¹³ Peter M.Senge, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, (London: Century,1990), h.3.

Lima (5) Prinsip OP

Senge mengatakan sebuah organisasi yang berorientasi pembelajaran selalu memperbesar kemampuannya untuk menciptakan masa depannya berdasarkan lima prinsip yaitu; penguasaan pribadi (*personal mastery*), model mental (*mental models*), visi bersama (*shared vision*), pembelajaran tim (*team learning*), dan pemikiran system (*systems thinking*).¹⁴

1. Penguasaan/Keahlian pribadi merupakan disiplin terus memperjelas dan memperdalam visi pribadi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, dan melihat realitas obyektif hingga melampaui kompetensi dan keterampilan, meskipun melibatkan mereka. Penglihatan juga melampaui pembukaan rohani, meskipun tetap melibatkan pertumbuhannya.

Penguasaan dipandang sebagai jenis khusus dari kemahiran, istilah bahasa seperti penguasaan pribadi bisa menciptakan ambigu terhadap kepastian. penguasaan pribadi merupakan proses dan disiplin seumur hidup. Orang dengan penguasaan pribadi tingkat tinggi sangat sadar akan kebodohan mereka, ketidakmampuan mereka, area pertumbuhan mereka sehingga mereka sangat percaya diri. Keahlian bukan bentuk dominasi, melainkan sebuah keterpanggilan.

Individu dengan penguasaan ketrampilan tingkat tinggi hidup dalam modus belajar terus menerus. Komitmen setiap individu terhadap proses belajar

¹⁴ *Ibid*, lihat juga Absah, "Pembelajaran ..." dan Jayaginting, "Peranan ..."

mencapai keahlian dalam tingkat kemampuan tertentu di bidang khusus. Orang dengan keahlian pribadi yang tinggi secara konsisten akan mampu mewujudkan hasil-hasil dengan tingkat kepentingan yang terdalam bagi mereka. Mereka melakukan itu melalui komitmen yang tinggi terhadap belajar sepanjang hayat. Organisasi berkomitmen akan memiliki keunggulan kompetitif karena setiap pribadi yang ada di organisasi dapat belajar lebih cepat dibandingkan yang lain lainnya. Untuk mewujudkan hal ini, organisasi harus mengembangkan budaya belajar agar praktik-praktik pengembangan kemampuan personal dapat terwujud. Organisasi membangun mekanisme yang mampu mendorong pembelajaran individual dapat ditransfer menjadi pembelajaran kolektif.

2. Visi bersama (*shared vision*) adalah hal penting dalam rangka mengintensifkan semua pihak di lingkungan organisasi untuk belajar. Visi itu memiliki kekuatan untuk meningkatkan keyakinan mendorong eksperimentasi dan inovasi. Visi bersama mampu menciptakan identitas bersama yang dapat memberikan fokus dan energi untuk belajar. Visi semacam ini akan menjadi visi yang *genuine* yang mampu membuat semua pihak mencapai keunggulan dan belajar bukan karena terpaksa namun karena semua benar-benar menginginkannya. Untuk menumbuhkan visi bersama ini, struktur organisasi harus bersifat datar dan desentralistis.

Visi bersama dibangun atas visi individual dari masing-masing unsur organisasi yang berada pada semua level. Praktek visi bersama melibatkan keteram-

pilan menggali bersama gambaran masa depan bahwa komitmen adalah motif dasar manusia bukan hanya karena kepatuhan seseorang sehingga menumbuhkan kekuatan jangka panjang.

Penyebarluasan visi melalui proses penguatan. Ada peningkatan kejelasan, antusiasme dan komitmen yang menular pada orang lain dalam organisasi. Organisasi kemudian dapat melampaui cara pikir linier dan memahami sistem pemikiran yang luas maka kemungkinan membawa visi ke sebuah hasil menjadi nyata.

3. Asumsi-asumsi, generalisasi, bahkan gambaran yang saling terikat kuat yang dipegang teguh oleh setiap individu dan organisasi merupakan model mental (*mental models*). Individu sering tidak menyadari dampak dari asumsi pada perilaku maka bagian mendasar dari tugas untuk menggugah kemampuan dalam tindakan. Melalui model mental, ia bisa memahami bagaimana mereka memahami organisasi dan cara mereka bertindak.

Bekerja dengan model mental memang diawali dengan memutar arah cermin diri ke dalam organisasi; mempelajari impian-impian individu tentang organisasi dan membuatnya membumi dan terwujud secara utuh.

Sebuah proses menggali gambaran internal individu hingga organisasi dari dunia, untuk membawa mereka ke permukaan dan menahannya secara ketat untuk pemeriksaan. Hal ini juga termasuk kemampuan di mana orang mengungkapkan pemikiran mereka sendiri secara efektif dan membuat berpikir terbuka terhadap pengaruh orang lain.

Pengembangan kapasitas organisasi untuk bekerja dengan model mental perlu pembelajaran keterampilan baru dan pengembangan orientasi baru, hingga menjadi perubahan institusional yang mendorong perubahan tersebut. Apabila mental model yang sudah berdiri kuat, dapat menggagalkan perubahan yang dapat berasal dari sistem pemikiran.

Bekerja dengan model mental juga merupakan kemampuan untuk melaksanakan perbincangan-perbincangan yang membelajarkan dan menyeimbangkan inkuiri dan advokasi. Orang-orang yang ada di lingkungan organisasi dapat merepresentasikan pemikiran masing-masing dan membuat pikiran-pikiran itu terbuka terhadap pengaruh orang lain (*open mind*). Untuk mewujudkan model mental, organisasi harus membangun budaya terbuka yang mendorong tumbuhnya proses inkuiri dan kepercayaan.

4. Pembelajaran kelompok merupakan akumulasi dari pembelajaran individual. Jika tim sungguh-sungguh belajar, bukan hanya tim itu yang akan mencapai hasil yang luar biasa. setiap individu yang ada di dalamnya bahkan tumbuh lebih cepat. Kapasitas memecahkan masalah dalam organisasi tertingkatkan karena akses yang lebih baik terhadap pengetahuan dan keahlian.

Sebagai OP, perusahaan harus memiliki struktur yang mampu memfasilitasi pembelajaran tim yang bersifat lintas sektor dan terbuka. Pembelajaran tim mensyaratkan individu terlibat dalam dialog dan diskusi. Olehkarenaitu, hal yang penting dalam mengembangkan

pembelajaran tim adalah bahwa semua anggota tim hendaknya mengembangkan komunikasi terbuka, berbagi makna dan pemahaman. Perusahaan juga harus memiliki struktur manajemen pengetahuan yang unggul, yang dapat menumbuhkembangkan kreasi, akuisisi, diseminasi, dan implementasi pengetahuan.

Kapasitas anggota tim diarahkan untuk menanggulung asumsi dan masuk ke dalam suatu kesatuan berpikir bersama. Proses itu mencakup cara belajar bagaimana mengenali pola-pola interaksi dalam tim yang bisa melemahkan proses belajar. Alternatif menciptakan bahasa yang lebih cocok untuk menangani kompleksitas dengan berfokus mendalam pada masalah struktural dan bukan pengalihan pada pertanyaan dari gaya kepribadian dan kepemimpinan.

5. **Sistem berpikir (*System Thinking*)**, disiplin yang mengintegrasikan semua individu dalam tubuh yang utuh antara teori dan praktek. Sistem menghalangi kecenderungan untuk berfokus pada bagian parsial daripada melihat keseluruhan sehingga gagal melihat organisasi sebagai proses dinamis. Dampak buruknya membawa organisasi ke dalam siklus menyalahkan dan membela diri.

Kemampuan sistem teori untuk memahami dan mengatasi keseluruhan, dan untuk memeriksa keterkaitan antara bagian-bagian yang menyediakan, baik insentif dan sarana untuk mengintegrasikan disiplin ilmu. Penggunaan sistem peta yang menunjukkan diagram elemen kunci dari sistem dan bagaimana mereka

terhubung harus didukung. Individu melihat masalah sistem, dan dibutuhkan kerja untuk memperoleh blok bangunan dasar dari teori sistem, dan menerapkannya pada organisasi.

Pola pikir sistem, sebuah kerangka pikir yang memberi kesempatan kepada semua pihak di lingkungan organisasi untuk belajar bahwa organisasi merupakan satu kesatuan yang terdiri dari obyek-obyek yang berbeda-beda. Metode berfikir sistem hingga saat organisasi menilai kinerja secara keseluruhan yang sekaligus mengukur kinerja masing-masing komponen yang ada di dalamnya. Berfikir sistem juga berarti bahwa semua karakteristik organisasi sebagai *learning organization* merupakan satu kesatuan yang harus tampak sekaligus. Tidak satupun karakteristik dapat diabaikan.

Keunggulan dan Kelemahan OP

Pembangunan OP paling tidak memberikan enam keuntungan bagi penggunanya, yaitu; memelihara tingkat inovasi dan tumbuh menjadi institusi yang kompetitif. Perusahaan lebih baik dalam merespon tekanan-tekanan dari luar. Penguasaan pengetahuan dalam mengkaitkan sumber daya yang dimiliki dengan kebutuhan masyarakat, mampu meningkatkan kualitas output yang dihasilkan oleh semua level kelembagaan. Peningkatan citra lembaga berorientasi pada kualitas manusia menjadi tinggi.

Peningkatan sumber daya manusia dalam organisasi pembelajaran masih menyisakan persoalan terutama efektifitas implementasinya berdasarkan ukuran

perusahaan pengguna. Kontribusi teori organisasi pembelajaran terhadap organisasi yang berskala luas dan kompleks sebesar perusahaan multinasional dipertanyakan oleh Drucker, Doz dan Prahalad, Goshal, Levitt dan March seperti yang diutarakan oleh Roen.¹⁵

Klasifikasi pengetahuan yang diperoleh dipertanyakan mana yang lebih tinggi atau rendah yang harus dijadikan prioritas implementasi dalam organisasi. Klasifikasi yang tidak jelas dapat menimbulkan keraguan terhadap konsistensi implementasi kompetensi. Hal itu dikarenakan pengetahuan yang di dalam pembelajaran berasal hubungan nyata sebab-akibat kausalitas berisi kemungkinan-kemungkinan yang jauh lebih kompleks serta adanya kesalingtergantungan antara pengamat dan partisipan dalam organisasi tertentu.

Pada aspek pasar dan lingkungan yang beragam, jaringan diferensiasi yang diciptakan lewat proses pembelajaran terhadap situasi pasar dan lingkungan yang kompleks adalah vital untuk dilakukan, namun proses OP sangat terbatas pada lingkungan yang spesifik. Literatur teori organisasi pembelajar perlu melengkapi teori mereka baik terhadap teori umum (*general theory*) sebagai sebuah proses dan sistem, maupun aplikasi teori terhadap perusahaan multinasional. Drucker memandang bahwa pengetahuan yang dipersiapkan pada OP hanya berfungsi jika diterapkan pada tindakan bukan dari isi pengetahuannya sehingga hanya bisa menjadi pengetahuan

¹⁵ Ferry Roen, "Teori Organisasi Pembelajar (Organizational Learning Theory)" <http://perilakuorganisasi.com/teori-organisasi-pembelajar-organisational-learning-theory.html>

dalam situasi tertentu. Akurasi pembelajaran yang bersifat induktif berasal dari pengalaman individu-individu dinilai belum memadai untuk diaplikasikan pada situasi organisasi yang berbeda-beda seperti yang dihadapi oleh perusahaan multinasional.

Kelemahan yang berdasar ukuran besar perusahaan memudahkan PTKI mengambil keputusan implementasi OP dalam organisasinya sebagai pilihan. Dominasi PTKI di Indonesia sekarang ini masih belum mencapai perusahaan multinasional yang merambah hingga berbagai negara. Implementasi OP bisa mendorong PTKI dalam eksploitasi tatanan pembelajaran sepanjang hayat berdimensi Islam sebagai keunggulan kompetitifnya menghadapi persaingan PT.

PTKI Sebagai Organisasi Pembelajaran

PTKI di Indonesia tidak bisa melepaskan karakteristik khasnya sebagai lembaga perguruan tinggi (PT) yang menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam melalui dunia pendidikan. Dalam pengertian Langgulung, pendidikan Islam merupakan sebuah proses penyiapan generasi berikutnya untuk mengisi peranan, memindahkan tidak hanya pengetahuan tapi juga nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beribadah di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.

Proses bimbingan subjek didik terhadap objek didik untuk berkembang dalam lingkungan nilai agama Islam pada dua dimensi waktu kemudian memiliki arti penting bagi PTKI. Masa pendidikan yang panjang ini

telah memberikan tekanan lanjutan pada intensitas pembelajaran sepanjang hayat sejak kelahiran hingga meninggalkan dunia menuju kehidupan akhirat. Konteks pembelajaran itu telah mengarahkan PTKI sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang harus memberikan wadah dan kesempatan bagi semua kalangan Muslim untuk mengembangkan mutu tradisi studi Islam yang menyeimbangkan kekuatan materi dan metode pembelajaran.

Keunggulan pembelajaran sepanjang hayat perlu diejawantahkan oleh PTKI dalam struktur organisasi pendidikannya. PTKI sebagai usaha pendidikan dan pembelajaran tingkat tinggi selalu menyesuaikan tatanan organisasinya dalam dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Dill juga menegaskan hal itu, dengan meningkatkan perhatian pada tanggung jawab akademik, perguruan tinggi harus lebih terampil dalam menciptakan ilmu pengetahuan baru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar dengan cara menyesuaikan perilakunya dengan ilmu pengetahuan yang baru tersebut.

Lingkungan baru mendukung proses adaptasi pada struktur dan pengelolaan organisasi untuk mencapai perbaikan kegiatan belajar mengajar. Peningkatan jumlah pusat-pusat kajian studi telah meningkatkan dukungan pada proses belajar mengenai kurikulum yang diterapkan melalui informasi yang diperoleh berkaitan dengan pengalaman kerja lulusan, atau melakukan reorganisasi unit akademik untuk meningkatkan kerjasama dengan dunia

kerja misalnya dengan membentuk komite akademik.¹⁶

Struktur organisasi PTKI di Indonesia mempunyai pengalaman yang sama dengan penegasan Dill. Penjelasan Azra sebagai rektor mengindikasikan dampak itu ada saat perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN. Ia menjelaskan kebijakan UIN sebagai “IAIN *with wider mandate*” telah menimbulkan dua opsi yang masing-masingnya mempunyai kekuatan dan kelemahan.

Pertama, transformasi langsung IAIN Jakarta yang mungkin dipandang cukup siap, terutama dari segi SDM dan lingkungan akademik, untuk menjadi UIN. Transformasi seperti ini melibatkan perubahan/penyesuaian atau peningkatan fakultas-fakultas yang ada sekarang, dan pembentukan fakultas-fakultas baru yang sesuai dengan konsep dan kerangka UIN. Langkah transformasi seperti ini mengandung beberapa masalah khususnya dalam penambahan prasarana, sarana dan SDM dalam bidang keilmuan tertentu, khususnya ilmu umum. *Kedua*, mendirikan atau membentuk jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas baru dalam institusi IAIN sekarang sehingga secara substantif sesuai dengan kerangka UIN.¹⁷

Semua PTKI memang tidak sebesar UIN dalam organisasi kelembagaannya, namun konstruksi OP pada PTKI harus dilihat sebagai optimalisasi mutu akademik melalui penguatan produksi usaha bidang Tridarma Perguruan Tinggi dalam pendidikan PTKI melalui ekstensi-

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Azyumardi Azra. “IAIN Di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi, <http://www.ditperta.net/artikel/azyu01.asp>

fikasi segala potensi dan aset PTKI, baik akademik maupun pendukung akademik menjadi sumber belajar. Potensi aset tersebut berupa sumberdaya lingkungan fisik dan nonfisik, sumber daya manusia, muatan ajaran, bahan pembelajaran, sarana pembelajaran, dan teknik/strategi yang berfungsi dan bermanfaat dalam memberi kemudahan belajar dan memberi sumbangan positif untuk peningkatan mutu pengembangan dan pengabdian ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

OP bisa mengubah semua aset PTKI berperan dan berfungsi menjadi sumber-sumber yang mampu membelajarkan dan memberi kemudahan setiap orang tanpa terkecuali untuk belajar, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan memprioritaskan perluasan pemanfaatan fungsi teknologi informasi.

Prioritas teknologi dipilih juga disarankan dalam satu kajian tentang lembaga pendidikan dalam naungan dan koordinasi kementerian Agama meliputi universitas, institut dan sekolah tinggi baik negeri atau swasta. Penelitian empiris Suryadi, pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Jakarta untuk menjadi OP dapat menjadi pertimbangan bagi PTKI untuk menggali kekuatan teknologi informasi sebagai ujung tombak dalam implementasi OP. BDK dan PTKI memiliki kesamaan fungsi dalam pembelajaran sepanjang hayat dalam satu naungan lembaga meski ada perbedaan karakter pendidikan yang berbeda.

Berdasar kriteria Klark yang memiliki kesamaan dengan instrumen yang disusun oleh Marquardt, menyimpulkan, BDK Jakarta belum memiliki aspek-aspek bernilai

lebih. Aspek itu bisa menjadi modal yang baik untuk meningkatkan aspek lainnya.¹⁸

Marquardt menggarisbawahi pemikiran Senge tentang dialog sebagai salah satu teknologi dengan menjadikannya sebagai disiplin tersendiri. Pembelajaran dapat dianggap sebagai menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas tim untuk menciptakan hasil yang pesertanya sungguh-sungguh menginginkannya. Proses itu berdasar pada penguasaan pribadi dan visi bersama. Individu kemudian harus mampu untuk bertindak bersama-sama. Disiplin belajar tim dimulai dengan dialog sehingga makna melalui kelompok, yang memungkinkan kelompok untuk menemukan wawasan yang tidak dicapai secara individual. Dialog hampir bisa diletakkan di samping sistem berpikir sebagai fitur sentral dari pendekatannya.¹⁹

Dialog berasal dari dua kata latin, *dia* dan *logos* yang bersugesti makna mengalir masuk (*meaning flowing trough*). Isaacs menjelaskan kata itu telah kontras dengan situasi debat yang cenderung bersifat defensive untuk mempertahankan pendapat sendiri dan mematahkan pendapat lainnya. Proses dialog secara gradual untuk situasi defensive dalam pertukaran dengan memperbesar peluang untuk memahami mengapa pertukaran pemahaman selama proses dialog bisa terjadi. Tujuan sentralnya

¹⁸ Asip Suryadi, "Potensi Balai Diklat Keagamaan Jakarta Untuk Menjadi Organisasi Belajar," *MediK-* Nomor 2, Mei - Agustus 2009, h. 34-37

¹⁹ Michael J. Marquardt, *The Learning Organization : Mastering The 5 Elements For Corporate Learning*, 2nd. ed., (USA: Davies-Black Publishing, 2002), h. 26.

adalah wahana bagi pertemuan dan eksplorasi dimana mereka yang terlibat di dalamnya membiarkan pemaknaan yang berkembang bebas dalam semangat pencarian latar belakang kolektif dalam pemikirannya, mengetahui masing-masing predisposisi personal, memahami situasi bagaimana mereka perhatian hingga mengidentifikasi kekakuan yang ada dalam asumsi individual maupun kolektif para pesertanya.²⁰

Dialog sebagai salah satu teknologi yang berbeda dalam wawasan yang tidak bisa dicapai secara individual. Teknologi ini memberikan kemudahan pemunculan makna melalui kelompok, yang memungkinkan untuk menemukan kebersamaan dalam ragam kultur budaya baik yang dibawa dari native social maupun yang berkembang di tiap lini organisasi dalam memahami apa yang berkembang di dalamnya untuk mencapai tujuan.

Teknologi informasi lainnya telah berubah cepat dalam urutan kebutuhan masyarakat Indonesia. Satu dasawarsa yang lalu, teknologi informasi masih dipandang sebagai asesoris tersier. Situasi sekarang berubah setelah ragamnya semakin banyak dan substitutive. Masyarakat telah memandang informasi sebagai kebutuhan mutlak.

Dalam OP, Marquardt menegaskan, sub sistem teknologi adalah alat pendukung bagi akses terbuka bagi pertukaran informasi dan pembelajaran. Alat itu memenuhi kebutuhan teknis proses, pendukung struktur

²⁰ William J. Isaacs, "Taking Flight, Dialogue, Collective Thinking and Organizational Learning", *Organizational Dynamics*; Autumn 1993, Vol. 22 Issue 2, h. 24-39

dalam kolaborasi, pelatihan, koordinasi dan penguasaan pengetahuan keterampilan lainnya.²¹

Kegunaan lain teknologi informasi yang tak bisa diabaikan terutama dalam pengembangannya sebagai alat dan metode lanjutan dalam pembelajaran.²² Teknologi dalam OP memberikan kesempatan PTKI untuk mengembangkan model pendidikan terbuka. Prasarana pendidikan tinggi yang saat ini belum dapat mengakomodasi pertumbuhan penduduk, usia sekolah dan pertumbuhan kerja secara lebih luas perlu dioptimalkan guna mendukung program pendidikan yang bersifat massal, dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas tanpa pandang bulu untuk belajar sepanjang hayat. PTKI dalam dekade mendatang perlu mengakomodasi kebutuhan belajar mahasiswa melalui perluasan model pendidikan berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

Penutup

PTKI melalui OP harus memosisikan organisasi yang terbuka dan kaya sumber belajar yang mampu menjadi pusat sumber belajar bagi semua lapisan masyarakat. Pencapaian tujuan itu menuntut komitmen seluruh anggota civitas. PTKI kemudian mengembangkan dan melanggengkan lingkungan organisasi yang menguntungkan bagi pembelajaran semua level, bagi kebangkitan dan stimulasi kekuatan belajar bagi semua sivitas akademika, dan bagi pemanfaatan pembelajaran yang mutakhir yang diciptakan

²¹ Marquardt, *The Learning ...*, h. 30

²² Marquardt, *The Learning ...*, h. 31

dalam rangka memperoleh hasil yang memberi manfaat maksimum bagi organisasi perguruan tinggi.

PTKI dapat menempuh pengembangan budaya belajar dengan mempromosikan hal-hal positif, membuat tempat kerja aman untuk berfikir, memberi ganjaran bagi setiap keberanian individu menghadapi risiko, membantu setiap individu menjadi sumber belajar bagi yang lain dengan memprioritaskan pembenahan teknologi informasi yang dimiliki tanpa terkecuali. Seleksi dan pilihan teknologi harus dipertimbangkan bahwa kecanggihan unsur pokok. Manfaat dan tepat sasaran didahulukan dalam jangkauan sumber daya yang ada.

PENGEMBANGAN PTKI MENUJU RISET UNIVERSITY

Munawar Ahmad

Memahami Riset University

Riset university menjadi istilah trend di kalangan pengelola perguruan tinggi. Semenjak berbagai survey tentang perguruan tinggi dunia yang dilakukan beberapa lembaga survey, seperti THES, ARWU, atau webometric, menjadikan isu riset university sebagai kiblat bahkan menjadi target pengelolaan perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Tak terkecuali melanda perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), meliputi STAIN, IAIN, UIN dan PTKI swasta.

Pada tahun 2004 sampai 2009 *Times Higher Education* milik *News Internasional* merupakan bagian dari grup kerajaan media Rupert Murdoch menggunakan 5 (lima) kriteria, yakni: (1) *academic peer review* atau analisis dari komunitas elit akademik (bobotnya 40 persen). (2) *recruiter review*, hampir sama dengan *academic peer review*, hanya

saja statusnya tidak tetap (bobotnya 10 persen); (3) faculty student ratio yang melihat kualitas perkuliahan (bobotnya 20 persen); (4) *citation per faculty* atau publikasi ilmiah per fakultas yang dikutip dalam skala internasional (bobotnya 20 persen); (5) *international orientation* atau orientasi internasional yang dilihat dari persentase mahasiswa internasional dan staf internasional, masing-masing bobotnya 5 persen (bobotnya 10 persen). Kriteria itulah yang dijadikan acuan perguruan tinggi menuju kelas dunia yang diharapkan nama universitasnya terdaftar salah satu terbaik tingkat dunia.

Berbeda dengan lembaga penelitian lainnya, berdasarkan rangking yang dibuat webometrics.com per Januari 2012, Universitas Gadjah Mada (UGM) menepati rangking 30 Asia, Institut Teknologi Bandung (ITB) rangking 33, dan Universitas Indonesia (UI) ke 53. Sementara untuk tingkat dunia, UGM berada di peringkat 249, ITB (277), dan UI (365). The Webometrics Ranking of World Universities diketahui sebagai laman web yang memeringkat universitas-universitas di dunia berdasarkan indikator komposit yang memperhitungkan baik volume isi web (jumlah halaman web dan file), visibilitas dan dampak dari publikasi web sesuai dengan jumlah di link-eksternal yang mereka terima. Peringkat tersebut dipublikasikan Cybermetrics Lab, sebuah kelompok penelitian yang berbasis di Madrid, Spanyol. Lembaga penelitian tersebut bernama Spanish National Research Council (CSIC).

Secara nasional pada tahun 2015 lalu dibentuk gugus tugas untuk membantu lima PT unggulan nasional untuk

mencapai peringkat WCU. Kelima PT unggulan itu adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Air-langga, dan Institut Pertanian Bogor, agar –paling tidak– diharapkan bisa masuk 500 top dunia.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk WCU. THES (London) mensyaratkan empat hal, yakni kualitas riset dengan bobot 60%, kesiapan kerja lulusan (10%), pandangan internasional (international outlook) (10%), dan kualitas pengajaran (20%). ARWU, yang berkedudukan di Tiongkok, mematok lima syarat, yaitu jumlah alumni/staf yang mendapat penghargaan internasional, jumlah peneliti (dosen) yang risetnya banyak dikutip peneliti lain, jumlah artikel yang diindeks oleh jurnal yang telah ditentukan, persentase artikel yang dipublikasikan jurnal internasional, dan jumlah biaya riset PT yang bersangkutan.

Persyaratan webometrics berbeda lagi. Ada empat syarat, yakni berapa banyak tautan situs eksternal dari situs lain, banyaknya “halaman” yang ditemukan “mesin pencari” di internet, banyaknya volume file yang ada di situs PT dalam format pdf, ps, doc, dan powerpoint, dan jumlah tulisan akademik yang dijumpai di Google Scholar.

Dari beragam syarat itu, terdapat tiga syarat inti yang patut diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pertama, bagaimana perguruan tinggi merancang kegiatan riset yang dapat menghasilkan invensi dan inovasi kualitas dunia. Kedua, bagaimana agar tulisan peneliti atau dosen dapat dipublikasikan oleh jurnal akademik internasional

dan dapat menjadi referensi oleh peneliti dan dosen PT lain. Dan ketiga, bagaimana staf atau alumni suatu PT dapat meraih penghargaan-penghargaan bertaraf internasional.

Dari ketiga syarat inti tersebut, tampak bahwa unsur riset merupakan syarat terpenting dalam WCU. Artinya, tanpa reputasi riset, sebuah PT tidak mungkin masuk peringkat dunia. Riset sudah menjadi kewajiban di dunia akademik, yang mana tradisi ini memang sudah ada sejak dulu kala.

Di Indonesia, tradisi riset masih perlu mendapat perhatian serius. Pada umumnya PT kita masih dominan terkonsentrasi pada kegiatan pendidikan dan pengajaran. Sementara kontribusinya terhadap kegiatan riset masih samar-samar, jika tak boleh disebut “tak-jelas.” Kiprah riset disini masih diposisikan sebagai ‘academic exercises’, belum fokus pada usaha untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Padahal dalam konsep terkini, PT sudah diposisikan menjadi pusat riset (centre of excellent), yang umumnya bekerja sama dengan industri.

Melihat kondisi yang dialami perguruan tinggi kita saat ini, hendaknya para pemimpin PT, peneliti maupun kalangan praktisi perlu mengubah mindset atau orientasi. Seyogianya riset PT kini menghasilkan kekayaan intelektual, invensi, dan inovasi, yang secara nyata dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat dan industri sehari-hari.

Fenomena di atas dikaitkan dengan situasi perguruan tinggi di Indonesia akan menimbulkan banyak kendala, untuk mengimplementasikan *world class university*

di Indonesia harus di kaji mendalam sehingga bersifat kontekstual. Apakah Worl class university hanyalah sebuah narasi adanya arus modernitas dan globalisasi? yakni sifat latah pihak universitas yang euphoria, antusias tanpa menyadari kesiapan finansial maupun non finansial yang mapan. Atau world class university bersifat urgensi agar tidak ketinggalan di dunia pendidikan internasional.

THES menggunakan 4 kriteria utama dalam menentukan skor ranking universitas di dunia, yaitu:

1. Kualitas Penelitian (*Research Quality*)
2. Kesiapan Kerja Lulusan (*Graduate Employability*)
3. Pandangan Internasional (*International Outlook*)
4. Kualitas Pengajaran (*Teaching Quality*)

Keempat kriteria di atas diejawantahkan dalam berbagai indikator penilaian di mana masing-masing indikator memiliki bobot (*weight*) yang berbeda. Gambar di bawah ini adalah paparan lengkap kriteria di maksud:

Criteria	Indicator	Brief Description	Weight*
Research Quality	Peer Review	Composite score drawn from peer review (which is divided into five subject areas). 3,703 responses.	40%
	Citations per Faculty	Score based on research performance factored against the size of the research body	20%
Graduate Employability	Recruiter Review	Score based on responses to recruiter survey. 738 responses	10%
International Outlook	International Faculty	Score based on proportion of international faculty	5%
	International Students	Score based on proportion of international students	5%
Teaching Quality	Student Faculty	Score based on student/faculty ratio	20%

Kriteria **Kualitas Penelitian** (*Research Quality*) memiliki bobot yang paling tinggi (60%). Dua indikator yang dinilai adalah yang pertama dari hasil Peer Review. Disebarkan angket online ke 190.000 akademisi dimana mereka diminta mengisi pertanyaan berdasarkan bidang kepakaran mereka, yaitu Arts & Humanities, Engineering & IT, Life Sciences & BioMedicine, Natural Sciences dan Social Sciences. Kemudian mereka diminta memilih 30 universitas terbaik dari wilayah mereka sesuai dengan bidang kepakaran tersebut. Indikator kedua adalah Citations per Faculty, alias berapa banyak publikasi paper dari peneliti (professor) di univesitas tersebut dan jumlah citation (kutipan) berdasarkan data dari the Essential Science Indicators (ESI).

Kriteria **Kesiapan Kerja Lulusan (Graduate Employability)** memiliki bobot 10% dengan indikator penilaian Recruiter Review. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil survey terhadap 375 perekrut tenaga kerja. Kriteria **Pandangan Internasional (International Outlook)** memiliki bobot 10% dengan dua indikator yaitu, jumlah fakultas yang menyediakan internasional program dan jumlah mahasiswa internasionalnya.

Kriteria **Kualitas Pengajaran (Teaching Quality)** dinilai dari indikator rasio jumlah mahasiswa dan fakultasnya (Student Faculty). Bobot penilaian cukup signifikan karena mencapai 20%. Selain dari hasil survey, data-data tambahan juga diambil dari organisasi World Scientific, Mardev, JobsDB (Philippines) dan JobStreet (Malaysia).

Peringkat 100 teratas masih didominasi universitas-universitas dari Amerika Serikat, Eropa dan Australia. Tahun 2006, Asia berhasil menempatkan 13 universitasnya di top 100, yaitu Jepang (3 universitas), Hongkong (3 universitas), China (2 universitas), Singapura (2 universitas), India (2 universitas), dan Korea Selatan (1 universitas).

PTKIN Berangkat Menuju Asa: Pendidikan Berkualitas

Keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang sudah dirintis sejak zaman penjajahan. Satiman Wirjosandjojo di Pedoman Masyarakat Nomor 15 Tahun W (1938) pernah melontarkan gagasan pentingnya sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum muslimin di tanah Hindia Belanda. Gagasan tersebut terwujud pada tanggal 8 Juli 1945 ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta. Pada masa revolusi, STI ikut Pemerintah Pusat RI hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali di kota Yogyakarta tersebut. Pada bulan Nopember 1947 dibentuk panitia perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 10 Maret 1948 dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan.

Sebagai wujud penghargaan Pemerintah bagi Yogyakarta sebagai kota revolusi, kepada golongan nasionalis diberikan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950. Dalam perkembangannya Universitas Islam Indonesia semakin

berkembang pesat dan memiliki 22 Fakultas cabang di Seluruh Indonesia. Sementara itu, kepada golongan Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang diambil dari Fakultas Agama UII. Sehingga pada dasarnya UIN Sunan Kalijaga merupakan pecahan dari UII, dikarenakan pada saat itu terjadi peleburan Fakultas di UII berdasarkan peraturan pemerintah yang melarang adanya Fakultas cabang. Fakultas lain seperti Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (UII) kini menjadi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan masih banyak Fakultas yang lainnya yang menjadi Perguruan Tinggi pecahan UII tersebut. Sehingga saat ini UII dan UIN Sunan Kalijaga telah terpisah menjadi institusi yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1950. PTAIN memiliki empat jurusan, yaitu Jurusan Dakwah (kelak Ushuludin), Qodlo (kelak Syari'ah), dan Pendidikan (kelak Tarbiyah). Sementara di Jakarta, enam tahun kemudian berdiri pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada tanggal 14 Agustus 1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957.

Dalam rangka menjadikan PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta memenuhi kebutuhan umat Islam, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 11 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) *Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah* yang berkedudukan di Yogyakarta, dengan PTAIN sebagai induk dan ADIA Jakarta sebagai fakultas dari Institut tersebut. IAIN ini diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama, K.H.M. Wahib Wahab dengan Prof.

Mr. Sunarjo sebagai rektornya. Perkembangan IAIN yang pesat menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 yang memungkinkan didirikannya suatu IAIN yang terpisah dari pusat.

Semenjak tahun 2000, terjadi perubahan besar dalam lingkungan PTKIN, yaitu suatu revolusi paradigmatis keilmuan. Pada era ini terjadi kebijakan baru dalam pengembangan PTKI, yakni pemberian *grant* dari IDB untuk pengembangan institusi PTKIN di Indonesia. Maka sejak tahun tersebut, mulai digagas 4 IAIN menjadi UIN (IAIN Sultan Kasim, Riau, IAIN Syarif Hidayatullah, IAIN Sunan Gunung Djati, IAIN Sunan Kalijaga, dan IAIN Alauddin, Makasar, serta satu STAIN menjadi UIN, yakni STAIN Malang. Sejak itulah terjadi booming paradigma keilmuan di kalangan PTKIN, yang pada intinya suatu upaya integrasi keilmuan antara inspirasi Alquran, ilmu dan sains. Paradigma keilmuan sejumlah PTKIN adalah sebagai berikut

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Integratif interkoneksi jaring laba-laba
2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, integrasi keilmuan
3. UIN Malik Ibrahim Malang, pohon ilmu
4. UIN Alauddin Makasar, sel cemara
5. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, wahyu memandu ilmu
6. UIN Sultan Kasim Riau, *Spiral Andromeda*
7. UIN Walisongo Semarang, Wahdatul ulum
8. UIN Sunan Ampel, menara kembar tersambung

(integrated twin-towers)

9. UIN Arraniri , paradigma frikatifisasi ilmu “sinar”
10. IAIN Surakarta, relasi trilogi suci

Strategi UIN Sunan Kalijaga menuju *Research University*

Sebelum mengembangkan strategi, maka terlebih dahulu lembaga penelitian UIN Sunan Kalijaga memetakan ulang tapak riset yang telah dilakukan untuk menemukan kekuatan sekaligus kelemahannya. Perkembangan kecenderungan penelitian berdasar sebaran fakultas sejak 1991-2012 dari tahun ke tahunnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini dapat kami dijelaskan sebagaimana tersebut pada tabel 12 di bawah ini sebagai berikut :

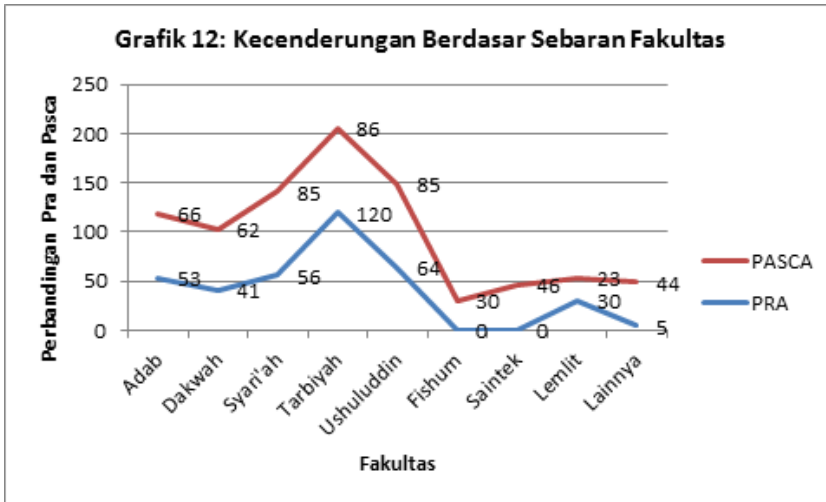
Tabel 1
Kecenderungan Penelitian Berdasar Fakultas 1991-2012

Fakultas	Pra	Pasca	Jumlah	% Pra	% Pasca
Adab	53	66	119	44,53782	55,46218
Dakwah	41	62	103	39,80583	60,19417
Syari’ah	56	85	141	39,71631	60,28369
Tarbiyah	120	86	206	58,25243	41,74757
Ushuluddin	64	85	149	42,95302	57,04698
Fishum	0	30	30	0	100
Saintek	0	46	46	0	100
Lemlit	30	23	53	56,60377	43,39623
Lainnya	5	44	49	10,20408	89,79592
JUMLAH	369	527	896	41,18304	58,81696

Sumber : Isnanto, 2013

Dari tabel 12 tersebut di atas digambarkan bahwa kecenderungan penelitian berdasar sebaran fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga tahun 1991-2012 kami bagi berdasar pada penelitian yang dilakukan sebelum menjadi UIN atau ketika masih bernama IAIN (periode 1991-2003) dan setelah berubah menjadi UIN (periode 2004-2012).

Jumlah total penelitian yang dilakukan sejak 1991-2012 sebanyak 896 judul penelitian dengan rincian ketika masih bernama IAIN sebanyak 369 orang peneliti (41,18304%). Sedangkan setelah menjadi UIN sebanyak 527 orang peneliti (58,81696%). Penelitian di semua fakultas mengalami peningkatan, kecuali fakultas Tarbiyah mengalami penurunan dari 120 orang (58,25243%) menjadi 86 orang (41,74757%) dan Lembaga Penelitian dari 30 orang peneliti (56,60377%) menjadi 23 orang (43,39623%). Untuk Fishum dan Saintek keterlibatan dalam Penelitian dimulai tahun setelah perubahan menjadi UIN. Dari sini menunjukkan bahwa setelah menjadi UIN secara kuantitas ada peningkatan jumlah penelitian yang cukup, akan tetapi secara kualitas perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana yang disebutkan pada grafik 12 di bawah ini:



Sumber : Isnanto, 2013

Perkembangan kecenderungan penelitian sejak 1991-2012 dari tahun ke tahunnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan, Tak terkecuali perkembangan penelitian berdasar pada jenis penelitian. Perkembangan ini dapat kami dijelaskan sebagaimana tersebut pada tabel 13 di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 2
Kecenderungan Berdasar Jenis Penelitian tahun 1991-2012

Jenis	Pra	Pasca	Jumlah	% Pra	% Pasca
Murni	165	125	290	56,89655	43,10345
Terapan	202	271	473	42,70613	57,29387
Kebijakan	2	119	121	1,652893	98,34711
Laboratorium	0	12	12	0	100

Sumber : Isnanto, 2013

Berdasar tabel 13 di atas terlihat bahwa keadaan penelitian berdasar pada jenis penelitian di Lembaga

Penelitian tahun 1991-2012 berjumlah 896 judul penelitian yang dibagi menjadi 4 (empat) jenis penelitian yaitu murni, terapan, kebijakan dan laboratorium. Empat jenis penelitian ini dilakukan secara aktif oleh para peneliti sejak transformasi dari IAIN menjadi UIN, yaitu sejak 2004. Sejak itu jenis penelitian kebijakan menjadi trend para dosen/peneliti, hal ini dapat dilihat adanya peningkatan yang signifikan dari 2 penelitian (1,652893%) ketika masih IAIN menjadi 119 penelitian (98,34711%) ketika sudah bertransformasi menjadi UIN. Kemudian terbanyak setelah itu adalah jenis penelitian terapan yaitu sebanyak 202 orang peneliti (42,70613%) ketika IAIN menjadi 271 orang peneliti (57,29387%) setelah menjadi UIN.

Setelah itu penelitian laboratorium nampaknya menjadi trend ketika sudah menjadi UIN. Hal ini dapat dilihat adanya penelitian yang dilakukan oleh 12 orang peneliti setelah menjadi UIN. Sebenarnya menjadi aneh ketika penelitian laboratorium dilakukan setelah transformasi dari IAIN menjadi UIN. Padahal ketika masih IAIN sudah memiliki laboratorium pendidikan dan laboratorium dakwah. Dan yang terakhir adalah jenis penelitian Murni yang mengalami penurunan jumlah penelitian yaitu dari 165 orang peneliti (56,89655%) menjadi 125 orang peneliti (43,10345%).

Kalau melihat data-data tersebut menunjukkan telah terjadi pergeseran jenis penelitian yang semula (Periode IAIN) didominasi oleh penelitian Murni bergeser menjadi dominasi penelitian terapan ketika sudah bertransformasi menjadi UIN. Pergeseran ini sedikit banyak adanya pengaruh pendekatan integrasi interkoneksi dalam setiap

kajian baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pelaksanaan penelitian. Tidak hanya penelitian terapan, peneliti laboratorium dan penelitian kebijakan juga terlihat nyata perubahannya.

Sementara kecenderungan penelitian berdasar tema penelitian pada tahun 1991-2012 dapat kami jelaskan sebagaimana tersebut pada tabel 15 di bawah ini:

Tabel 3
Kecenderungan Berdasar Tema Penelitian tahun 1991-2012

Tahun/tema	Pra	Pasca	Jumlah	% Pra	% Pasca
SAIs	15	13	28	53,57143	46,42857
PiKFT	81	76	157	51,59236	48,40764
SpraSos	89	167	256	34,76563	65,23438
SPIs	34	43	77	44,15584	55,84416
BSA	21	19	40	52,5	47,5
Pendis	90	142	232	38,7931	61,2069
Dis	28	29	57	49,12281	50,87719
PMPIs	11	38	49	22,44898	77,55102
TOTAL			896		

Sumber : Isnanto,2013

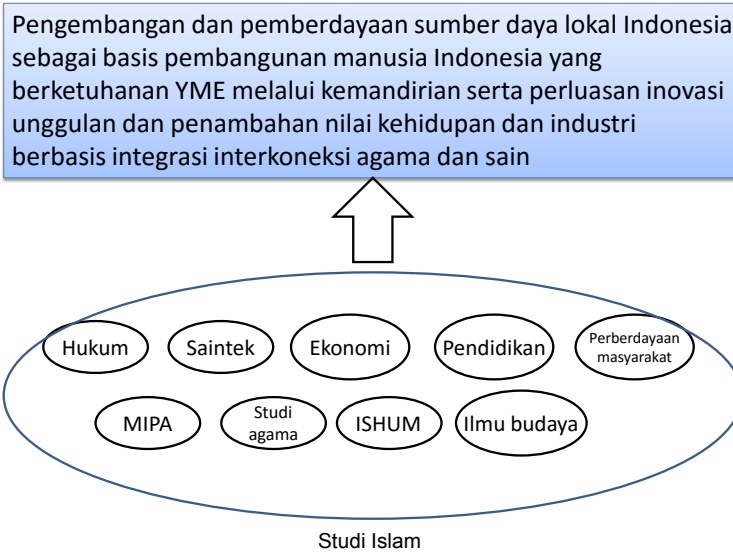
Data pada tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa penelitian berdasar pada tema pada tahun 1991-2012 sebarannya dapat dibilang merata, hal ini dapat dilihat dari 8 (delapan) bidang ilmu pengetahuan dijadikan tema oleh para peneliti. Dalam melihat perkembangan tema ini kami lihat ketika masih bernama IAIN (1991-2003) dan setelah transformasi menjadi UIN (2004-2012).

Terjadi peningkatan tema penelitian yang signifikan dalam penelitian, pertama tema Perkembangan Modern

dan Pembaharuan dalam Islam mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu 11 orang peneliti (22,44898%) pada masa IAIN dan 38 orang peneliti (77,55102%) ketika sudah menjadi UIN. Kedua, tema Syari'ah dan Pranata sosial dari sebelumnya ketika IAIN sebanyak 89 orang peneliti (34,76563%) menjadi 167 orang peneliti (65,23438%). Ketiga, tema Pendidikan Islam sebanyak 90 orang (38,7931%) ketika masih IAIN menjadi 142 orang (61,2069), keempat tema Dakwah Islam ketika masih bernama IAIN terdapat sebanyak 28 orang peneliti (49,12281%) dan 29 orang peneliti (50,87719%). Kelima tema Sejarah dan Peradaban Islam sebanyak 34 orang peneliti (44,15584%) masa IAIN menjadi 43 orang (8,1594%) ketika transformasi menjadi UIN berjalan.

Kemudian tema-tema yang mengalami penurunan adalah *pertama* Sumber Ajaran Islam (SAIs) sebesar 15 orang peneliti (53,57143%) ketika masih IAIN menjadi 13 orang (46,42857%) yang melakukan penelitian setelah transformasi menjadi UIN. *Kedua*, tema Pemikiran Islam, Kalam, Filsafat dan Tasawuf (PiKFT) sebanyak 81 orang (51,59236%) menjadi 76 orang (48,40764%), dan ketiga, BSA sebesar 21 orang peneliti (52,5%) turun menjadi 19 (47,5%).

Bertitik tolak dari kajian tersebut, UIN Sunan Kalijaga mulai menata diri untuk menentukan arah penelitian ke depan menuju WCU, seperti tercantum dalam diagram dibawah ini menunjukkan varian-varian atau bidang-bidang baru, tidak lagi mengkaji tradisi keilmuan seperti ketika masih IAIN pra-2000.



Keluaran Riset Penentu Universitas Riset

Setelah menyadari peta kekuatan dan potensi riset dari kalangan internal, maka secara strategis pengembangan riset diarahkan pada tujuan umum dari Penelitian Unggulan UIN Sunan Kalijaga adalah untuk meningkatkan kinerja penelitian UIN Sunan Kalijaga dalam upaya mencapai keunggulan akademik (*academic excellence*), nilai ekonomi (*economic value*) dan dampak social (*social impact*). Secara khusus penelitian unggulan bertujuan untuk:

1. mendorong UIN Sunan Kalijaga menjadi universitas berbasis riset dan universitas kelas dunia,
2. meningkatkan kualitas pendidikan,
3. mempercepat proses pemberdayaan masyarakat
4. meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatkan publikasi nasional dan internasional

Perkembangan lingkup nasional dan regional telah mendorong stakeholder (pemerintah, mahasiswa, sponsor mahasiswa, pengguna lulusan, pengguna berbagai jasa UIN Sunan Kalijaga) menuntut lebih banyak kepada lembaga untuk lebih berkualitas sehingga lembaga ke depan diharap melakukan peningkatan kualitas yang berkelanjutan (continuous improvement) sesuai kebutuhan stakeholder sehingga memenuhi tuntutan akuntabilitas. Perkembangan perguruan tinggi lain baik PTN, PTS, maupun PTA adalah pesaing dalam usaha namun sekaligus mitra dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Keadaan ini dapat dijadikan dasar bagi UIN Sunan Kalijaga untuk bertekad dan berusaha menjadi lembaga yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keislaman secara integratif.

Beberapa tantangan yang sama dihadapi oleh semua dunia pendidikan di Indonesia yakni, mengembangkan pertumbuhan ekonomi kawasan MP3EI, dengan tekanan pertumbuhan pada 6 koridor atau wilayah pertumbuhan yang memberi pengaruh terhadap kualitas pendidikan dan penelitian, sebagai berikut:

- Koridor Sumatera: sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional
- Koridor Jawa: pendorong industri dan jasa nasional
- Koridor Kalimantan: pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional
- Koridor Sulawesi: pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional

- Koridor Bali dan Nusa Tenggara: pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional
- Koridor Papua dan Maluku: pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan

Tahapan berikutnya adalah bagaimana membawa UIN menjadi universitas riset dengan daya saing global yang tinggi. Meskipun UIN saat ini belum masuk dalam universitas terbaik dunia berdasarkan beberapa survey. Berdasarkan hasil beberapa diskusi, seminar, dan workshop tentang perubahan UIN dapat disimpulkan bahwa Visi UIN harus dimodifikasi melalui konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memperhatikan paradigma baru Pendidikan Tinggi, adalah sebagai berikut:

- menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dan seni,
- melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah yang profesional sebagai sumbangan terhadap perkembangan ilmu dan teknologi,
- menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan,
- melakukan evaluasi secara reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas dan akreditasi universitas.

Tujuan tersebut ditempuh melalui: (1) peningkatan relevansi penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, (2) penciptaan suasana riset yang kondusif, (3) peningkatan efektivitas,

efisiensi, dan produktivitas, (4) peningkatan manajemen internal, organisasi, dan kepemimpinan yang tangguh dan akuntabel, (5) pemeliharaan keberlanjutan, dan (6) peningkatan aksesabilitas, ekuitas bagi masyarakat.

Sesuai dengan tahapan pengembangan pada (2015-2020), yang merupakan Fase Penguatan Institusi sebagai persiapan Menuju Universitas Riset. Beberapa indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: (1) jumlah penelitian kolaborasi yang memadai (2) perbandingan yang seimbang antara jumlah peneliti dengan hasil riset yang unggul, (3) jumlah penelitian yang didanai oleh dana hibah nasional maupun internasional, (4) jumlah hasil riset yang diterapkan dan dikomersialisasikan terutama di bidang sains, (5) jumlah hak paten yang dimiliki dan paten yang telah dikomersialkan melalui lisensi (6) jumlah publikasi nasional dan internasional, (7) tingkat tanggungjawab sosial Lemlit, (8) kualitas hasil riset dan menguatnya kerjasama universitas dengan industry. Arah Pengembangan institusi UIN Sunan Kalijaga semenjak tahun 2013, mengalami perubahan arah, yakni menuju *World Class University (WCU)*.

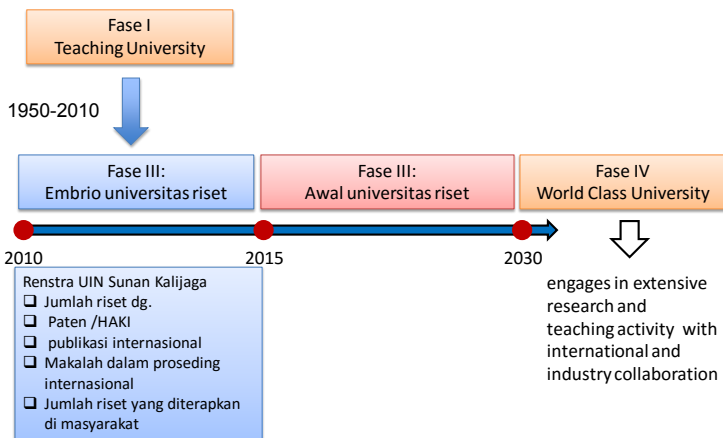
Kesadaran Menuju *World Class University*

Ancangan UIN Sunan Kalijaga untuk menuju *World Class University* sudah dicanangkan oleh Rektor dengan dibentuknya Kelompok Kerja WCU. Pada akhir tahun 2020 UIN Sunan Kalijaga diharapkan sudah mampu menjadi universitas kelas dunia yang mengajarkan *core knowledge* lembaga ini, yakni Islamic Studies.

Pengertian WCU, tentu tidak sesederhana yang dibayangkan. Hal ini menuntut beberapa prasyarat, tidak hanya bahasa pengantar, namun juga beberapa standar dalam kurikulum, manajemen, hingga pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Semenjak didirikannya, UIN Sunan Kalijaga, hingga kini, telah kukuh sebagai *teaching university*, yakni konsentrasi pengajaran lebih utama untuk internal, dibanding untuk penelitian ataupun orientasi keluar negeri. Dengan demikian, keinginan untuk menjadi WCU diperlukan pentahapan agar proses implementasi WCU telah memenuhi criteria standard bagi pelaksanaan pendidikan secara internasional.

Fase antara menuju WCU, yakni menjadikan UIN Sunan Kalijaga sebagai Research University, yang mampu menghasilkan berbagai keilmuan baru yang berguna bagi pendidikan internasional maupun masyarakat pengguna. Di dalam diagram dibawah ini dijelaskan tahapan tersebut sebagai berikut

Rencana Pengembangan UIN Sunan Kalijaga



Dari tahun 1950 -2010 semenjak IAIN hingga berubah pada tahun 2000 menjadi UIN, UIN Sunan Kalijaga masih memerlukan waktu 10 tahun untuk menginisiasi institusinya menjadi sehat, salah satunya mempersiapkan kebijakan penelitian dalam fase embrio menuju universitas riset. Kemudian semenjak penataan pada lembaga Penelitian yang digabungkan dengan Lembaga Pengabdian, Pusat Studi Layanan Difabel, pada tahun 2013, kini UIN Sunan Kalijaga semakin jelas dalam menuju fase selanjutnya sebelum menjadi WCU, yakni Research University. Pada kondisi Universitas Riset tersebut, UIN Sunan Kalijaga mencanangkan beberapa indikator yang harus ditempuhnya, yakni (1). jumlah penelitian dengan pendanaan dari luar institusi, (2). Jumlah HAKI/Paten, (3). Publikasi internasional, (4). Makalah dalam proseding, dan (5). Jumlah riset yang diterapkan oleh masyarakat.

Kegiatan penelitian merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi pada dasarnya ditujukan untuk kesejahteraan kehidupan manusia agar dapat menikmati kehidupannya secara selaras, seimbang, dan serasi dengan kemajuan ilmu dan teknologi itu sendiri. Dengan demikian penelitian akan dapat memberi arti dan sumbangan bagi upaya peningkatan kesejahteraan manusia.

1. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Penelitian pada dasarnya merupakan bagian integral yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik secara individual maupun kelompok. Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh staf dosen dari jurusan,

laboratorium, fakultas-fakultas dan pusat-pusat studi.

- b. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen-dosen diharapkan menghasilkan konsep, model, prototipe, pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan kelembagaan dan juga berorientasi pada produk yang relevan bagi pembangunan daerah dan nasional.
- c. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tiap jurusan/fakultas/ laboratorium dan pusat-pusat studi di lingkungan dikoordinir oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- d. Dalam upaya mewujudkan UIN Sunan Kalijaga menjadi "*research University*", LPPM diharapkan menjadi salah satu pemeran khususnya dalam menjalankan kegiatan dan keterpaduan penelitian dengan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat..

2. Kegunaan Penelitian

Menurut kegunaannya penelitian dalam sistem pendidikan tinggi dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Sebagai tempat mendidik calon peneliti, tempat untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian peneliti
- b. Sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
- c. Sebagai tempat yang kegiatannya dapat menunjang dan memberi sumbangan bagi pembangunan.

3. Strategi Penelitian

- a. Menyusun program penelitian dari berbagai bidang ilmu dari dosen dan mahasiswa
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengkajian ipteks
- c. Melakukan sinergi penelitian dan pengkajian ipteks dengan organisasi pemerintahan (GO) dan non pemerintahan (NGOs) yang tidak mengikat
- d. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri
- e. Membangun pusat data kegiatan penelitian dan pengkajian ipteks
- f. Membangun pusat informasi dan publikasi penelitian dan pengkajian ipteks
- g. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi kegiatan pengembangan ipteks kearah paten

Laboratorium Terpadu (Lab Terpadu) UIN Sunan Kalijaga hadir sebagai suatu tonggak baru sebuah proses panjang peningkatan UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi sebuah institusi yang dapat bersaing dengan Institusi – Institusi lain yang telah lebih dahulu lahir. Lab Terpadu ini dibentuk dengan tujuan awal sebagai *supporting facilities* bagi kegiatan akademik pada bidang ilmu Sains dan Teknologi.

Dengan apa yang dimilikinya, sudah sewajarnya Lab Terpadu ini dapat menjadi Aset yang sangat berharga bagi UIN Sunan Kalijaga dalam pengembangan kualitasnya terutama dalam hal yang terkait dengan bidang ilmu

Sains dan Teknologi. Oleh karenanya, diperlukan suatu mekanisme pengelolaan Laboratorium yang responsif dan akomodatif terhadap semua perkembangan yang ada sehingga peran Laboratorium benar – benar dapat memberikan *competitive value added* bagi institusi.

Semua kontribusi, masukan, dan keterlibatan setiap unsur yang menjadi *Stakeholder* serta Pengelola Lab yang profesional mutlak diperlukan bagi keberlangsungan Lab Terpadu kedepan. Keberhasilan Lab Terpadu tidak hanya ditentukan oleh pengelola lab semata, namun oleh sinergi seluruh elemen *stakeholder* terkait. Tanpa adanya dukungan dari semua *Stakeholder*, maka Lab Terpadu akan sulit berkembang sesuai dengan yang semestinya. Karena itu, pola Manajemen Lab Terpadu yang Akomodatif – Partisipatif serta melibatkan seluruh elemen *stakeholder* harus terus dikembangkan., Laboratorium penelitian yang dimiliki

- Laboran Kimia : 3 laboran
- Laboran Biologi : 5 Laboran :
- Laboran Fisika : 3 laboran :
- Laboran Teknik Industri : 3 laboran :
- Laboran Teknik Informatika: 5 laboran
- Laboran Pendidikan MIPA:: 1 laboran
- Laboran Matematika : 1 laboran :
- Laboratorium Microteaching : 3 laboran

Penguatan Bidang Penelitian

1. Pembinaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan selama ini merupakan program utama dari Puslitbit LP2M UIN Sunan Kalijaga melalui penganggaran dalam DIPA APBN dan BOPTN. Pembinaan secara institusional dilakukan melalui tim atau kelompok-kelompok kepanitiaan yang dibentuk. Sumber daya penggerak kegiatan ini berasal dari staff dan juga berasal dosen maupun penelitian LP2M. Pembinaan ketrampilan kepenelitian ini juga tidak hanya diperuntukan untuk para dosen peneliti maupun peneliti, juga diperuntukan bagi para mahasiswa.

Adapun dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan penelitian sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan adalah :

a. Program :

- 1). Penelitian merupakan bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka sudah menjadi keharusan bagi LP2M UIN Sunan kalijaga untuk melaksanakannya terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat ilmiah.
- 2). Kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan ilmu, teknologi dan social keagamaan terus meningkat, maka melalui kegiatan penelitian yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M terus melakukan usaha-usaha untuk memberikan jawaban dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah tersebut.

- 3). Perkembangan ilmu, teknologi dan sosial keagamaan membawa dampak dan perubahan terhadap kehidupan manusia dan juga perkembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Maka Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Kalijaga melalui kegiatan penelitian terus mengikuti dampak dan perubahan atas isu-isu strategis di masyarakat tersebut .
- b. Tenaga
Penelitian merupakan kegiatan yang mutlak harus ada di dalam usaha pengembangan ilmu, teknologi dan bidang sosial keagamaan. Hal ini membawa konsekuensi bagi Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Kalijaga untuk menyediakan dan membina tenaga-tenaga peneliti baik yang berasal dari dosen, peneliti maupun mahasiswa yang berbobot sesuai dengan bidangnya.
 - c. Sarana
Pengembangan penelitian memerlukan sarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi dan sosial keagamaan.

2. Konsep Pengembangan Penelitian

- a. Program Peningkatan Kualitas Berkelanjutan: Program ini diarahkan untuk peningkatan berbagai aset Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M dalam kepenelitian, mulai dari pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian dan evaluasi hasil penelitian, juga penyusunan kualitas

terbitan maupun penyimpanan manuskrip ilmiah

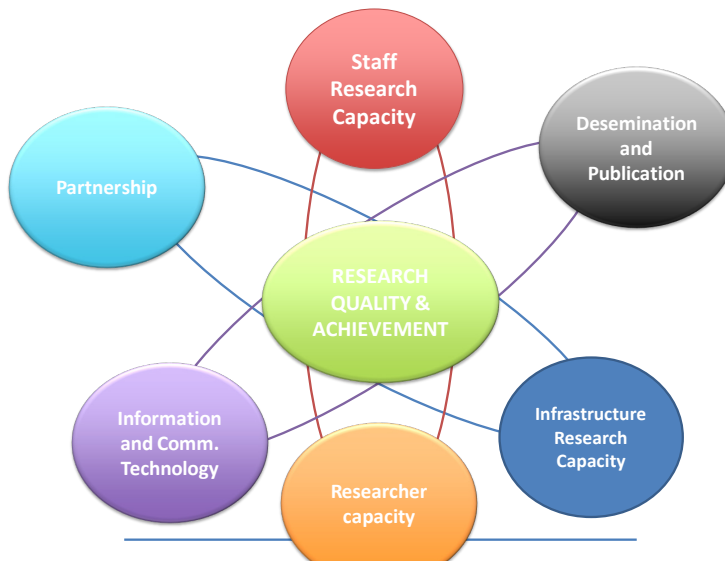
- b. Perluasan Basis Kerjasama: program ini diarahkan untuk mengembangkan jejaring kerjasama kepenelitian dan kepenerbitan dari hasil penelitian, baik pada level regional, nasional maupun internasional dengan berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak industri serta masyarakat
- c. Perkuatan Kelembagaan: penguatan ini diarahkan untuk memperkokoh pusat penelitian dan penerbitan sebagai pusat kendali atas semua proses penelitian dan penerbitan berbasis pada suatu sistem kerja yang baik, sehat dan bermutu, baik penguatan sumber daya manusia, metodologi, sistem teknologi maupun fasilitas yang berhubungan dengan pengembangan kampus secara integratif.
- d. Pemenuhan Tatakelola yang baik dan bermutu, diarahkan pada terciptanya sistem tatakelola Pusat Penelitian dan Penerbitan berbasis mutu baik dalam pelayanan, administrasi maupun konservasi manuskrip ilmiah yang dimilikinya.

Adapun dampak dari strategi pengembangan tersebut akan berkaitan dengan peningkatan kapasitas

1. Staff administrasi Pusat Penelitian dan Penerbitan
2. Kerjasama kelembagaan dalam bidang penelitian dan penerbitan baik dari dalam maupun luar negeri
3. Diseminasi dan publikasi kepenelitian terhadap tema-tema khusus sesuai dengan *core-knowledge* UIN Sunan Kalijaga sebagai institusi pengembangan *Islamic Studies*.

4. Informasi dan teknologi komunikasi dari seluruh kegiatan kepenelitian dan kepenerbitan kepada publik internal maupun eksternal UIN Sunan Kalijaga.
5. Sumber daya peneliti (dosen, *reviewer*, peneliti, mahasiswa) terhadap penguasaan berbagai metodologi keilmuan mutakhir, baik sains, humaniora, sosial, maupun keagamaan klasik dan kontemporer.
6. Infrastruktur kepenelitian dan kepenerbitan yang disesuaikan dengan pengembangan fasilitas dan infrastruktur universitas.

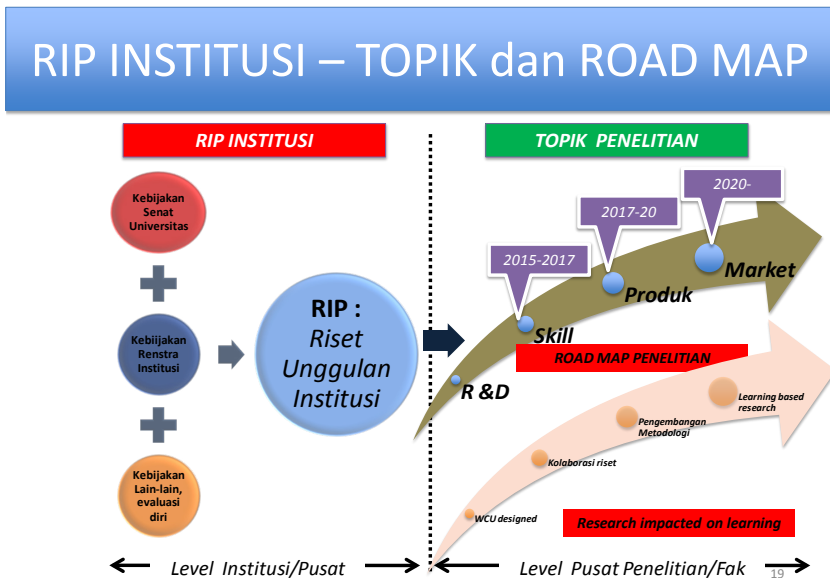
Some keys to success



Tujuan pengembangan penelitian dan penerbitan pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, mengikuti pola pengembangan institusi, yakni berupaya menjadi support terhadap misi UIN Sunan Kalijaga yakni menyelenggarakan

tridarma perguruan tinggi, dimana proses penelitian lebih ditujukan dalam membantu proses pembelajaran (*teaching proses*) walaupun demikian tidak menutup kemungkinan secara tema dan isi penelitian sangat berorientasi pada kebutuhan pasar dan permintaan donator.

Secara lebih jelas arah pengembangan tema dan isi dari pengembangan penelitian di UIN Sunan Kalijaga dijelaskan dalam diagram sebagai berikut



1. Bidang Penelitian

- a. Peningkatan dan Pengembangan kegiatan Penelitian melalui:
 - 1). pembentukan Staf Inti Peneliti dari berbagai disiplin yang penting dan relevan bagi bidang studi yang ada ;

- 2). penataran dan pemberian latihan-latihan penelitian pada staf peneliti/pengajar muda dengan tanpa mengabaikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi keikutsertaan mahasiswa.
 - 3). pembekalan tentang latar belakang masalah penelitian yang perlu diteliti utamanya dalam lapangan studi yang ada di Fakultas maupun Jurusan.
- b. Peningkatan dan Pendayagunaan Potensi Penelitian melalui:
- 1). penigkatan kemampuan penelitian dengan mengutamakan dimensi pendidikan dan penelitian terapan yang menunjang usaha pembangunan
 - 2). peningkatan penyediaan sumber dana penelitian
 - 3). peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga lain; dan
 - 4). simplifikasi prosedur administrasi penelitian

Strategi Menuju WCU

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas pada pokoknya merupakan kegiatan yang berkaitan satu sama lain dan karenanya dilaksanakan secara terpadu. Hal ini berarti bahwa pengembangan pada bidang tertentu akan senantiasa memperhatikan hasil pengembangan pada bidang yang lain. Selain itu pelaksanaan atas kegiatan-kegiatannya, sedikit atau banyak akan ditentukan juga oleh kebutuhan dan kemampuan dari lembaga. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk sedini mungkin mengadakan pengiraan ke depan, agar dengan demikian UIN Sunan Kalijaga menetapkan

skala prioritas pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Menyadari bahwa untuk tercapainya pengembangan kegiatan-kegiatan itu secara maksimal diperlukan adanya saling keterpaduan dari berbagai unsur pelaksanaan, maka masing-masing unsur/bagiannya merupakan kesatuan yang saling berinteraksi, berinterpedensi dan beriterrelasi.

Dalam pengertian itu maka seluruh unsur sivitas akademika yang terdiri dari dosen, mahasiswa karyawan dan alumni perlu diikutsertakan secara aktif untuk upaya pencapaian kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam konsep pengembangan, baik perorangan, maupun secara bersama-sama, semua unsur sivitas akademika sentiasa dibina dan diarahkan semaksimal mungkin bagi keberhasilan kebijakan tersebut.

- Peningkatan kualitas data base, manajemen dan birokrasi penelitian
- Peningkatan dana penelitian dan pengalokasian dana PNBPN oleh universitas mulai 2015
- Peningkatan mutu luaran penelitian (publikasi, HAKI, model/prototipe, dll.
- Peningkatan partisipasi dosen (S3 dan Guru Besar)
- Peningkatan kualitas & kuantitas kerjasama industri, alumni, dan luar negeri
- Komersialisasi hasil penelitian sebagai salah satu sumber dana penelitian
- Penguatan dan revitalisasi kelompok /pusat penelitian
 1. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi

kesejahteraan umat manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan

2. Mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan masyarakat, industri, institusi penelitian, serta pemerintah daerah dan pusat.
3. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti baik dosen maupun peneliti fungsional, untuk memanfaatkan secara optimal *networking* dan organisasi dengan berbagai lembaga.
4. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.penelitian.
5. Merumuskan sistem yang memberi peluang bagi peneliti berprestasi tinggi untuk berfungsi penuh sebagai peneliti universitas.
6. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
7. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
8. Penelitian diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perolehan hak patent, pengembangan industri, penyelesaian masalah-masalah publik dan pengembangan budaya bangsa, pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan

oleh masyarakat secara arif dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

9. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.
10. Menciptakan forum pertemuan antara perguruan tinggi dengan berbagai mitra, *Tripartite Industrial Meeting* (TIM) INDUSTRIAL EXPO

Dalam upaya mewujudkan mutu dan kuantitas penelitian yang sesuai dengan agenda penelitian dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat melalui :

1. Publikasi melalui jurnal, seminar dan karya ilmiah yang lain
2. Kerjasama penelitian dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan perusahaan swasta
3. Perolehan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan perusahaan swasta
4. Penemuan
5. Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan PATEN produk riset



Dengan demikian, didapat gambaran yang konkrit terhadap kekuatan UIN Sunan Kalijaga sebagai hasil pemetaan secara SWOT. Analisis Kelebihan, Kekurangan, Ancaman dan Tantangan (SWOT)

Kelebihan

1. Penyangga pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Meningkatnya sumber daya dosen-Peneliti berpendidikan S-3
3. Semakin meningkatnya komitmen penjaminan mutu
4. Menjadi tempat bertemunya peneliti/dosen dari berbagai disiplin ilmu
5. Pusat pengembangan metodologi penelitian lintas disiplin ilmu
6. Memiliki 3 Puslit
7. Tersedianya sumber daya peneliti fungsional dan

karyawan

8. Fasilitas sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan terus dikembangkan
9. Tersedianya perpustakaan berbasis WEB
10. Otonomi organisasi berbasis BLU
11. Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri
12. Penerbitan buku dan jurnal terakreditasi
13. Pelatihan penelitian yang terstruktur

Kelemahan

1. Belum terbangunnya secara baik budaya kerja, pola kerja, dan koordinasi antarbagian dalam meningkatkan produktivitas.
2. Tidak adanya evaluasi rutin terhadap efektivitas kegiatan penelitian dan pelatihan
3. Minimnya fasilitas pendukung kegiatan penelitian
4. Jaringan kerjasama lemah baik dalam lingkup internal maupun eksternal
5. Peneliti fungsional berdaya saing rendah
6. Pendidikan peneliti fungsional relatif kurang bervariasi
7. Potensi SDM belum dimanfaatkan secara optimal
8. Tidak terwakilinya kelompok peneliti dalam anggota senat
9. Belum berfungsinya Pusat Penelitian dan Penerbitan sebagai lembaga koordinasi penelitian atau terjadi overlap fungsi antara Puslitbit dengan fakultas

10. Belum terbangunnya jaringan terkoneksi tema/judul riset berbasis sistem informasi
11. Struktur organisasi kurang efektif
12. Tema penelitian kurang merujuk pada asas manfaat yang dibutuhkan stakeholder
13. Metodologi penelitian yang tidak terbarukan
14. Tidak tersedianya tenaga pustakawan di Perpustakaan LP2M
15. Rendahnya perhatian institusi internal
16. Minimnya penelitian yang dipatenkan
17. Minimnya bank proposal

Peluang

1. Terbukanya berbagai peluang untuk kegiatan penelitian seiring dengan tumbuhnya ekonomi kawasan di dunia, khususnya di sekitar Indonesia.
2. Kebijakan pemerintah terhadap penelitian semakin kondusif
3. Kebutuhan akan adanya trend-setter bagi penelitian berparadigma integrasi-interkoneksi di Indonesia
4. Otonomi daerah memerlukan SDM berkualitas dalam berbagai bidang
5. Peluang untuk merancang kembali berbagai aspek dalam sistem kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat
6. Semakin aktualnya persoalan Islam dan agama dalam tantangan global
7. Banyaknya tawaran riset dalam skala regional, nasional,

- dan internasional baik dari pemerintah maupun LSM
8. Peningkatan anggaran riset secara nasional
 9. Otonomi memperluas jaringan

Ancaman

1. Plagiasi dan pengulangan hasil riset
2. Perubahan yang cepat dan sulit diprediksi fenomena sains, agama, dan kemanusiaan akibat krisis berbagai bidang dan bencana alam
3. Penyalahgunaan hasil riset untuk kepentingan golongan
4. Rendahnya kepercayaan institusi luar terhadap Penelitian di UIN Sunan Kalijaga

Masalah Utama Pengembangan Riset

Masalah utama pengembangan riset UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan Islam terkemuka dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Dosen-Peneliti.
2. Peningkatan Kualitas Metodologi Riset. Masih perlu pengenalan metodologi kontemporer, khususnya metodologi berparadigma integrasi-interkoneksi sebagai metodologi utama untuk kajian islamis studies di UIN Sunan Kalijaga.
3. Peningkatan Kualitas Manajemen Penelitian. sebagai konsekuensi lembaga yang terkemuka dalam pengembangan kajian Islam kontemporer, UIN Sunan Kalijaga yang bercita-cita menjadi *World Class University*, perlu meningkatkan manajemen penelitian agar penelitian

dapat menjadi barometer pengembangan keilmuan yang terus meningkat, mulai dari penyusunan tema, anggaran, penentuan reviewer hingga publikasi ilmiah melalui suatu manajemen mutu.

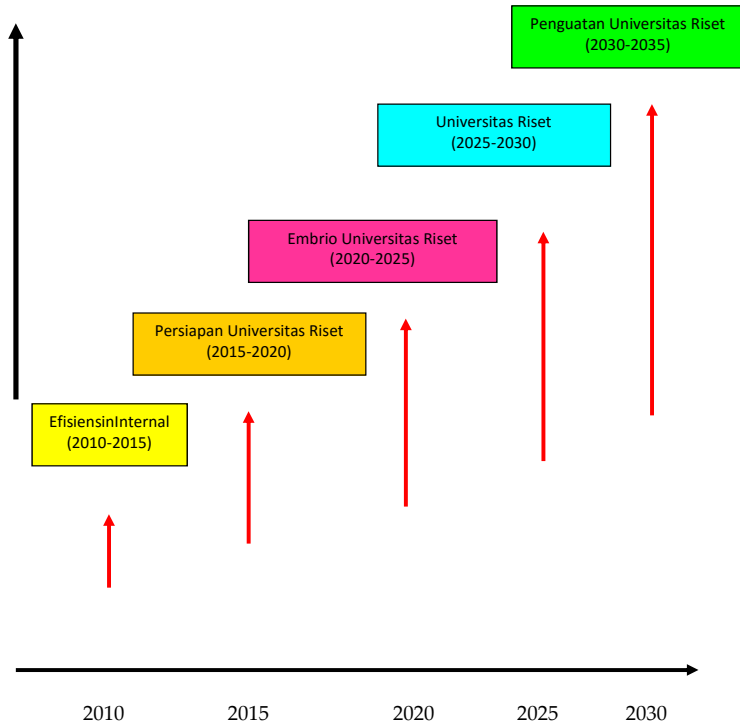
4. Optimalisasi Asset untuk Penelitian.
5. Optimalisasi IT dalam pengembangan Informasi Penelitian.

Pendekatan yang perlu digunakan untuk menjawab tantangan dan masalah yang dihadapi maka pendekatan yang dipilih adalah melakukan peningkatan kualitas yang berkelanjutan (*continuous improvement*) dengan dasar pemikiran yang bersifat sirkuler dalam teknis pelaksanaannya yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan (PDCA = *Plan, Do, Check, Act*).

Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan kualitas unit kerja yang diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan benar-benar dikerjakan sehingga mencapai mutu. Evaluasi terhadap pelaksanaan dilakukan sebagai suatu kebutuhan untuk memperbaiki langkah selanjutnya agar dapat mencapai baku kinerja yang ditetapkan bersama. Pelaksanaan peningkatan kualitas yang berkelanjutan disesuaikan dengan keadaan di masing-masing unit kerja.

Strategi pengembangan 25 tahun Lemlit UIN Sunan Kalijaga dilakukan dengan tahapan 5 tahunan, yaitu: (1) efisiensi internal, (2) perbaikan untuk persiapan sebagai universitas riset, (3) embrio sebagai universitas riset, (4) universitas riset, dan (5) penguatan sebagai universitas riset. Program efisiensi internal didukung dengan per-

baik fasilitas infrastruktur, seperti: gedung, seminar, diseminasi hasil riset unggulan, pengembangan pusat pelatihan, laboratorium yang terintegrasi, ITC dan pusat-pusat penelitian yang sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat.



**Isu strategis fokus kajian penelitian dan penerbitan
UIN Sunan Kalijaga**

No	Isu Strategis	Konsep Pemikiran	Pemecahan Masalah
1	Pengembangan Islamic Studies	Penemuan berbagai model, konsep yang solutif bagi permasalahan bangsa kontemporer berbasis Islam dan turats klasik dan modern	Model, teknologi dan konsep yang dapat diterapkan didalam kemaslahatan hidup manusia di Indonesia
2	Pengembangan khazanah Islam Nusantara	Mengangkat harkat dan martabat Islam Nusantara dan studi islam kawasan	Konservasi atas berbagai bentuk manuskrip Islam di Nusantara dan kawasan
3	Pengembangan industri halal	Menciptakan industri halal sebagai alternatif	Aplikasi industri halal bagi masyarakat
4	Pengembangan Ekonomi Syariah	Mengembangkan aplikasi syariah dalam sistem keungan	Mereduksi penyakit birokarasi yang kolutif dan koruptif
5	Pengembangan Pendidikan Inklusif	Pemberdayaan masyarakat	Aplikasi pendidikan yang demokratis
6	Pengembangan sains islami	Rekayasa energy, pangan Pelestarian lingkungan hidup berbasis integrasi-interkoneksi, inovasi dalam pendidikan sain	Aplikasi teknologi tepat guna dalam kehidupan kontemporer

Kebijakan sumber dana dan output penelitian

1. Sumber dana dan skema kemitraan yang akan dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Kalijaga
2. Sumber dana berasal dari Lembaga Pembiayaan riset akademik diperuntukan untum keunggulan saintifik bidang agama dan sains
3. Sumber dana berasal dari lembaga pembiayaan pembangunan diperuntukan bagi peningkatan daya saing industri
4. Sumber dana berasal dari perusahaan swasta diperuntukan bagi peningkatan kualitas kebijakan dan kapasitas implementasi pemerintah
5. Sumber dana berasal dari pemerintah daerah dan organisasi karitas diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat

Kesimpulan

Perjalanan PTKI telah mengalami revolusi dalam paradigma keilmuannya, sejak tahun 2000, PTKI bergerak secara cepat memposisikan diri sebagai garda terdepan pengawal integrasi ilmu-agama-sains. Hal itu menjadikan posisi PTKI menjadi perguruan dengan suatu gengsi keilmuan yang unik dan diburu orang. Perjalanan tersebut menjadi kesadaran sistemik dari UIN Sunan Kalijaga, khususnya sebagai inisiator peneguhan paradigma keilmuan integrasi interkoneksi.

Perubahan paradigma akhirnya menjadi syarat administratif dari donator bagi PTKI-PTKI yang juga berkehendak mengembangkan institusinya. Hal tersebut sangatlah penting sebagai upaya membangun kesadaran sistemik apa yang harus dikerjakan dalam pengembangan ilmunya. Walaupun memang tidak jaminan terjadi revolusi keilmuan, karena pada dasarnya perubahan paradigma hanyalah administrasi belaka.

Berdasarkan pada pembelajaran UIN Sunan Kalijaga, tampak sekali ada keseriusan menggapai keinginan berkompetisi, masuk dalam World Class University, setidaknya ada pembenahan pada strategi risetnya. Walaupun sekali lagi kesadaran tersebut, masih pada satu sektor saja, yakni Lembaga Penelitian. Dari pembelajaran tersebut, hendaknya menjadi perhatian bagi Kementerian Agama, sebagai penyelenggara PTKI untuk semakin serius mengembangkan kesiapannya menuju WCU dengan berbagai pentahapannya. Setidaknya UIN Sunan Kalijaga sudah melangkah, yang dapat diambil sebagai *best practicess* yang dapat dipetik pelajarannya. Namun yang perlu dikembangkan lebih lanjut, bukan pada pengembangan paradigmatik, akan tetapi pengembangan pada mesin epistemologisnya, yakni mewujudkannya menjadi metodologi keilmuan.

Bagian Kedua:
Kerjasama dan Kontribusi

KONTRIBUSI PTKI DALAM PENGEMBANGAN KERUKUNAN

Singgih Basuki

Pendahuluan

Keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagaimana yang dikenal di Indonesia saat ini secara historis adalah merupakan pengembangan dan perubahan dari Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 34 tahun 1950. Peraturan tersebut lahir atas pertimbangan bahwa dalam beberapa hal baik di kalangan pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya, diperlukan tenaga ahli di bidang ilmu keagamaan pada umumnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang kompeten di bidang keagamaan tersebut, pelajar dan mahasiswa di Indonesia saat itu banyak yang melanjutkan studi di perguruan tinggi di luar negeri yang tidak memiliki hubungan dengan sistem pembelajaran dan kurikulum madrasah-madrasah, baik swasta maupun negeri yang ada

di Indonesia. Maksud dari didirikannya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang kemudian disempurnakan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 adalah untuk memberikan pengajaran dan menjadi pusat perkembangan serta memperdalam pengetahuan tentang Agama Islam.¹

Sejalan dengan semangat keterbukaan dan demokratisasi pada era reformasi serta ditopang oleh semakin terbukanya akses media tertulis maupun internet pada saat ini, maka peran dan fungsi PTAI yang kini telah berubah menjadi PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) semakin penting dan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, termasuk kerukunan hidup dalam beragama.

Di samping itu, sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia, PTKI juga ikut bertanggungjawab untuk mengemban amanat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka terwujudnya kehidupan masyarakat yang berperadaban serta memiliki daya saing tinggi di dunia global yang sudah barang tentu tanpa melupakan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Untuk merealisasikan hal tersebut bukan merupakan perkara yang mudah karena di samping tantangan di atas, pada dua dasawarsa terakhir ini muncul paham dan gerakan radikal yang berafiliasi dengan gerakan dari luar negeri (trans

¹ Penjelasan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam.

nasional) yang berperilaku kekerasan berbasis agama.

Belum lagi maraknya berbagai kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama, penyimpangan dan penistaan agama serta lahirnya organisasi-organisasi dikaitkan dengan agama yang justru mengoyak kerukunan dan ketenteraman kehidupan masyarakat, di mana tindakan dan gerakan-gerakannya justru tidak mencerminkan keluhuran dan kesucian nilai-nilai agama itu sendiri. Berbagai kasus penyimpangan agama juga semakin marak, di antaranya kasus Gafatar, Lia Eden, Dimas Kanjeng, munculnya nabi palsu dan sebagainya. Hal tersebut memperkuat stigma negatif yang diarahkan pihak tertentu terhadap Islam sebagai agama kekerasan, identik dengan teror serta hal-hal negatif lainnya.

Untuk itulah maka kiprah PTKI ditunggu oleh masyarakat dalam rangka meluruskan berbagai pemahaman dan kesan yang salah terhadap Islam tersebut, untuk selanjutnya PTKI dituntut untuk menyajikan dan merepresentasikan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. PTKI memiliki potensi sumber daya yang sangat strategis yaitu mencetak kader alumni yang memiliki basis keilmuan keagamaan serta keilmuan umum sesuai dengan konsentrasi dan program studinya masing-masing. Mereka akrab dengan berbagai permasalahan kegamaan yang digelutinya selama di bangku kuliah serta memiliki kemampuan keilmuan sesuai dengan kompetensi program studi yang dipilihnya.

Mereka akan menjadi suatu model sarjana yang santun dalam berperilaku serta handal dalam menerapkan

keilmuan yang pantas menjadi teladan bagi lingkungan masyarakatnya. Potensi tersebut sesuai dengan harapan dan ide pendiri STI (Sekolah Tinggi Islam) yang menjadi cikal bakal PTAI yaitu Satiman dan Mohammad Hatta untuk membangun sistem pendidikan tinggi Islam yang inklusif dan dinamis dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Cita-cita itu diwujudkan dengan cara mengintegrasikan tradisi Islam dengan tradisi Barat.² PTKI dengan integrasi itu patut dipertimbangkan menjadi laboratorium strategis bagi negara dan pemerintah serta sebagai instrumen penghasil kader-kader bangsa untuk menetralsir kekerasan menjadi kelembutan serta menciptakan kehidupan yang rukun, damai, maju dan berperadaban.

Bercermin pada Pemikiran Mukti Ali

Sejalan dengan keniscayaan sejarah, agama akan senantiasa menghadapi keadaan yang serba berubah secara cepat dan kompleks. Pertemuan antar agama, di satu sisi, bersifat suci, normatif atau tekstual dengan realitas kehidupan modern yang kontekstual, manusiawi bahkan sekular; sedangkan di sisi lain, pertemuan tersebut memunculkan kontroversi pemikiran sepanjang sejarah yang tidak mudah diselesaikan. Satu pihak berpandangan konservatif yaitu dengan melihat Islam pada masa lalu

² Fuad Jabali dan Jamhari (peny.), *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hal. 17. Dalam bahasa lain: pribadi yang berhati Mekah dan berotak Jerman.

dalam rangka menjaga kemurnian agama, sementara pada pihak lain muncul sikap progresif yang ingin merekonstruksi Islam untuk masa depan.

Ketika ada upaya dari para pemikir pembaharu Islam untuk mempertemukan keduanya, ada yang setuju dengan alasan kebutuhan dan keniscayaan sejarah, namun ada yang enggan atau ragu-ragu dengan alasan bahwa dengan campur tangan manusia, maka akan mengurangi wibawa dari nilai-nilai kesucian agama itu sendiri.

Di antara para intelektual yang mampu membaca sejarah serta menjawab tantangan pendiri STI yang kini menjadi PTKI adalah Mukti Ali. Dengan basis pendidikan agama di pondok pesantren Termas Pacitan, dia melanjutkan belajar dan mukim di Mekah, kemudian meneruskan ke Karachi Pakistan. Setelah itu memperdalam wawasan keilmuannya di Istitute of Islamic Studies Mc.Gill University Montreal Canada.³

Dengan mewarisi semangat pendiri STI, dia berupaya mengembalikan IAIN ke cita-cita pendirian semula yaitu memahami Islam secara inklusif, akademis dan empiris. Secara sistematis dan penuh semangat, dia mengembangkan wawasan baru yaitu metodologi dan perbandingan agama dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap terbuka terhadap perbedaan agama serta menghilangkan kecurigaan.⁴ Sudah selayaknya jika PTKI sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang mengemban misi keilmuan dan dakwah,

Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan Mukti Ali* (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2013), hal. 19-20.

4 Fuad Jabali dan Jamhari (peny.), *IAIN dan Modernisasi...*, hal. 46.

meneladani serta mengimplementasikan pemikirannya demi terwujudnya cita-cita pendirinya tersebut.

Mukti Ali dikenal sebagai sosok pembaharu pemikiran Islam yang moderat, menghargai pluralitas keberagaman baik dalam internal maupun eksternal masyarakat Islam. Dalam mengungkapkan pemikirannya, ia menyampaikannya dengan bijaksana, tidak kontroversial dan provokatif tetapi dengan gaya dan caranya yang khas yaitu memadukan konsep-konsep secara akademik disertai dengan solusi serta langkah-langkah konkrit yang nyata. Gagasan-gagasan itu dikemukakan secara cerdas dan piawai sehingga relatif tidak menimbulkan reaksi dari orang-orang yang tidak setuju dengan pemikirannya. Sebagai pelopor pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, dia menyemaikan bibit pembaharuan Islam di Indonesia dengan memberi ruang berpikir dan melindungi kalangan pemikir kreatif serta senantiasa menjaga hubungan baik dengan kalangan senior, antara lain dengan Masyumi. Ia juga tetap menjaga hubungan baik dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, bahkan mencoba merujukkannya namun konsisten tidak mau menjadi anggota salah satunya walaupun diindikasikan dekat dengan Muhammadiyah.

Dia juga dikenal sebagai ilmuwan yang menjadi pelopor dan pengagas konsep kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia sebagai sebuah model harmonisasi kehidupan nasional. Gagasannya amat penting dalam konteks saat itu, dimana kehidupan umat beragama di Indonesia sedang dilanda ketegangan yang seringkali menimbulkan konflik secara fisik.

Gagasan-gagasan segar tersebut lantas diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan ketika menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1971-1978. Secara mendasar, filosofi pemikirannya tentang kerukunan umat beragama terdiri atas tiga pilar prinsip keadilan Islam, yaitu: kebebasan hati nurani secara mutlak, persamaan kemanusiaan secara sempurna serta solidaritas dalam pergaulan yang kokoh⁵. Oleh penerusnya, Alamsjah Ratu Perwiranegara, gagasan tersebut dikembangkan menjadi “Trilogi Kerukunan” yaitu kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.

Hingga kini, ide besarnya tersebut masih tetap relevan bahkan menjadi rujukan bagi pemerhati maupun penentu kebijakan dalam rangka membangun dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia. Tercatat berbagai lembaga akademik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, lembaga formal atau birokrasi pemerintahan, termasuk Kementerian Agama, maupun non formal atau Lembaga Swadaya Masyarakat, terus berupaya mengembangkan gagasannya lebih lanjut.

Paling tidak, telah diselenggarakan dua kegiatan ilmiah berskala internasional yang mengkaji pikiran-pikirannya. Pertama, Konferensi Masa Depan Studi Agama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya atau CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Sekolah Pascasarjana Universitas

⁵ Tutty Alawiyah, “Pak Mukti Ali: Pribadi Bersahaja dan Cendekiawan Rendah Hati” dalam Djam’annuri (ed.), *Agama dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), p. 52.

Gadjar Mada Yogyakarta tanggal 9 Oktober 2015.

Salah satu acara pokoknya adalah membahas pemikiran “Great Thinker: Mukti Ali dan Studi Agama di Indonesia”. Kedua, *International Conference: Reactualizing Harmony and Tolerance among Religious Communities* yang diselenggarakan oleh Program Studi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Asosiasi Studi Agama Indonesia tanggal 29 Oktober 2015 di Yogyakarta. Tema konferensi tersebut adalah “Reaktualisasi Trilogi Kerukunan Umat Beragama” dimana salah satu acaranya yaitu mendiskusikan topik tentang “*Social Engineering for Interreligious Harmony: Mukti Ali and his Trilogy of Interreligious Harmony*”.

Etos Keilmuan

Semangat keilmuan Mukti Ali mulai nampak atas kepeduliannya terhadap kegelisahan intelektual kaum muda pada kurun waktu tahun 1967- 1971. Ia mendorong secara moral dan intelektual serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan kelompok diskusi “*Limited Group*” dengan merelakan sebagian rumahnya dijadikan tempat diskusi secara intensif tentang berbagai persoalan, khususnya pemikiran keagamaan.

Kelompok itulah yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh intelektual muslim seperti M. Dawam Rahardjo, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, Syu’bah Asa, Nurcholish Madjid dan lain-lain.⁶ Semangat keilmuannya terlihat

⁶ Nasrullah Ali-Fauzi, “Abdul Mukti Ali” dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan *Ulumul Qur’an*, No 3 Vol. VI tahun 1995, p.30. Lihat pula:

sangat menonjol ketika kembali dari McGill Canada pada tahun 1970-an dengan upayanya untuk memahami Islam secara inklusif, akademis dan empiris. Dia seolah-olah ingin menjawab tantangan cita-cita Satiman dan Mohammad Hatta sebagai pendiri STI (Sekolah Tinggi Islam yang kemudian bertransformasi menjadi IAIN / UIN) untuk menciptakan model pemahaman Islam yang inklusif, akademis, sosiologis, historis dan filosofis dengan menerapkannya secara sistematis di IAIN.⁷ Kesadaran keilmuannya untuk menghubungkan Islam dengan tradisi ilmiah Barat tersebut diperoleh ketika belajar di McGill Canada:

“...Mukti Ali mengatakan bahwa ia benar-benar dibuat terpicik oleh program kajian Islam di Universitas McGill itu yang diajarkan dengan pendekatan sistematis, rasional dan – meminjam istilahnya sendiri – holistik; baik dari segi ajaran, sejarah maupun peradabannya.... Ia menegaskan perlunya memperkenalkan pendekatan empiris atas Islam sebagai jalan untuk menafsirkan ulang khazanah pemikiran Islam dalam konteks modernitas.”⁸

Implementasi wawasan keilmuannya tersebut bertumpu pada dua hal pokok yaitu pengembangan meto-

Faisal Ismail, “Paving the Way for Interreligious Dialogue, Tolerance, and Harmony: Following Mukti Ali’s Path” dalam *Al-Jami’ah Journal of Islamic Studies* Vol. 50, Number 1, 2012/1433, p. 174.

⁷ Fuad Jabali & Jamhari (peny.), *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), pp. 16-17.

⁸ Ali Munhanif, “Prof. Dr. A.Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru” dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998), pp. 281-285.

dologi pemahaman serta perbandingan agama yang baru. Menurutnya, persoalan metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu serta menjadi barometer kemajuan dan kemunduran peradaban umat manusia.

Selama abad pertengahan, Eropa mengalami stagnansi dan masa bodoh tetapi kemudian berubah menjadi kebangkitan revolusioner dalam berbagai bidang kehidupan yang mencakup sains, seni, sastra dan sosial sehingga menghasilkan peradaban dan kebudayaan sebagaimana yang ada dewasa ini.

Kemajuan tersebut diperoleh ketika cara melihat masalah dan obyek berubah karena masyarakat dan dunia juga berubah. Akibat perubahan cara pandang tersebut maka kehidupan manusia juga akan berubah. Keberhasilan Eropa dalam mencapai kemajuan tersebut disebabkan melakukan perubahan metodologi sebagai faktor fundamental dalam renaisans.⁹ Jika umat Islam ingin mencapai kemajuan maka, hendaknya belajar dari kasus Eropa, yaitu dengan cara memilih metode yang tepat dalam memahami agama.

Metode memahami Islam pada masa tahun 70-an di Indonesia masih sangat pincang. Ahli-ahli pengetahuan barat termasuk para orientalis hanya menggunakan pendekatan ilmiah-empiris saja. Walaupun kajiannya menarik, sesungguhnya mereka tidak mengerti Islam secara utuh karena hanya mengenal fakta-fakta eksternalnya saja.

⁹ Mukti Ali, *Metode Memahami Agama*, pp. vi – vii.

Sebaliknya kebiasaan para ulama Islam dalam memahami ajaran Islam masih menggunakan cara doktriner atau dogmatis yang sama sekali tidak dihubungkan dengan realitas kehidupan masyarakat. Cara pemahaman seperti ini menyebabkan pemaknaan tentang Islam bersifat parsial, serta tidak relevan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Inilah yang menyebabkan munculnya kesan bahwa Islam sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk itulah maka harus dipilih metode yang tepat untuk memahami Islam yaitu metode pendekatan *scientific-cum-doktriner* atau sintesis antara ilmiah dan agamis.¹⁰

Pendekatan sintesis ini dipandang mampu melihat Islam secara menyeluruh karena Islam, pada dasarnya, merupakan agama yang tidak hanya terdiri dari satu dimensi tetapi multi-dimensi. Begitu pula Al-Qur'an adalah suatu kitab multi-dimensi yang telah menarik minat pemikir-pemikir besar sepanjang masa dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkajinya yaitu: linguistik dan literer, filsafat dan kredo, antropologis, kosmologis, historis, psikologis, sosiologis dan sejarah, namun tidak boleh melupakan doktrin agama. Berbagai kajian tersebut hingga kini belum tuntas pembahasannya karena belum semua ayat-ayat Al-Qur'an terungkap rahasia keilmuannya.¹¹ Sudah barang tentu, hal tersebut menjadi tantangan besar bagi para ilmuwan pada masa kini dan masa datang.

Mukti Ali kemudian mengembangkan disiplin ilmu baru di Indonesia sebagai implementasi konkrit dari

¹⁰ *Ibid.*, p. 32.

¹¹ *Ibid.*, p. 33.

pemikirannya tentang pendekatan sintesis tersebut, yaitu Ilmu Perbandingan Agama. Baginya Ilmu Perbandingan Agama adalah:

“Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha memahami gejala-gejala keagamaan daripada suatu kepercayaan dalam hubungannya dengan agama lain. Pemahaman ini meliputi persamaan dan juga perbedaan. Dari pembahasan yang sedemikian itu, maka struktur yang asasi daripada pengalaman keagamaan manusia dan pentingnya bagi hidup dan kehidupan orang itu akan dapat dipelajari dan dinilai”.¹²

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang memadai tentang agama-agama tersebut diperlukan pendekatan ilmiah yaitu: filologi, antropologi, sosiologi, psikologi dan sejarah. Maka dari itu, sesungguhnya perbandingan agama menurutnya tidak hanya sekedar membanding-bandingkan agama tetapi lebih ditekankan pada aspek pendekatan keagamaan yang bersifat *scientific-cum-doctriner*, yaitu perpaduan antara pendekatan historis-sosiologis-antropologis-psikologis dengan normatif atau doktriner.¹³

Dengan dibukanya jurusan Perbandingan Agama di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1961 dan dia sendiri ditunjuk sebagai ketua jurusannya, maka dia leluasa mengembangkan keilmuannya dalam lingkup perguruan tinggi. Pada dasarnya, melalui jurusan ini Mukti Ali ingin memperkenalkan pendekatan multi-religius yaitu

¹² Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama, Sebuah Pembahasan tentang Metodos dan Sistema* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1975), p. 5.

¹³ Amin Abdullah, “Islam Indonesia lebih Pluraristik dan Demokratis” dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan: Ulumul Qur’an* No. 3 Vol. VI Tahun 1995, p. 73.

mempelajari berbagai agama, termasuk agamanya sendiri, agar dapat memahami dan membedakan masing-masing agama menurut doktrin, ritual, sejarah, tradisi dan lain-lain.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan seseorang mampu menghargai keragaman agama dan mengembangkan sikap toleran serta berinteraksi secara tepat dengan orang yang berbeda agama dan keyakinan.¹⁴ Dengan belajar Ilmu Perbandingan Agama, seseorang akan dapat membangkitkan dialog antar agama serta menghilangkan kecurigaan. Dengan demikian, akan tercipta kerukunan hidup antar umat beragama. Di sinilah letak arti penting keilmuan perbandingan agama serta IAIN, khususnya dalam rangka menumbuhkan sikap terbuka bagi bangsa Indonesia.¹⁵ Secara tegas dia menyatakan:

“Saya tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa “ilmu untuk ilmu”. Tetapi saya berpendapat bahwa ilmu adalah untuk ibadah kepada Allah *Subhanahu wata’ala*. Dan dengan Ilmu Perbandingan Agama itu saya – bersama-sama dengan orang yang mempunyai visi yang sama – berusaha untuk membentuk dunia yang aman dan damai berdasarkan etik dan moral, yang jauh dari pertikaian, permusuhan dan kebencian satu kepada yang lain. Kesanalah Ilmu Perbandingan Agama kita arahkan”.¹⁶

¹⁴ Achmad Munjid, “Signifikansi Studi dan Pengajaran Agama Model Inter-Religius dalam Memaknai Pluralisme” dalam Samsul Maarif (peny), *Studi Agama di Indonesia: Refleksi Pengalaman* (Yogyakarta: Prodi CRCS Sekolah Pascasarjana UGM, 2015), p. 46.

¹⁵ Fuad Jabali dan Jamhari, *IAIN & Modernisasi*, pp. 46-47.

¹⁶ Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama” dalam: Samuel Pardede (ed.), *70 Tahun Dr. T.B. Simatupang: Saya adalah Orang yang Berhutang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), p. 299.

Dengan begitu nilai strategis ilmu ini adalah: pertama, dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama serta mengeliminir konflik antar agama di Indonesia yang dikenal sebagai bangsa multikultural, termasuk agama, dari perspektif keilmuan. Kedua, dengan menggunakan metodologi pemahaman agama yang tepat yaitu ilmiah-agamis, maka umat beragama akan dapat merasakan fungsi dan manfaat agama yang sangat luhur dan mulia yaitu kedamaian dan keselamatan hidup.

Namun, untuk mewujudkan cita-citanya tersebut ternyata tidaklah mudah karena pada awalnya, ilmu ini menghadapi banyak kendala sehingga tidak dapat berkembang dengan baik di Indonesia. Di antara beberapa sebab yang fundamental adalah: *pertama*, kuatnya arus mistik dalam kehidupan agama di Indonesia yang lebih mementingkan segi amalan daripada pemikiran ilmiah.

Kedua, para ulama lebih banyak menekankan pemikiran pada bidang fikih dengan pendekatan secara normatif atau doktriner yang sangat jauh berbeda dengan pendekatan ilmiah terhadap agama pada umumnya. *Ketiga*, timbul semangat untuk meningkatkan dakwah terjadi setelah pemberontakan Komunis pada tahun 1948 dan 1965. Hal ini menimbulkan apologi di kalangan para penulis muslim.

Keempat, masih adanya prasangka bahwa ilmu ini berasal dari Barat sehingga umat melihatnya dengan penuh kecurigaan. *Kelima*, peminat ilmu ini kurang menguasai ilmu-ilmu bantu perbandingan agama seperti sejarah, sosiologi, antropologi, arkeologi serta bahasa asing

terutama Arab dan Inggris. Mukti Ali mengingatkan bahwa dalam mempelajari ilmu ini, seseorang harus berhati-hati agar tidak terseret dalam Teologi maupun Filsafat Agama.¹⁷

Seiring dengan berjalannya waktu, serta berkat kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung, berbagai kendala yang menghalangi berkembangnya ilmu perbandingan agama tersebut dapat teratasi. Bahkan, kini eksistensi ilmu ini di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) semakin mantap, ditandai dengan dibukanya jurusan atau program studi ini pada hampir di semua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se Indonesia yang saat ini sudah mencapai jumlah 53 buah. Keberhasilan usahanya tersebut tidak terlepas dari kegigihan dan kekuatan akademik Mukti Ali dalam mengembangkan disiplin ilmu ini serta kedudukannya sebagai Menteri Agama RI.

Melalui kedudukan di birokrasi itulah, ia dapat leluasa mengimplementasikan pemikirannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan Departemen Agama. Namun di samping itu juga, karena adanya faktor lain seperti semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap para ahli yang menguasai bidang ilmu ini untuk merawat kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat Indonesia yang multikultural.

Dalam perkembangan selanjutnya, kini muncul fenomena baru, yaitu Ilmu Perbandingan Agama yang

¹⁷ Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), pp. 6-9.

sedang dalam proses bertransformasi menjadi studi agama atau *religious studies*.¹⁸ Ilmu ini kenyataannya tidak hanya berdiri dan berkembang di lingkungan PTKIN saja tetapi juga di berbagai Perguruan Tinggi Umum maupun Kristen pada tingkat Strata 1, 2 serta 3 namun dengan menggunakan berbagai nama. Di UGM (Universitas Gajah Mada) dibuka Program Studi Ilmu Perbandingan Agama yang kemudian berubah menjadi Studi Agama dan Lintas Budaya atau CRCS (*Center for Religious and Cross-cultural Studies*), Sekolah Pascasarjana; Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) dan UIN Sunan Kalijaga serta UGM Yogyakarta membangun konsorsium ICRS (*Indonesian Consortium for Religious Studies*) yang menyelenggarakan Program Studi jenjang S-3; UIN Sunan Gunung Djati Bandung membuka Prodi Studi Agama-agama atau *Religious Studies* jenjang S-2 & S-3; Universitas Sanata Dharma Yogyakarta membuka Prodi Religi dan Budaya; Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon membuka Prodi Agama dan Budaya.¹⁹ Sementara itu, di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk jenjang S-1 tetap menggunakan nama Perbandingan Agama sedangkan untuk S-2 pada mulanya bernama Hubungan Agama, kini berubah menjadi Studi Agama dan Resolusi Konflik yang berada pada Prodi Agama dan Filsafat.

¹⁸ Para ahli dan pengelola Prodi Ilmu Perbandingan Agama dari 11 PTKIN merekomendasikan perubahan nama Perbandingan Agama menjadi *Religious Studies* (Studi Agama-agama) namun tidak mencapai titik temu. Lihat: *Pikiran Rakyat*, 16 November 2014.

¹⁹ Suhadi, "Mengembangkan Studi Agama Yang Terlibat / *Engaged Religious Studies*", Makalah, disampaikan dalam Konferensi Masa Depan Studi Agama di Indonesia yang diselenggarakan oleh CRCS UGM Yogyakarta tanggal 9 Oktober 2015.

Kajian keilmuan perbandingan agama rintisan Mukti Ali ternyata tidak hanya dilakukan di lingkup perguruan tinggi tetapi juga oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), misalnya pada era 90-an berdiri LPKUB (Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama) di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga saat itu, yang mendapat sponsor penuh dari Kementerian Agama RI. Lembaga ini menyelenggarakan berbagai seminar, musyawarah, serta dialog tentang kerukunan antar agama; serta menerbitkan jurnal berbahasa Inggris “Religiosa”.²⁰ Di samping itu juga berdiri INTERFIDEI (*Institute for Inter-faith Dialogue in Indonesia*) / DIAN (Institut Dialog Antar-Iman di Indonesia) yang berada di Yogyakarta. Lembaga ini mengkhususkan diri pada dialog antar umat beragama yang tidak berpijak pada teologi agama tertentu dalam rangka mendorong tumbuhnya pemikiran-pemikiran baru tentang kemanusiaan untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia.²¹ Di samping itu masih banyak lembaga-lembaga sejenis lain yang bergerak di bidang kerukunan antar umat beragama, di antaranya FPUB (Forum Persaudaraan Umat Beriman), FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dan sebagainya.

Etos keilmuan Mukti Ali juga nampak dalam usahanya melakukan pembenahan lembaga pendidikan Islam yang bernaung di bawah Departemen Agama yaitu: madrasah, pesantren dan sekolah agama termasuk

²⁰ Indonesian Journal on Religious Harmony “RELIGIOSA”, No.4 Vol. 2, 1997, p. iv.

²¹ Th. Sumartana et.all, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: DIAN & Pustaka Pelajar, 1994), p. 270.

perguruan tinggi. Sebagaimana diketahui, sejak 1946 persoalan politik pasca kemerdekaan mengakibatkan kewenangan dan pengawasan pendidikan umum berada di bawah tanggungjawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta pendidikan agama di bawah Departemen Agama. Inilah awal mula terjadinya dualisme sistem pendidikan di Indonesia yaitu terpisahnya pendidikan umum dan pendidikan agama. Dalam kondisi yang semakin rumit karena berbagai gejolak politik, pemerintah Orde Baru berencana melakukan pembenahan pendidikan Islam. Mukti Ali bisa merealisasikannya sehingga muncul SKB Tiga Menteri tahun 1975 yang intinya adanya pengakuan akan kesamaan pendidikan madrasah dengan umum, misalnya lulusan madrasah Aliyah bisa diterima menjadi mahasiswa kedokteran. Targetnya adalah lulusan madrasah, termasuk pesantren, dapat diakui oleh masyarakat umum secara terbuka. Di samping itu, ia juga berhasil membawa lembaga-lembaga pendidikan Islam terlibat dalam *mainstream* rencana pembangunan nasional.²² Dengan kata lain, dia melakukan pembenahan sistem pendidikan Islam secara mendasar dengan mendisain kembali kurikulum yang ada dalam rangka menghasilkan intelektual muslim yang mampu berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.²³

Adapun tentang pondok pesantren, menurutnya lembaga itu telah memberikan kontribusi yang besar

²² Ali Munhanif, "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik, pp. 310-318.

²³ Carool Kersten, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values* (London: C. Hurst & Co Ltd, 2015), p.37-38.

terhadap perkembangan Islam khususnya pada bangsa Indonesia dengan lahirnya pemimpin yang berkepribadian religius. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, sistem pendidikan di pesantren berhasil dimodernisir, yaitu para santrinya tidak hanya mendalami ilmu dan moralitas Islam tetapi juga harus mendapat didikan ketrampilan dan teknologi sebagai bekal hidupnya. Sistem pendidikan pesantren terdiri atas lima elemen yang harus ditangani secara profesional dan berkesinambungan, yaitu: pengajaran dan pendidikan agama, ketrampilan, kesehatan / olahraga serta kesenian. Dengan pembekalan yang diperoleh di pesantren seperti itu maka diharapkan para santrinya jika lulus dan kembali ke masyarakatnya mampu hidup secara mandiri.²⁴ Lewat kekuatan keilmuan serta kebijakannya dalam rangka memodernisasi lembaga pendidikan Islam Dasar dan Menengah ketika menjabat sebagai Menteri Agama inilah, nampak bahwa madrasah dan pesantren yang sebelumnya dalam posisi terpinggirkan menjadi semakin diperhitungkan dalam kancah pendidikan di Indonesia.

Selanjutnya terkait dengan lembaga perguruan tinggi IAIN, ia melakukan intelektualisasi dengan menumbuhkembangkan “mental keilmuan” di kalangan civitas akademiknya. Menurutnya, Perguruan Tinggi harus sanggup menjawab perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga harus diajarkan tentang sejarah dan proses terjadinya perubahan tersebut. Namun

²⁴ Tutty Alawiyah, “Pak Mukti Ali: Pribadi Bersahaja dan Cendekiawan Rendah Hati” dalam Djam’annuri (ed.), *Agama dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), p. 49.

hal itu tidak mudah dicapai karena lemahnya orientasi keilmuan di IAIN pada khususnya. Untuk itu dia berupaya meningkatkan mutu IAIN sebagai lembaga akademis di antaranya dengan: mengirimkan sarjana muslim untuk studi lanjut di luar negeri, membenahan kelembagaan, mengenalkan penelitian sosial keagamaan serta membuka diri bagi para ahli sosial dan kemanusiaan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memahami perubahan masyarakat, Mukti Ali selalu menegaskan pentingnya tenaga pengajar dan mahasiswa IAIN untuk menguasai tiga hal yaitu: bahasa (Inggris dan Arab), metodologi serta ilmu-ilmu sosial (sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi dan filsafat). Pada kesempatan lain, dia menyatakan agar diajarkan empat ilmu, yaitu sejarah, filsafat, metodologi dan bahasa.²⁵ Dengan usahanya yang gigih, akhirnya terbentuk kesadaran baru yang disebutnya *creative minority* atau “kelompok minoritas yang kreatif”, yaitu terbentuknya sikap di kalangan mahasiswa dan dosen yang tidak hanya mementingkan aspek dakwah dari IAIN tetapi lebih menonjolkan aspek akademis dan tradisi intelektual. Untuk itu, keberadaan IAIN sebagai tempat penyemaian ide-ide keislaman di Indonesia, pada akhirnya dapat mempengaruhi wacana intelektual dalam pemikiran keagamaan di Indonesia.²⁶

Langkah konkrit lainnya dalam rangka menghidupkan *academic atmosphere* di lingkungan IAIN adalah ia aktif berperan melaksanakan program peningkatan kemampuan keilmuan & penelitian agama dosen-dosen IAIN se

²⁵ Mukti Ali, *Metode Memahami*, pp. 14 – 15.

²⁶ Fuad Jabali dan Jamhari, *IAIN dan Modernisasi*, p. 140.

Indonesia dengan dibukanya PGC (*Post Graduate Course*) tahun 1971. Program tersebut kemudian ditingkatkan menjadi SPS (Studi Purna Sarjana) yang menjadi embrio bagi lahirnya program Pascasarjana atau Strata 2 di IAIN Jakarta serta IAIN Yogyakarta tahun 1983. Selanjutnya juga dibuka Program Doktor di kedua IAIN itu serta pengiriman tenaga dosen ke luar negeri / Barat untuk studi lanjut.²⁷ Hingga tahun 1972, setahun setelah diangkat menjadi menteri, jumlah dosen yang dikirim berjumlah 55 orang. Sebelumnya, belum pernah ada kebijakan di Departemen Agama seperti ini,²⁸ bahkan program ini terus berlanjut pada masa-masa sesudahnya.

Secara luas, dampak dari intelektualisasi IAIN ini mampu memunculkan wajah baru Islam Indonesia sebagai “fenomena intelektual” daripada “ideologis” sebagaimana masa-masa sebelumnya.²⁹ Dengan kata lain, Mukti Ali berhasil menggeser posisi agama yang sebelumnya dipandang hanya semata-mata sebagai aspek doktrin-normatif menjadi *aspektual* atau aspek studi yaitu obyek materi studi agama secara ilmiah.³⁰ Sebagaimana diketahui, pada era tahun 70-an, di lingkungan perguruan tinggi Islam, muncul dua disiplin ilmu, yaitu Ilmu Dakwah dan

²⁷ Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini* (Jakarta: Rajawali, 1981), p.193.

²⁸ Fuad Jabali dan Jamhari, *IAIN dan Modernisasi*, p. 19.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Karakter studi agama ilmiah menurut Ninian Smart ada 4: aspektual, definisi agama tanpa batas yang tegas, polimetodis serta pluralistik. Lihat: Ninian Smart, “Batas-batas Studi Agama Ilmiah” dalam Ahmad Norma Permata (ed.), *Metodologi Studi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), p. 148.

Ilmu Perbandingan Agama. Latar belakang munculnya Ilmu Dakwah yaitu dalam konteks sebagai benteng terhadap ideologi komunisme pasca pemberontakan tahun 1948 dan 1965. Oleh karena itu, sifat dan semangatnya adalah apologis. Sedangkan Ilmu Perbandingan Agama lahir dalam konteks berhadapan dengan agama-agama lain, sehingga sifatnya deskriptif.³¹

Semangat keilmuannya juga terlihat ketika menjabat sebagai Menteri Agama tahun 1971-1978. Ia mampu merombak gaya, citra dan mekanisme birokrasi Departemen Agama yang sebelumnya dikenal sebagai “departemen ideologi” menjadi departemen yang sinkron dengan “semangat teknokrasi” serta kompatibel dengan modernisasi atau pembangunan. Kegelisahan intelektualnya diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan serta berbagai tulisan dalam rangka mendorong semangat segenap jajaran pegawai dan lembaga Departemen Agama untuk memposisikan agama sebagai motivator bagi pembangunan bangsa. Kegigihan usahanya tersebut berhasil memasukkan agama sebagai semangat pembangunan, bukan melegitimasi pembangunan dengan memasukkannya dalam agama.³²

Penguatan etos keilmuan Mukti Ali yang terjabarkan dalam bidang pendidikan madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama serta birokrasi Departemen Agama sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan salah satu obsesinya dalam rangka memodernisir pemikiran

³¹ Suhadi, “Mengembangkan Studi Agama”, pp. 3-4. Lihat pula Mukti Ali: *Ilmu Perbandingan Agama*, p. 8.

³² Lihat: Nasrullah Ali-Fauzi, “Abdul Mukti Ali” p. 30.

Islam di Indonesia. Tekanan utama pemikirannya adalah pada upayanya menerapkan metode pendekatan baru terhadap pemahaman Islam secara sintesis yang disebutnya *saintific-cum-doctriner* atau perpaduan antara ilmiah dan doktriner. Dengan kata lain, dia melakukan pendekatan historis-sosiologis –antropologis-psikologis atau empiris yang dipadukan dengan pendekatan normatif atau doktriner terhadap agama. Selama ini, para peneliti sering mengaplikasikan kedua pendekatan tersebut secara terpisah atau dikotomis. Padahal dalam diri manusia ada dimensi *truth claim* yang bersifat absolute yang membentuk kepribadian atau pandangan hidup, tetapi disisi lain dirinya adalah *khalifah* yang merupakan makhluk historis yang bersifat relatif.³³ Dengan menggunakan metode pemahaman tersebut, seseorang dapat memaknai agama secara komprehensif, sehingga sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Etos Kemanusiaan

Untaian pemikiran Mukti Ali tentang semangat kemanusiaan pada umumnya terbaca pada penghargaan dan keberpihakannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan daripada nilai-nilai praktisnya dalam kehidupan. Spirit tersebut terimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan Departemen Agama selama menjabat Menteri Agama 1971-1978. Menurutnya, modernisasi atau pembangunan adalah usaha perubahan masyarakat secara menyeluruh yang bertitik tolak pada kenyataan

³³ M. Amin Abdullah, "Islam Indonesia lebih Pluralistik, p.73.

sosial yang diarahkan sesuai cita-cita budaya, tuntutan sejarah dan perkembangan zaman. Pembangunan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi melainkan perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang dilandaskan dengan rencana dan terarah.

Pembangunan bukan sekedar peniruan dan pengambilalihan nilai, norma dan cara hidup dari negeri-negeri yang maju tetapi usaha peningkatan kehidupan masyarakat yang berakar pada pengalaman, sejarah dan kebudayaan masyarakat itu sendiri dengan tidak menutup kemungkinan belajar dari bangsa lain.³⁴ Pernyataan tersebut menyiratkan betapa pentingnya agama bagi bangsa Indonesia yang mendasari dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekedar nilai-nilai material.

Gagasannya tentang kemanusiaan terlihat pada konsep “pembangunan manusia seutuhnya”. Pembangunan adalah pembangunan manusia dengan segala totalitasnya, pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh umat manusia yang disebutnya pembangunan integral sebagaimana pernyataannya:

“...the widest definition of development which lays as much emphasis on human integration and liberation as it does on economic and social output. It sees development as the process of creation of a new man , a man liberated from the physical constraints of hunger, disease, superstition and utter dependence on ill-understood natural forces; but also a man liberated from spiritual constraints of his own egoism. Development is thus social and individual: material and spiritual..... the ultimate goal: that is, development of the *whole* man and

³⁴ Mukti Ali, *Beberapa Persoalan*, p. 207.

of *all* man. This involves far more than economic factor which nevertheless, is an essential pre-condition of the development of the integral development of man".³⁵

Pada akhir tulisannya, dia menegaskan: with the close and unqualified collaboration of all religions and faiths of Indonesia, and of the world at large, development can be achieved. With God nothing is imposible.³⁶ Pernyataan tersebut semakin menegaskan pentingnya agama bagi manusia dalam rangka memberi motivasi dan mengarahkan aktifitas hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akherat.

Adapun implementasi konkrit pemikirannya tentang nilai-nilai agama yang memuat visi kemanusiaan, tertuang dalam berbagai tulisan yang diterbitkan menjadi buku *Agama dan Pembangunan di Indonesia* sebanyak 9 jilid oleh Departemen Agama, terdiri dari 166 tema. Di samping itu, gagasannya juga tertulis dalam empat buku *Agama dan Pembangunan* yang memuat 170 tema, dan diterbitkan oleh Lembaga Lektur Keagamaan.³⁷

Berbagai persoalan atau tema yang ditulis dalam buku tersebut terkait hubungan nilai agama dengan birokrasi, politik, ekonomi, kesehatan, keluarga, pendidikan, kebudayaan, kebijakan pembangunan, komunikasi, hukum, koperasi, hubungan antar umat beragama, kependudukan, lingkungan hidup, keluarga berencana, transmigrasi dan

³⁵ Mukti Ali, *Religion and Development in Indonesia* (Yogyakarta: Nida, 1971), p. 11-12.

³⁶ *Ibid.*, p. 22.

³⁷ Agussalim Sitompul, "Prof. Dr. HA Mukti Ali: Penggagas, Pemikir dan Pendidik" dalam Djam'annuri (ed.), *Agama dan Masyarakat*, p. 140.

sebagainya. Pendekatan yang dipakai dalam pemikirannya tersebut adalah *scientific cum-doctriner* yaitu memadukan doktrin agama dengan ilmiah yaitu historis-sosiologis.

Menurutnya, berbagai konsep dan teori pembangunan yang dicita-citakan bersama akan sia-sia atau tidak ada gunanya jika tidak melihat peran manusia sebagai pelaku proses pembangunan itu sendiri. Dengan hidup bersama sebagai anggota kelompok sosial maka akan terjadi interaksi sosial di antara anggota kelompok secara bersama-sama atau antara kelompok itu dengan kelompok lainnya.

Interaksi itu memerlukan kesediaan saling memberi dan menerima, mempengaruhi dan dipengaruhi, merubah dan dirubah, antara anggota individu dengan kelompok, serta antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Faktor-faktor itu mengharuskan manusia untuk melibatkan diri dalam lingkungan kehidupannya yang mencakup berbagai segi, di antaranya: masalah komunikasi, agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, nilai-nilai dan sebagainya. Dalam kaitan ini, faktor agama menjadi sangat penting bagi manusia untuk membangun kehidupannya sedemikian rupa sehingga mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin. Paling tidak ada empat fungsi agama yaitu:

1. Motivatif, yaitu faktor yang mendorong, mendasari, melandasi cita-cita amal dan amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya.
2. Kreatif, yakni mendorong manusia bukan hanya untuk melakukan kerja produktif saja melainkan juga kerja kreatif dan inovatif.

3. Sublimatif, yaitu faktor yang meng kuduskan segala kegiatan manusia, bukannya yang bersifat keagamaan saja melainkan juga yang bersifat kemanusiaan. Agama dalam hal ini mengajarkan agar manusia menjadikan Allah sebagai pangkal dan tujuan hidupnya. Dengan dasar dan sikap batin seperti itu kehidupan manusia mempunyai makna dan nilai luhur sebagai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Integratif, yakni yang memadukan segenap aktifitas manusia baik sebagai orang seorang maupun sebagai anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan yang kadang-kadang astu sama lain kurang serasi. Keyakinan dan penghayatan keagamaan akan menghindarkan manusia dari situasi dan kepribadian yang retak. Dan dengan keutuhan kepribadian itulah manusia akan mampu menghadapi bermacam-macam tantangan dan resiko kehidupan yang tidak jarang memporak-porandakan kehidupan manusia.³⁸

Etos Kemasyarakatan

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya serta golongan. Terkait hubungan antar pemeluk agama, nenek moyang bangsa Indonesia mewariskan semangat toleransi, penuh kedamaian serta mengakui pluralisme keberagaman dan keesaan dalam

³⁸ Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1980), Jilid 4, p. 35. Lihat pula: H. Soeroyo, "H.A. Mukti Ali dan Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia" in Djam'annuri (ed.), *Agama dan Masyarakat*, pp. 101-102.

kebenaran sebagai bentuk *Tantularisme*.³⁹

Semangat *Tantularis* yang bercirikan religius, non doktriner, toleran, akomodatif dan optimistik, merupakan ciri khas budaya Nusantara yang kiranya masih relevan dengan situasi kemasyarakatan pluralis saat ini.⁴⁰ Tradisi itu menjadi akar historis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peluang lainnya bagi terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat beragama adalah Pancasila sebagai titik temu peradaban Indonesia, serta beragamnya budaya dan kearifan lokal sebagai penyangga budaya kerukunan.

Namun di sisi lain, heteroginitas dan pluralitas agama di Indonesia juga menyimpan potensi bagi munculnya konflik antar agama dan sesama pengikut umat beragama. Pada dasa warsa 70-an, terjadi ketegangan atau rasa saling curiga (*mutual distrust*) antara pemerintah dengan umat Islam dan antara umat Islam dengan umat beragama lain, terutama Kristen yang dianggap mendapat angin dari pemerintah. Konflik fisik antara kelompok muslim dan non-muslim terjadi walaupun disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi dan politik. Bahkan juga terjadi konflik intern dalam satu agama yang disebabkan hanya karena perbedaan aliran atau pandangan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurai dan menyelesaikan konflik tersebut dengan merumuskan

³⁹ I Wayan Suja, *Titik Temu Iptek dan Agama Hindu: Tafsir Ilmiah Ajaran Weda* (Jakarta: Manikgeni, 2000), p. 35.

⁴⁰ I Wayan Suja, "Perkembangan Agama Hindu di Indonesia" dalam Wiwin Siti Aminah (ed), *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama* (Yogyakarta: Dian Interfidei, 2003), p. 17.

serta menciptakan kerukunan umat beragama. Tantangan lain bagi langgengnya keharmonisan hubungan antar umat beragama adalah karakter agama yang berwajah ganda, adanya *thruth claim*, kompleksitas problem sosial, ekonomi dan politik, tingkat kesadaran beragama yang variatif, aktifitas dakwah dan misi yang berlebihan, mayoritas suara sebagai finalisasi masalah serta semakin berkurangnya implementasi spiritual di ranah sosial karena kuatnya arus individualistik.

Sebagaimana dimaklumi, kerukunan umat beragama adalah merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tenteram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai ajaran agama dan kepribadian Pancasila.⁴¹ Kerukunan antar agama menjadi sangat berarti dan besar nilainya serta didambakan oleh berbagai pihak ketika terjadi konflik atau kekerasan yang mengatasnamakan agama. Namun di saat tidak terjadi apa-apa atau aman-aman saja, kerukunan antar agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting bahkan cenderung dilupakan.

Sebagai sebuah bangsa multikultural yang besar, belum semua masyarakatnya menyadari bahwa di bawah

⁴¹ Mustoha et al. (eds.), *Bingkai Teologi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia Departemen Agama RI, 1997), p. 8 dan 20.

kepeloporan dan kegeniusan pikiran Mukti Ali, gagasan tentang kerukunan antar umat beragama yang terdiri dari dialog antar agama, prinsip *agree in disagreement* serta diperkuat dengan Ilmu Perbandingan Agama, menyebar dan dapat diterima secara luas oleh berbagai golongan masyarakat Indonesia.

Keberhasilan dalam mengemukakan dan mengembangkan pemikirannya tersebut tidak diperoleh dengan mudah namun melalui perjuangan yang tidak kenal lelah dan tanpa pamrih selama bertahun-tahun. “Bapak Kerukunan antar Agama” serta “Bapak Ilmu Perbandingan Agama” adalah julukan yang sangat tepat dan mengena sebagai penghormatan atas jasa dan kepeloporan Mukti Ali sekalipun dia sendiri menolak untuk dijuluki demikian.⁴²

Pada awalnya, kerukunan umat beragama pada masyarakat Indonesia relatif berjalan dengan baik dan rukun-rukun saja. Kondisi seperti ini menjadikan bangsa Indonesia dianggap sebagai barometer bangsa lain tentang kemajemukan beragama yang toleran dan hidup dalam perdamaian. Secara umum watak beragama bersifat moderat sehingga hubungan antar pemeluk agama lebih lentur dan mencair.

Budaya masyarakat yang *Tantularis*, menjadi fondasi sosial dalam kerukunan dan kedamaian. Dalam perkembangannya, pada era Orde Baru mulai muncul konflik, baik intern maupun antar umat beragama. Peran pemerintah dalam mengatur relasi kehidupan intern maupun antar umat beragama sangat dominan dengan

⁴² Nasrullah Ali Fauzi, “Abdul Mukti Ali”, p. 30.

berbagai kebijakan untuk meredam konflik secara “top down”.

Selanjutnya pada era reformasi saat ini, peran pemerintah semakin berkurang, sehingga keterbukaan semakin menguat. Konflik terbuka muncul di mana-mana yang disebabkan bukan karena masalah agama semata-mata tetapi disebabkan masalah yang lain. Untuk meredakan konflik tersebut, hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab segenap komponen bangsa.

Sekalipun demikian, Negara -dalam hal ini pemerintah- tidak boleh lalai dan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat namun justru harus berperan sebagai inisiator, regulator dan mediator terwujudnya kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Karena sebagaimana diketahui bahwa syarat bagi terlaksananya program pembangunan bangsa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat adalah jika masyarakatnya hidup dalam suasana yang rukun dan damai.

Menurut Mukti Ali, yang dimaksud dialog adalah pertemuan hati dan pikiran antar pemeluk berbagai agama. Dialog adalah komunikasi antara orang-orang yang percaya pada tingkat agama. Dialog merupakan jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama dalam proyek-proyek yang menyangkut kegiatan bersama. Ia merupakan perjumpaan antar pemeluk agama tanpa merasa rendah dan merasa tinggi, dan tanpa agenda atau tujuan yang dirahasiakan.

Dialog antar umat beragama adalah suatu perjumpaan yang sungguh bersahabat serta berdasarkan hormat dan cinta antar pemeluk agama.⁴³ Adapun tujuannya adalah agar diperoleh titik temu berbagai perbedaan yang selalu akan muncul dalam menghadapi kenyataan pluralitas agama.⁴⁴ Ketika menjabat sebagai Menteri Agama RI, ia menyelenggarakan serangkaian kegiatan dialog dalam rangka meredakan berbagai konflik agama serta menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Dia telah meletakkan dasar-dasar yang kuat serta konseptual bagi perlunya dialog antarumat beragama, karena melalui dialog dapat dipupuk, dibina dan dikembangkan pengertian dan kerjasama antarumat beragama dengan baik.

Agar dialog antar umat beragama berhasil dengan baik, dibutuhkan berbagai persyaratan di antaranya: seimbang, jujur, tidak melampaui batas pemikiran kritis, terbuka, suka menerima dan mendengarkan pendapat orang lain, tidak terlalu mementingkan diri sendiri, adil, suka menerima pendapat yang berbeda dengan pendapatnya sendiri serta adanya kemauan untuk bersama-sama mencari kebenaran.

Dalam dialog, seseorang tidak harus menyingkirkan keyakinannya sendiri namun justru harus berpegang pada ajarannya sendiri. Pada saat bersamaan dia mengakui bahwa pengikut agama lain juga berpegang pada keyakinannya

⁴³ Mukti Ali, "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Missi", *Makalah* disampaikan pada Seminar Indonesia – Belanda tentang Ilmu Perbandingan Agama di Yogyakarta tanggal 16 – 20 Juli 1990.

⁴⁴ Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), p. 245.

sendiri. Akibatnya akan muncul kesadaran untuk saling menghargai keyakinan dan nilai-nilai kebenaran agama lain.⁴⁵

Dalam rangka menciptakan kerukunan hidup antar-umat beragama, paling tidak terdapat lima pemikiran⁴⁶, yaitu:

1. *Sincretism* yaitu suatu anggapan bahwa pada dasarnya semua agama itu sama. Pendirian paham ini adalah bahwa semua agama dan tingkah laku manusia harus dipandang sebagai manifestasi, pancaran atau ungkapan dari substansi yang satu. Mukti Ali menolak pandangan ini karena tidak ada bedanya antara Khalik dan makhluk.
2. *Reconception* adalah usaha menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasinya dengan agama lain. Agama pada hakekatnya adalah pengalaman pribadi yang sesuai dengan kebutuhan universal manusia. Oleh karenanya perlu dibentuk 'agama universal' yaitu sebuah agama yang unsur-unsurnya diambil dari ajaran yang baik dari berbagai agama dalam rangka memenuhi kebutuhan seluruh manusia dan bangsa. Konsep kedua ini juga ditolak Mukti Ali karena menjadikan agama sebagai hasil pemikiran manusia, padahal agama adalah wahyu yang membimbing akal manusia.
3. *Synthese* adalah usaha menciptakan 'agama baru' yang merupakan perpaduan dari unsur-unsur berbagai

⁴⁵ Mukti Ali, "Pidato Penutupan Sidang Promosi untuk mencapai Gelar Doktor bagi Saudara Doktor Djam'annuri" IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 Juni 1996.

⁴⁶ Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan.....*, p. 224 – 228.

agama. Setiap pemeluk agama akan merasa terwakili dalam agama sintesis itu. Mukti Ali menolak konsep ini karena setiap agama terbentuk dan terikat oleh sejarahnya sendiri-sendiri sehingga tidak bisa begitu saja disatukan.

4. Penggantian adalah anggapan bahwa agama yang dipeluk seseorang yang benar sedangkan agama lain salah. Oleh karenanya seseorang tidak rela memeluk agama yang lain dan harus diganti dengan agama yang sesuai dengan agamanya. Konsep ini dapat menimbulkan intoleransi agama sehingga harus ditolak.
5. *Agree in disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan atau setuju dalam perbedaan)⁴⁷ yaitu konsep yang ditawarkan Mukti Ali dan sesuai dengan kondisi Indonesia yang pluralistik. Setiap orang yang beragama yakin dengan kebaikan dan kebenaran agama yang dipeluknya. Setiap agama memang berbeda dengan agama yang lain namun di samping itu juga terdapat persamaan-persamaan sehingga akan menimbulkan minat untuk saling berdialog. Berdasarkan pemahaman ini, akan muncul sikap saling menghormati dan akan tercipta kerukunan hidup antarumat beragama. Sikap seperti ini sangat Qur'anik dan bernuansa pluralistik.⁴⁸ Sikap seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang berkecimpung dalam Ilmu Perbandingan Agama karena akan memunculkan usaha untuk dialog yang didasarkan atas saling menghormati dan toleransi

⁴⁷ Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama*, p. 8.

⁴⁸ M. Amin Abdullah, "Islam Indonesia lebih Pluralistik", p. 73.

antar pemeluk agama.⁴⁹

Prinsip “setuju dalam perbedaan” ini memiliki dampak positif dan menjadi *platform* bagi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari semakin tumbuhnya pengertian dan pemahaman tentang perlunya saling mengakui hak hidup umat beragama lain serta kesediaan untuk hidup berdampingan dengan mereka di Indonesia.

Dengan pengetahuan tentang agama lain seseorang akan lebih terbuka serta lebih toleran terhadap perbedaan agama sehingga akan tercipta kerukunan intern maupun antar umat beragama. Dari sini, nampak jelas bahwa posisi Ilmu Perbandingan Agama merupakan sarana akademik dalam rangka terwujudnya kerukunan antarumat beragama.

Perbandingan Agama yang dimaksud Mukti Ali sesungguhnya bukan hanya dalam arti sempit yaitu membanding-bandingkan antara satu agama dengan yang lain semata-mata namun dalam arti luas yaitu bagaimana memahami agama secara utuh atau menyeluruh sesuai karakter agama itu sendiri. Agama yang dimaksudnya sudah tentu bukan hanya satu agama tertentu, melainkan agama-agama yang hidup dan berkembang di dunia, khususnya di Indonesia.

Dapat disimpulkan, Mukti Ali berhasil mengembangkan model pemahaman keagamaan yang bersifat integral

⁴⁹ Herman L. Beck, “A Pillar of Social Harmony” dalam Gerard A. Wiegers & Jan G. Platvoet (eds.), *Modern Societies & The Science of Religions* (Leiden: NV. Koninklijke Brill, 2002), p. 336.

dan kontekstual sebagai upaya memfungsikan agama seiring dengan realitas kehidupan. Dia memposisikan agama bukan sebagai sesuatu yang sudah final dan alat untuk tujuan tertentu melainkan sebagai proses pencarian kreatif dalam rangka menemukan tujuan hidup yang sejahtera sesuai nilai-nilai luhur agama.

Sikap itu mendorong tumbuhnya sikap kritisisme dan sensitifitas terhadap agama serta dinamika keberagamaan yang progresif. Efek positifnya adalah terciptanya pemahaman agama secara proporsional, obyektif dan terbuka sehingga dapat menumbuhkan toleransi beragama serta meminimalisir kecurigaan yang bisa memicu konflik antar umat beragama.

Pola pemikiran keagamaan yang integral dan kontekstual yang dimaksud, pada prinsipnya terbangun atas tiga poros utama yaitu keilmuan, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dalam bidang keilmuan, ia mempertemukan secara dialektis, kreatif dan eksistensial antara teks dengan konteks atau antara agama yang normatif dengan kenyataan hidup yang kontekstual. Untuk itu, ia mengembangkan metodologi baru yang bersifat sintesis antara ilmiah dan agamis yang disebutnya *scientific-cum-doctriner*.

Metodologi *scientific-cum-doctriner* diaplikasikan dalam Ilmu Perbandingan Agama dan program intelektualisasi pendidikan di Indonesia. Dalam bidang kemanusiaan, dengan mengacu fungsi agama sebagai faktor motivatif, kreatif, sublimatif dan integratif bagi hidup manusia nampak kepedulian pada makna agama

bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia. Di samping itu, masuknya agama sebagai asas pembangunan nasional dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) serta “pembangunan manusia seutuhnya” tidak bisa dilepaskan dari kiprah dan perjuangannya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, ia mengembangkan prinsip “*agree in disagreement*” serta serangkaian program dialog antar umat beragama untuk menciptakan toleransi dan kerukunan hidup umat beragama.

Akhirnya, PTKI sebagai institusi pendidikan tinggi Islam perlu mengoptimalkan perannya untuk mentransformasikan pemikiran Mukti Ali yang dikenal sebagai penggagas kerukunan umat beragama di Indonesia dalam program pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan bangsa. PTKI hendaknya mampu merancang program yang terinspirasi dari basis keilmuan, kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan toleransi terhadap perbedaan agama serta menghilangkan kecurigaan antar anggota masyarakat. Dengan demikian, kontribusi konkrit PTKI bagi kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin jelas dan nyata dalam rangka mendorong sekaligus merawat pluralitas yang dinamis untuk “Peradaban Indonesia Emas”.

KERJA SAMA, KERJA CITRA

(Upaya Meningkatkan Citra PTKI di Indonesia)

Siswanto Masruri

Pendahuluan

Jembatan adalah urat nadi masyarakat yang dinamis, yang mampu melahirkan kemampuan untuk menyeberangi tebing-tebing paling curam dan sungai-sungai paling lebar. Banyak cara telah dipakai untuk membentangkan baja guna membangun prasarana bagi masyarakat di mana perbedaan dan kepentingan merupakan bagian dari lalu lintas sebuah masyarakat yang demokratis, kreatif, dinamis, dan transformatif. Transformasi beberapa PTKI di Indonesia merupakan tantangan bersama sivitas akademika menuju PTKI yang unggul dan terkemuka. Tanpa 'jembatan dan lalu lintas' kerja sama, sivitas akademika PTKI akan membiarkan diri terkotak-kotak dan terpinggirkan sebagai kantong-kantong *statisme*, *apatisme*, bahkan *fundamentalisme* yang berbahaya karena berjalan sendiri dan merasa benar sendiri. Mereka akan berdiri pasif di luar arena proses perubahan dan pergantian wawasan. Oleh karena itu, mereka

harus mampu menjadi subjek peradaban yang akan muncul melalui jembatan kerja sama, yang dijalin dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

Dewasa ini, secara empiris, kerja sama keilmuan telah dibangun dan diwujudkan oleh para akademisi beberapa Perguruan Tinggi. Para akademisi Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran misalnya, saat ini sedang menjalin kerja sama membuat sebuah peralatan yang hanya dapat dibuat oleh akademisi Fakultas Teknik dan hanya dibutuhkan oleh Fakultas Kedokteran. Seorang ilmuwan Amerika Serikat baru-baru ini juga telah menemukan *Partikel Organik Buatan Terkecil Berskala Nano Meter* yang sangat berguna bagi pengembangan teknologi dan kedokteran. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, Barbara Ward pernah berkata: "Kita harus belajar mencintai satu sama lain dan bekerjasama, atau kita semua akan lenyap".

Mark Olssen, John Codd dan Anne-Marie O'Neill dalam karyanya berjudul, *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy* (London: Sage Publications, 2004, 1) juga pernah menyatakan bahwa,

"Education policy in the twenty-first century is the key to global security, sustainability, and survival. The era of globalization brings urgency to the need for a new world order in which nation-states can develop policies that will contribute to and sustain forms of international governance. We argue that education policies are central to such a global mission".

Pernyataan ketiga ahli pendidikan di atas menegaskan bahwa kebijakan pendidikan pada abad ini merupakan kunci dari ketahanan, keberlanjutan, dan kehidupan global yang sangat kompetitif. Pada era globalisasi, di mana jarak

antara negara yang satu dengan yang lainnya semakin dekat, maka, kebijakan apa pun akan menjadi sangat sentral. Dengan demikian, persaingan global bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi diharapkan dapat diantisipasi oleh para praktisi yang berani mengembangkan kebijakan strategis. Kebijakan dimaksud sebaiknya berorientasi pada pembentukan dan lahirnya mahasiswa yang ahli ibadah (*science for ibadah*), humanis (*science for humanism*), ahli ilmu (*science for science*), dan ahli *sadaqah* (*science for making money, for entrepreneurship*). Dengan orientasi demikian, maka, setiap mahasiswa PTKI akan selalu termotivasi untuk dua kepentingan kongkret: dunia dan akherat.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat beragam dan pluralistik dalam tingkat perkembangan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, kekayaan sumber daya alam, dan sosial budayanya. Pendekatan yang terlalu sentralistik tidak akan mampu mengakomodasi keragaman tersebut. Oleh karena itu, desentralisasi otoritas dan pemberian otonomi yang lebih luas kepada institusi (atau unit) apa saja, termasuk institusi pendidikan tinggi, merupakan pilihan yang paling tepat. Hanya dengan pemberian otonomi yang lebih luaslah setiap institusi akan mampu mengembangkan diri sesuai dengan konteksnya dan berkontribusi untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui kerja sama.

Dunia sekarang sedang menghadapi tantangan berat yang merupakan konvergensi dari berbagai dampak globalisasi. Berbagai masalah hanya dapat diatasi dengan solusi yang berbasis pada pengetahuan (*knowledge based*

solution). Kemampuan bersaing mengatasi berbagai masalah tersebut akan memberikan keuntungan bagi pemenangnya. Daya saing suatu bangsa adalah *a country's share of world markets for its products*, yang tidak bergantung lagi pada kekayaan sumber daya alam dan tenaga kerja murah, akan tetapi pada pengetahuan yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu bangsa. Pengetahuan tersebut dapat memfasilitasi suatu bangsa dalam memanfaatkan dan memproses sumber daya alam sebelum dilemparkan ke pasar global. Sumber daya manusia yang tersedia akan dapat mendukung pertumbuhan bila disertai dengan penguasaan pengetahuan yang memadai. Tanpa penguasaan pengetahuan yang memadai, penduduk yang besar hanya akan menjadi beban bangsa.

Hampir semua warga dunia memerlukan upaya perluasan konsensus internasional di atas mana kerangka kerja dan etika bersama dapat dibangun. Konsensus yang lebih luas tentu menuntut perjanjian dan pencarian nilai-nilai bersama yang paling mulia, yang biasanya ditarik dari tradisi keagamaan, moral, hukum, ekonomi, dan filsafat. Gagasan mengenai solidaritas manusia dan globalisasi mengimplikasikan suatu perubahan perspektif yang menyerupai *Revolusi Kopernikan* dari pandangan yang berkisar pada negara-bangsa ke suatu pandangan di mana sistem negara berpusat pada kesamaan kepentingan dengan kesejahteraan material, intelektual, dan spiritual, sebagai sasaran utamanya.

Saat ini, kaum kaya di Jeddah, Washington, Montreal, Hongkong, Singapore, dan Jakarta mempunyai

persamaan yang jauh lebih besar dengan kaum kaya di Chicago, Baghdad, Canberra, Leiden, Paris, dan Yogyakarta daripada dengan kaum miskin di negeri mereka sendiri. Orang-orang yang makmur juga semakin mudah untuk saling berkomunikasi dan menembus batas-batas nasional daripada dengan kaum miskin sebangsa di negaranya. Orientasi dasar ke arah kepentingan dan kesejahteraan umat manusia menuntut agar apa pun yang menjauhkan mereka dari kesejahteraan harus dipertanyakan tanpa memandang akibatnya bagi pertumbuhan pendidikan, ekonomi, politik, stabilitas, dan keteraturan tertentu.

World Trade Organization (WTO) yang bersidang pada akhir Desember 2005 telah membicarakan rencana *liberalisasi pendidikan*. Sebagaimana diketahui, klasifikasi penyediaan jasa bidang pendidikan tinggi dalam lingkup *General Agreement on Trade, Tarrifs, and Services* (GATTS) di WTO meliputi: (1) *cross border supply*: jarak jauh, internet, *on line*, *degree program*; (2) *consumption abroad*: belajar di luar negeri; (3) *commercial presence*: ***partnership***, *subsidiary*, *twinning arrangement* dengan perguruan tinggi lokal; (4) *presence of natural*: tenaga-tenaga pengajar asing di perguruan tinggi lokal. Penandatanganan perjanjian dan klasifikasi penyediaan jasa (pendidikan) memiliki konsekuensi bahwa mulai tahun 2006, berbagai lembaga pendidikan asing, sebenarnya telah diperbolehkan masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Perjanjian itu meliputi 4 (empat) sektor jasa: (1) profesional; (2) energi; (3) kesehatan; dan (4) pendidikan.

Sementara itu, angka partisipasi masyarakat Indonesia bidang pendidikan tinggi tahun 2004 (ketika itu) baru

mencapai 14 persen, jauh di bawah Malaysia dan Philipina yang telah mencapai 38 s.d. 40 persen. Kemampuan keuangan Pemerintah Indonesia diakui masih sangat terbatas sehingga partisipasi, ekspansi, dan peningkatan mutu pendidikan tingginya tidak dapat hanya dengan mengandalkan sumber dana domestik. Partisipasi, ekspansi, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi tampaknya hanya mungkin dilakukan bila pelayanannya oleh *provider* luar negeri dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin - melalui kerja sama dan sesuai ketentuan yang berlaku - oleh Negara-negara Sedang Berkembang termasuk Indonesia.

Dengan semangat globalisasi dan liberalisasi seperti yang diinginkan *GATTs*, Indonesia, baik menerima maupun menolak perjanjian tersebut, pasti akan terpengaruh meski tidak harus dirugikan. Institusi pendidikan asing yang boleh masuk ke Indonesia hanyalah perguruan tinggi yang mau bermitra dengan lembaga-lembaga pendidikan lokal. Lembaga-lembaga pendidikan Indonesia, khususnya PTKI, mulai sekarang mestinya sudah harus bekerja lebih keras dengan melakukan reorientasi pendidikan, reformasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi keilmuan dan kelembagaan, dekonstruksi, rekonstruksi, dan redesain kurikulum (*knowledge based on economy*, HAM, anti korupsi, pluralisme, multikulturalisme, demokratisasi, dan lain sebagainya), serta peningkatan kualitas manajemen.

Dari sisi kemitraan ini diharapkan muncul kerja sama akademik (bukan politik) yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sivitas akademika PTKI. Dengan kerja sama demikian, sivitas akademika PTKI diharapkan

mendapatkan keuntungan dalam belajar dan bekerja serta mampu bersaing secara akademis mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan kehidupan umat dan kemanusiaan secara umum.

Transformasi beberapa PTKI sesungguhnya telah memiliki implikasi sosial yang luar biasa. Sekarang ini, hampir semua PTKI telah menjadi bagian dari institusi sosial lain, yang bertanggungjawab dalam perubahan sosial, politik, budaya, dan agama di tanah air. Jika sebelumnya tanggung jawab itu lebih menitikberatkan pada bidang keagamaan, maka, sekarang ini, tanggung jawab yang diemban lebih luas. PTKI sekarang menjadi bagian dari institusi sosial yang ikut membentuk *civil society*, dan oleh karena itu harus menyiapkan diri terlibat dalam *war of position*.

Dalam *war of position*, PTKI harus secara cerdas dan strategis memposisikan dirinya dalam perubahan sosial. Institusi ini harus menjadi partisipan aktif dalam rekayasa perubahan sosial, kecuali, jika kita ingin PTKI hanya menjadi penonton pasif dan bertindak sebagai obyek dalam perubahan tersebut. Dalam *war of position*, yang diperlukan adalah komunikasi, koordinasi, profesionalisasi, **aliansi, dan kerja sama** secara intens dengan insitusi-institusi sosial lain untuk memperkuat *civil society* dan memperluas kemungkinan-kemungkinan dikembangkannya *democratic public spheres*.

Saat ini harus diakui bahwa beberapa PTKI, dalam konteks global, masih relatif "*invisible*". Beberapa PTKI, misalnya, meskipun sudah masuk SNMPTN, tetapi ternyata belum masuk dalam daftar 10 perguruan tinggi terbaik di

tanah air, apalagi untuk tingkat global. Ini adalah salah satu indikasi bahwa PTKI masih relatif "*invisible*". Untuk itu, tugas beberapa PTKI adalah bagaimana membuat mereka yang masih relatif "*invisible*" itu menjadi lebih "*visible*" melalui **pencitraan (akademik, dll)** sehingga istilah *center of excellence* tidak hanya sekedar slogan, tetapi juga kenyataan meski melalui proses yang rumit dan panjang. Agar PTKI menjadi lebih *visible* sesungguhnya merupakan amanat yang diemban oleh setiap perguruan tinggi, yaitu melaksanakan **Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)**.

Sebenarnya, Tri Dharma ini perlu dikaji-ulang dan dievaluasi misalnya dengan menambah dua dharma di depannya seperti: **penguatan karakter, telaah perpustakaan** sehingga menjadi **Panca Dharma Perguruan Tinggi**. Keseluruhan amanat tersebut akan sulit direalisasikan jika PTKI dan pimpinannya hanya berjalan sendirian karena keterbatasan pengalaman, sumber daya manusia, fasilitas, dana, kemampuan manajerial, dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah institusi akademik, PTKI tidak mungkin berjalan sendiri. Sekarang ini, tidak ada institusi akademik yang dapat berjalan dengan baik dan dinamis tanpa berhubungan dan bekerjasama dengan institusi-institusi akademik dan sosial yang lain. **Dinamika keilmuan dan institusional sebuah institusi akademik tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana ia mampu melakukan pembenahan internal, tetapi juga sejauh mana ia mampu berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan institusi-institusi akademik dan sosial yang lain.** Relasi

sosial yang dibangun oleh sebuah institusi akademik akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga dan masa depan institusi tersebut.

Semakin banyak relasi sosial yang dibangun, akan semakin luas kesempatan dan peluang yang bisa didapat oleh institusi tersebut untuk berkembang. Paling tidak, ada 3 (tiga) manfaat yang dapat diambil dari upaya-upaya peningkatan kerja sama: (1) PTKI akan memiliki *networking* yang lebih banyak dan mendapat masukan-masukan (material dan intelektual) yang berguna dalam pengembangan akademik, keilmuan, dan riset; (2) PTKI akan mendapat masukan-masukan dalam melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan institusi sehingga ia dapat berkembang menjadi *center of excellence* tanpa harus banyak menyandarkan diri pada SPP mahasiswa. Harus disadari bahwa mayoritas mahasiswa yang belajar di PTKI berasal dari *middle-lower class families*; (3) Kerja sama juga dapat bermanfaat untuk mengukur sejauh mana kemampuan institusi PTKI ini dalam pengembangan akademik dan manajerial dibanding dengan institusi yang lain.

PTKI hingga saat ini diakui belum begitu serius melihat pentingnya pengembangan dan peningkatan kerja sama. Hal ini terbukti dengan "tidak" adanya legalitas formal dari pemerintah terkait eksistensi kerja sama. Selain itu, bidang akademik, administrasi umum, dan kemahasiswaan dianggap sebagai yang lebih penting padahal semuanya berorientasi pada keunggulan akademik sebuah perguruan tinggi yang dibangun berdasarkan kemitraan dengan berbagai lembaga.

Hingga hari ini, salah satu masalah yang membuat PTKI kurang bisa secara leluasa dan dinamis bergerak di bidang kerja sama adalah tiadanya "lembaga khusus" (kecuali UIN Syarif Hidayatiullah Jakarta?) yang menangani masalah ini. Padahal, bidang ini merupakan ujung tombak PTKI dalam "membangun citra" akademik dan membuat relasi dengan institusi lain. Jika PTKI tidak secara serius memecahkan masalah ini, maka, bisa jadi PTKI akan tertatih-tatih dalam perjalanan ke depannya. PTKI hanya akan menjadi perguruan tinggi yang besar dan disegani jika institusi ini mulai progresif dalam pencitraan akademik dan dalam menjalin kerja sama dengan institusi akademik dan sosial yang lain.

Kilas Sejarah PTKI

Di Indonesia, pendidikan agama (Islam) telah berlangsung lama. Berbagai sumber sejarah melukiskan bahwa tradisi pendidikan agama merupakan fenomena eksistensial dari kemunculan dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Proses **Islamisasi** dan **saintifikasi** selalu diikuti dengan kemunculan komunitas-komunitas baru - yang dalam pandangan Denys Lombard seperti dikutip *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* dikatakan sebagai "masyarakat baru yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam" - dan kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam. Di sini, nilai-nilai Islam mengalami proses pelembagaan dalam kehidupan masyarakat Nusantara.

Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan agama meletakkan fungsi penting, tidak

sekedar dalam kerangka keislaman dalam arti sempit - misalnya pengamalan ibadah *mahdhah* - namun juga dalam kerangka fungsi keumatan dan kebangsaan secara lebih luas. Lebih dari itu, telah berkembang menjadi lembaga pengembangan sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pendidikan agama (Islam) telah mengalami perkembangan pesat. Dalam hitungan kuantitatif, memang agak sulit ditemukan angka pasti jumlah institusi pendidikan agama (Islam). Namun, dapat dipastikan bahwa pendidikan agama (Islam) pada saat ini masih memiliki banyak permasalahan dan kendala yang tersebar di hampir seluruh pelosok tanah air.

Secara intelektual, para *founding fathers* dan pelaku pendidikan agama telah mencurahkan tenaga dan pikiran mereka untuk mengatasi berbagai masalah, khususnya dalam bidang pendidikan (Islam). Secara kelembagaan, mula-mula mereka mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang *indigenous* Islam Indonesia dan lembaga pendidikan model sekolah (Barat). Tidak puas dengan kedua lembaga tersebut, mereka mendirikan lembaga pendidikan model madrasah. Lembaga pendidikan model terakhir ini sesungguhnya dibentuk untuk mengatasi persoalan **dikotomi keilmuan**. Setelah periode dikotomi berlalu (untuk sebagian), kini kita memasuki periode **integrasi-interkoneksi, kebersamaan, dan persatuan**. Oleh karena itu, maka pertanyaannya adalah "Apakah kita akan berhenti pada periode ini tanpa memikirkan periode yang lebih fokus yakni periode "**core keilmuan**" PTAIN yang secara fenomenal telah dirintis sejak berdirinya Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

Perguruan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia

Ide mendirikan perguruan tinggi Islam merupakan salah satu mata rantai sejarah perjuangan umat Islam Indonesia sejak awal abad XX. Ide itu dimulai dari kesadaran kolektif umat Islam di tanah air yang muncul pada perempat pertama abad XX yang mengukuhkan pentingnya perbaikan pendidikan Islam. Wujud kongkret dari kesadaran itu tampak pada pembaharuan sistem pendidikan Islam yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam pada masa itu seperti Jam'iyat al-Khair (1905) di Jakarta, Syarekat Islam (1912) di Solo, Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, Al-Irsyad (1915) di Jakarta, Persatuan Umat Islam (1917) di Majalengka, Persis (1923) di Bandung, dan Nahdlatul Ulama (1926) di Surabaya. Meskipun tidak seragam dalam menerapkan pembaharuan, organisasi-organisasi Islam tersebut secara umum memperkenalkan sistem pendidikan yang baru di lingkungan masing-masing.

Pembaharuan atau modernisasi pendidikan Islam pada saat itu dapat dilihat dalam empat level. *Pertama*, level kelembagaan yaitu pembaharuan atau perubahan kelembagaan pendidikan Islam, baik dalam bentuk transformasi dari lembaga yang sudah ada maupun pendirian lembaga pendidikan Islam yang baru. *Kedua*, substansi isi (*content*) kurikulumnya yaitu dari pengajaran ilmu-ilmu agama bergeser dengan memperkenalkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan Islam. *Ketiga*, aspek metodologis, yaitu perubahan metodologi pengajaran yang selama itu diterapkan di lingkungan lembaga pendidikan Islam yang dianggap kurang relevan. *Keempat*; dari segi

fungsi, yakni secara tradisional, fungsi pendidikan Islam meliputi transfer ilmu-ilmu keislaman (*transfer of Islamic knowledge*), memelihara tradisi Islam (*maintenance of Islamic traditions*), dan melahirkan ulama (*reproduction of ulama*), dengan pembaharuan dalam tubuh lembaga pendidikan Islam.

Pembaharuan pendidikan Islam yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi Islam di atas memberikan semangat umat Islam untuk mengusahakan berdirinya lembaga **pendidikan tinggi** yang bercorak keagamaan. Gagasan ini semakin kuat karena sampai tahun 1930-an telah berdiri 3 (tiga) lembaga pendidikan tinggi milik Pemerintah Belanda, yaitu *Technische Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Teknik) - kini menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB) - yang berdiri di Bandung pada tahun 1920, *Rechts Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) yang berdiri di Jakarta pada tahun 1924, dan *Geneeskundige Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Kedokteran) yang berdiri di Jakarta pada tahun 1927.

Lembaga-lembaga tersebut didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka Politik Etis di mana hanya anak-anak elit priyayi saja yang mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalamnya. Kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi tersebut bagi rakyat Indonesia umumnya amat kecil, apalagi bagi umat Islam. Dengan kenyataan ini dapat dipahami jika umat Islam berhasrat untuk dapat mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang akan menampung anak-anak kaum muslim dari sekolah rendah dan menjadi ajang mobilitas bagi mereka.

Tujuannya tidak hanya untuk menampung calon-calon mahasiswa dari kalangan pribumi muslim melainkan juga untuk menegaskan corak keislaman yang membedakannya dari corak pendidikan kolonial yang 'netral' terhadap pendidikan agama.

Sejak tahun 1930-an, gagasan mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam semakin santer dibicarakan. Pada tahun 1938, Dr. Satiman Wirjosandjojo melalui majalah *Pedoman Masyarakat* Nomor 15 Tahun IV mencetuskan ide untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (Pesantren Luhur) sebagai tempat mendidik muballigh yang cakap dan berpengetahuan luas. Ide ini disusul dengan pemberitaan majalah AID Nomor 128 Tanggal 12 Mei 1938 yang memberitakan telah diadakannya permusyawaratan antara 3 (tiga) Badan Pendiri Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, Solo, dan Surabaya. Pada bulan Juli 1938, M. Natsir menulis artikel yang dipublikasikan dalam *Pandji Islam* berjudul **"Menuju Koordinasi Perguruan-perguruan Islam"**, ditulis sebagai tanggapan terhadap gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam. Menurutnya, perlu koordinasi antara perguruan-perguruan Islam tingkat menengah dan perguruan tinggi yang akan didirikan guna menyatukan visi dan misinya.

Sampai akhir masa penjajahan Belanda, ide pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut belum benar-benar bisa terealisasikan. Di Solo, sempat berdiri *Islamische Medelbare School (IMS)*, namun perguruan itu hanya dapat hidup sampai tahun 1941 dan bubar (ditutup) karena pecahnya Perang Dunia II. Di luar Jawa, di Padang,

pada tahun 1940 juga berdiri Sekolah Islam Tinggi yang diprakarsai oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI), akan tetapi nasibnya sama dengan yang di Solo. Ketika tentara Jepang menguasai kota Padang, Sekolah Islam Tinggi dibubarkan karena tidak diijinkan oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya ide untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam ini akhirnya menjadi agenda pembicaraan dalam forum Kongres Al-Islam II Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1939, yang dihadiri oleh 25 organisasi Islam.

Pada Tanggal 29 Januari 1943, para pemimpin MIAI mengadakan pertemuan yang menghasilkan 3 (tiga) program, yaitu: (1) membangun sebuah Masjid Agung sebagai simbol bagi umat Islam Indonesia; (2) mendirikan sebuah universitas Islam, dan (3) membangun sebuah kantor perbendaharaan Islam pusat (*Bait al-Mal*) untuk menerima zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendirian universitas Islam yang telah dicoba realisasikan oleh organisasi-organisasi Islam pada akhir masa pemerintahan Belanda, hanya menjadi janji yang sering dikemukakan oleh Jepang kepada umat Islam sejak minggu-minggu pertama pendudukan Jepang di Jawa, namun kenyataannya selalu diulur-ulur. Tuntutan MIAI tidak pernah berhasil sampai organisasi ini dibubarkan pada Tanggal 24 Oktober 1943. Baru nanti beberapa minggu sebelum penyerahan Jepang, sebuah universitas Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam berhasil didirikan atas usaha Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), organisasi federasi Islam baru yang dibentuk oleh Jepang sebagai pengganti MIAI.

Sekolah Tinggi Islam (STI)

Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia bermula pada awal tahun 1945 ketika Masyumi memutuskan mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Keputusan Masyumi ini merupakan kelanjutan dari usaha-usaha yang telah dicoba MIAI sejak awal tahun 1943. Berbeda dengan MIAI yang mendapatkan tekanan dari Jepang, Masyumi lebih beruntung memiliki kedekatan dengan Jepang. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pada April 1945, Masyumi menyelenggarakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri organisasi-organisasi Islam yang berfederasi (anggota Masyumi), kalangan intelektual, dan ulama serta unsur pemerintah (dalam hal ini *Shumubu* yang menjalankan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan Islam).

Permusyawaratan tokoh-tokoh Islam yang disponsori Masyumi pada bulan April tersebut berhasil mengambil langkah maju untuk mewujudkan rencana pendirian STI, yaitu dengan dibentuknya Panitia Perencana STI di bawah pimpinan Moh. Hatta. Panitia inilah yang mengerjakan rencana pelaksanaannya, seperti menyusun Peraturan Umum, Peraturan Rumah Tangga, Susunan Badan Wakaf, Dewan Pengurus, dan Senat STI. Untuk Dewan Pengurus/Kuratornya, Moh Hatta ditunjuk sebagai Ketua dengan M. Natsir sebagai Sekretarisnya, dan A. Kahar Muzakkir sebagai Rektor *Magnificus* dengan anggota-anggotanya: Mas Mansur, Dr. Slamet Imam Santoso, Moh. Yamin, Kasman Singodimedjo, Mr. Soenarjo, dan Zain Djambek.

Akhirnya STI ini dapat dibuka secara resmi pada Tanggal 27 Rajab 1364 di saat Peringatan Isra' Mi'raj

Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan Tanggal 8 Juli 1945. Upacara peresmiannya diselenggarakan di gedung Kantor Imigrasi Gondangdia Jakarta. Pada awalnya, STI didirikan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada "orang-orang yang telah mempelajari Islam secara meluas dan mendalam, dan telah memperoleh standar pengetahuan umum yang memadai seperti dituntut oleh masyarakat dewasa ini". Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian STI yang pada dasarnya merupakan kebutuhan umat Islam Indonesia akan adanya "Perguruan Tinggi yang memberikan pelajaran dan pendidikan tinggi tentang ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu kemasyarakatan agar menjadi penyiar agama dan memberikan pengaruh Islam di Indonesia".

Menilik tujuan STI, jelas bahwa para pemrakarsanya yang terdiri dari tokoh-tokoh pembaharu, politisi, ulama, dan intelektual muslim, berupaya mencari bentuk perpaduan (integrasi-interkoneksi) pendidikan yang kelak diharapkan dapat melahirkan ulama' yang pakar dalam dua bidang sekaligus, mempelajari Islam secara meluas dan mendalam dan juga memiliki kualifikasi ilmu-ilmu "sekuler" yang memadai. Berdirinya STI merupakan penjelmaan dari pikiran jernih dan pandangan yang jauh ke depan dari pemimpin-pemimpin Indonesia tentang corak perguruan Islam yang harus ada.

Empat puluh hari setelah STI dibuka secara resmi, terjadilah peristiwa yang maha penting bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI pada Tanggal 17 Agustus 1945. Keterlibatan tokoh-tokoh pendiri STI

dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (dalam BPUPKI) telah menjadikan mereka sebagai *the founding fathers* bagi republik ini. Para pendiri STI banyak yang menjadi pemimpin republik yang baru lahir ini, misalnya sebagai Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri.

Beberapa bulan setelah kemerdekaan, pasukan Sekutu (NICA) datang ke Indonesia dengan membawa kepentingan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia, menggantikan Jepang. Terjadilah bentrokan senjata antara pasukan sekutu dengan rakyat Indonesia. Gedung-gedung di Jakarta dapat dikuasai oleh Sekutu dan situasi kota Jakarta menjadi tidak aman. Situasi inilah yang akhirnya memaksa Pemerintah Negara RI mengambil langkah untuk hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Hijrahnya Pemerintah RI ke Yogyakarta - Ibu Kota RI kedua sangat mempengaruhi kelangsungan STI, karena suasana perang di Jakarta tidak menjamin kelancaran perkuliahan, di samping banyak sekali dosen-dosen dan pengurus STI yang ikut pindah ke Yogyakarta sebagai pejabat tinggi negara. Satu-satunya jalan, untuk sementara, STI di Jakarta ditutup dan ikut hijrah ke Yogyakarta.

Pada Tanggal 10 April 1946, STI dibuka kembali di Yogyakarta dengan dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta (yang juga menjadi Ketua Dewan Pengurus STI) serta pejabat-pejabat tinggi negara lainnya, baik sipil maupun militer. Upacara pembukaan berlangsung di Ndalem Pengulon Yogyakarta yang diisi antara lain dengan penyampaian 2 (dua) pidato, yaitu Pidato Pembukaan STI berjudul "Sifat Sekolah Tinggi

Islam” oleh Mohammad Hatta dan Kuliah Umum tentang “Ilmu Tauhid” yang disampaikan oleh K.H.R. Hadjid. Kahar Muzakir tetap menjadi Rektor meskipun terjadi perubahan pada kelengkapan anggota Senat STI.

Mohammad Hatta, dalam pidatonya yang biasa disebut sebagai “Memorandum Hatta” menyebutkan antara lain:

“Demikianlah, dalam lingkungan STI bisa diselenggarakan pengajaran agama yang berdasarkan pengetahuan tentang Filsafat, Sejarah, dan Sosiologi. Agama dan Filsafat memperluas kepercayaan dan memperhalus perasaan agama. Agama dan Sejarah memperluas pandangan agama. Agama dan Sosiologi mempertajam pandangan agama ke dalam masyarakat yang hendak dipimpin. Dengan keterangan tersebut nyatalah bahwa wujud STI ialah membentuk ulama yang berpengetahuan mendalam dan berpendidikan luas serta mempunyai semangat yang dinamis. Hanya ulama yang seperti itulah yang bisa menjadi pendidik yang sebenarnya dalam masyarakat. Di STI itu akan bertemu agama dengan ilmu dalam suasana kerja sama untuk membimbing masyarakat ke dalam kesejahteraan”.

Mengacu pada Memorandum Hatta tersebut dapat diketahui ke mana arah pengembangan ilmu yang hendak dicapai STI lewat rencana pelajarannya. Bisa dikatakan bahwa *basic philosophy* pengembangan ilmunya adalah integralistik, tidak dikotomis antara ilmu agama dan umum. Dengan demikian dikotomi keilmuan antara agama dan umum sebenarnya telah selesai saat STI berdiri yang dengan paradigma tersebut lalu mengarah pada pendirian sebuah Universitas Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, di kalangan para tokoh muslim timbul pemikiran untuk meningkatkan efektivitas dan fungsi STI yang kemudian melahirkan kesepakatan untuk **mengubah STI** menjadi **universitas**. Pada bulan Nopember 1947 dibentuk panitia perbaikan STI dan dalam sidangnya pada bulan Pebruari 1948, mereka sepakat untuk mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Peresmian UII dilaksanakan tanggal 27 Rajab 1367 (10 Maret 1948) di Ndalem Kepatihan Yogyakarta bersamaan dengan Dies Natalis STI ke-3.

Pada saat Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, UII terpaksa ditutup untuk sementara. Para mahasiswa, pengurus, bahkan guru besarnya ikut bergabung dalam perang melawan agresi Belanda. Dalam suasana perang, fungsionaris UII, terutama A. Kahar Muzakkir sempat mengadakan upacara Dies Natalis UII IV, bertepatan dengan Tanggal 27 Rajab 1368 (April 1949). Upacara itu tidak dilaksanakan di Kampus, melainkan jauh dari kota, di Desa Tegalayang, Srandakan, Bantul. Para pembesar sipil dan militer serta masyarakat memeriahkan upacara tersebut. Pada saat itu, A. Kahar Muzakkir (Rektor Magnificus) menyampaikan pidato tentang "Dasar-dasar Sosialisme dalam Islam".

Setelah keamanan kota berangsur-angsur pulih, sementara perjanjian damai antara Pemerintah RI dan Belanda terus diupayakan, pada bulan September 1949, UII kembali membuka Kantor Sekretariatnya di Kauman Yogyakarta dan sejak Nopember 1949 perkuliahan berjalan

normal. Pada Tanggal 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam dan para ulama yang dipelopori oleh Moh. Adnan, Imam Ghazali, dan Tirtodiningrat mendirikan Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) di Solo. Setahun kemudian, tepatnya pada 20 Pebruari 1951, terjadi kesepakatan antara pimpinan UII dan pimpinan PTII untuk menyatukan kedua lembaga itu dengan nama University Islam Indonesia (kemudian diganti Universitas Islam Indonesia, UII) yang sejak saat itu mempunyai cabang di kedua kota tersebut.

Dengan perubahan STI menjadi UII, tujuan yang semula untuk memberikan pendidikan yang baik bagi para calon ulama, akhirnya bergeser titik beratnya pada fakultas-fakultas non-agama: Teknik, Ekonomi, Hukum, dan Kedokteran, meskipun tetap berlandaskan nilai-nilai agama atau semangat keagamaan. Perubahan orientasi ini antara lain dilatarbelakangi oleh kehadiran sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang didirikan pada bulan Maret 1948 yang kemudian menjadi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sejak 19 Desember 1949 memperoleh corak **nasionalis**. Perubahan orientasi tersebut pada dasarnya tidak keluar dari tujuan pengembangan ilmu yang hendak dicapai, yaitu: **memadukan ilmu agama dan ilmu umum** dalam suatu universitas yang "*universum*" mencakup berbagai ilmu. Paradigma pemaduan, integrasi, dan interkoneksi keilmuan antara agama dan umum telah tuntas dan berhasil diimplementasikan lebih dini.

Dari Fakultas Agama UII Menjadi PTAIN

Sebagai wujud penghargaan terhadap Yogyakarta menjadi Kota Revolusi dan Ibukota Negara Kedua, Pemerintah RI menetapkan Yogyakarta sebagai Kota Universitas. Saat itu, di Yogyakarta ada 2 (dua) universitas, yaitu **UII** yang dikelola oleh **kelompok Islam** dan **UGM** yang dikelola oleh **kelompok nasionalis**. Pemerintah RI menawarkan kepada pengelola UGM untuk menegerikan universitas itu. Tawaran tersebut diterima, dan penegeriannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1950, selanjutnya UGM berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tawaran yang sama juga diajukan Pemerintah RI kepada pengelola UII, namun tidak langsung disetujui. Pengelola UII dapat menerima tawaran tersebut namun dengan syarat pengawasannya harus berada di bawah Kementerian Agama. Dengan syarat ini, hanya ada satu fakultas yang bisa dinegerikan, yaitu Fakultas Agama, sementara ketiga fakultas lainnya tetap berstatus swasta dan tetap dikelola oleh pihak UII. Penegerian Fakultas Agama UII menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 yang ditandatangani oleh Mr. Assaat selaku Pemangku Jabatan Presiden RI.

Peresmian PTAIN dilaksanakan pada Tanggal 26 September 1951 dihadiri oleh Menteri Agama RI, A. Wahid Hasyim yang menyampaikan pidato berjudul "Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri". Penyelenggaraan PTAIN selanjutnya diatur dengan Peraturan Bersama Menteri

Agama dan Menteri PP&K Tanggal 21 Oktober 1951 yang ditandatangani oleh A. Wahid Hasyim dan Mr. Wongsonegoro.

Walaupun PTAIN telah berdiri, dan enam tahun kemudian, tepatnya pada Tanggal 1 Juni 1957, juga berdiri ADIA (Akademik Dinas Ilmu Agama). Umat Islam belum sepenuhnya puas dan masih menginginkan bentuk lembaga pendidikan tinggi Islam yang lebih mapan. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa sejak berdirinya, PTAIN mengalami perkembangan yang pesat baik dari segi jumlah mahasiswanya maupun keluasan bidang kajian ilmu agama Islam yang dipelajari. Perkembangan ini menuntut penanganan yang serius menyangkut status kelembagaan, penambahan gedung beserta fasilitas pendukung lainnya, dan perluasan bidang kajian ilmu agama Islam. Muncullah keinginan dari tokoh-tokoh Islam untuk mengembangkan, meningkatkan, dan meluaskan status lembaga pendidikan tinggi Islam yang sudah ada, yaitu PTAIN dan ADIA. PTAIN secara kelembagaan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama sebagaimana permintaan dari pengelola UII dan penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri PP&K.

Dari sini timbul pemikiran untuk mengadakan penggabungan terhadap kedua lembaga tersebut ke dalam suatu wadah lembaga berbentuk "institut". RUU Perguruan Tinggi pada saat itu hanya mengenal tiga macam bentuk perguruan tinggi, yaitu: universitas, institut, dan akademi. Untuk keperluan pengembangan kelembagaan ini, dibentuklah Panitia Khusus yang diketuai oleh R.H.A.

Soenarjo, S.H. dengan 21 anggota lainnya. Tugas utama panitia tersebut adalah mengajukan saran-saran dan usul-usul kepada Menteri Agama berkenaan dengan rencana penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Pada proses berikutnya, serentetan perundingan diadakan antara Menteri PP&K dan Menteri Agama yang akhirnya menghasilkan persetujuan bahwa Kementerian Agama boleh mendirikan suatu perguruan tinggi agama Islam asal tidak bernama "universitas". Atas persetujuan itulah kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama *Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah* dengan melebur PTAIN (yang didirikan berdasarkan PP Nomor 34/1950) dan ADIA (yang didirikan dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 1/1957). Mulai saat itu Kementerian Agama memiliki kewenangan independen (lepas dari Kementerian PP&K) untuk mengawasi dan mengurus IAIN.

Pembukaan IAIN diresmikan oleh Menteri Agama Wahib Wahab di Gedung Kepatihan Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 1960. Hadir dalam peresmian itu, Menteri Agama beserta rombongan, para utusan Kedutaan Negara-negara Islam di Jakarta, wakil organisasi politik dan kemasyarakatan, pimpinan universitas, dosen dan mahasiswa PTAIN dan ADIA. PTAIN Yogyakarta diubah menjadi Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah, sedangkan ADIA Jakarta menjadi Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab. Dari kedua tempat inilah - Yogyakarta dan Jakarta - IAIN dengan cepat berkembang di berbagai

daerah di Nusantara beserta fakultas-fakultas cabang yang berada di kota-kota sekitarnya.

Pada tahun 1963, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan IAIN disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963. Menurut peraturan yang baru ini, sekurang-kurangnya 3 (tiga) fakultas dapat digabung menjadi satu IAIN tersendiri dengan Keputusan Menteri Agama. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Menteri Agama kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 49 Tahun 1963 Tanggal 25 Pebruari 1963 tentang pemisahan IAIN menjadi dua institut yang berdiri sendiri.

Yang pertama berpusat di Yogyakarta dengan 3 (tiga) fakultas, yaitu: Syariah, Ushuluddin, dan Tarbiyah, sementara yang kedua berpusat di Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 Tanggal 1 Juli 1965, **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) *Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah*** di Yogyakarta diberi nama "**Sunan Kalijaga**", nama salah seorang dari *Wali Songo* (Sembilan Wali) - tokoh-tokoh termasyhur penyebar agama Islam di wilayah Nusantara, dan Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh penyebar Islam di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta - sehingga selanjutnya, IAIN di Yogyakarta dikenal dengan nama **IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**. Dari Yogyakarta inilah kemudian berkembang sekian ratus PTKI (jumlah PTKIS jauh lebih banyak daripada PTKIN) ke seantero Indonesia.

Karakteristik, Filosofi dan Bentuk

Karakteristik bidang kerja sama kiranya dapat dipahami dalam 3 (tiga) sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, bidang kerja sama merupakan sub sistem di PTKI yang digali, dirancang, dilaksanakan dan dikelola sesuai Statuta masing-masing PTKI. Dalam pengertian ini, bidang kerja sama, secara konseptual dan praktek, merupakan representasi dan manifestasi dari tekad pimpinan PTKI (meski belum berhasil seluruhnya, kecuali Jakarta). *Kedua*, bidang kerja sama dimaknai sebagai bagian dari proses dan produk operasional dalam usaha pengembangan keilmuan dan kesejahteraan yang dilakukan oleh dan dalam bingkai kerja sama. *Ketiga*, bidang kerja sama dimengerti dan dipandang sebagai sub sistem PTKI yang secara teoretik dan praktek merupakan satu kesatuan yang integratif dan interkoneksi.

Dalam perspektif yang berbeda, bidang kerja sama dapat didefinisikan dalam dua hal sekaligus: *idealistic* dan *pragmatic*. Pada tataran ideal, bidang kerja sama merupakan suatu sub sistem yang antisipatif menuju kesejahteraan masa depan PTKI itu sendiri. Adapun pada tataran pragmatis, bidang kerja sama diletakkan dalam pengertian lembaga yang memiliki keunggulan dan karakteristik tertentu, namun tetap berada dalam bingkai kesatuan sistem PTKI.

Sebagai sebuah rekayasa intelektual, bidang kerja sama juga menjadi 'kebijakan' yang muncul dan berkembang dari 'tuntutan sivitas akademika atau akar rumput' dan bukan atas inisiasi kreatif murni dari semua pimpinan PTKI. Dengan kata lain, bidang kerja sama lebih bercorak kultural-intelektual ketimbang politis.

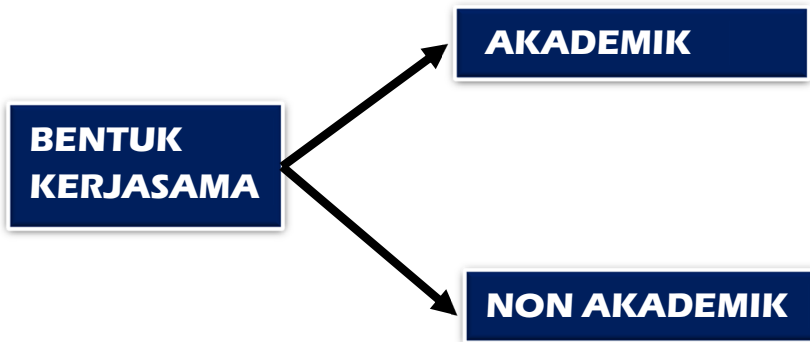
Beberapa karakteristik tersebut dirasa penting untuk digarisbawahi karena pada akhirnya akan memberikan corak kuat pada bidang kerja sama sebagai sub sistem PTKI yang muncul dan berkembang dari 'bawah'. Oleh karena itu, program-program bidang kerja sama tidak saja dirancang berdasarkan aspirasi dari bawah, melainkan juga secara *top-down* dari atas.

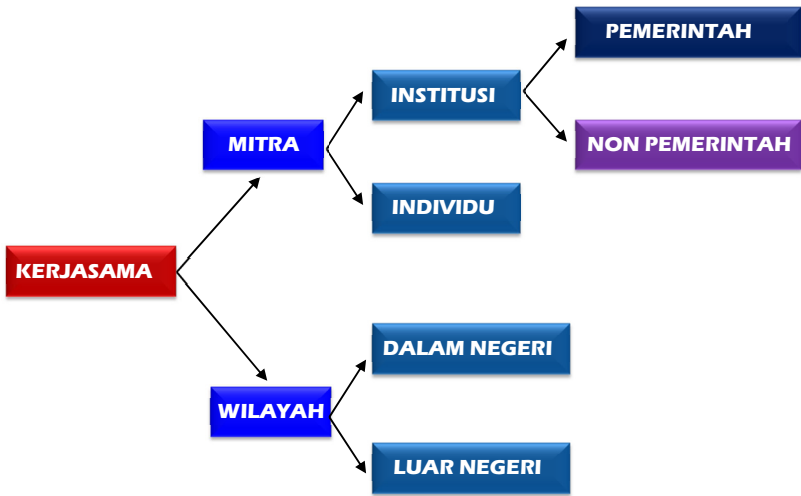
Filosofi

- 1) Secara filosofis dan ideal, semua unit di bawah koordinasi bidang kerja sama PTKI sebaiknya mengedepankan paradigma STF-AI yakni:
 - a. *Sidiq*: kebenaran atas dasar *syar'i*, hukum negara, ilmiah, metodologi, sistem, dan prosedur;
 - b. *Tabligh*: transparan dan akuntabel;
 - c. *Fathanah*: kreatif, inovatif, responsif, dan produktif;
 - d. *Amanah*: mampu mengawal prinsip-prinsip *sidiq*, *tabligh*, dan *fathonah* secara *istiqamah*;
 - e. *Istiqamah*: komit dan konsisten;
- 2) Kerja sama diupayakan tidak terjebak pada kegiatan rutin dan seremonial;
- 3) Kerja sama diupayakan memiliki wawasan yang visioner, inovatif, dan kreatif;
- 4) Kerja sama diupayakan bersikap kooperatif, dapat bersama-sama bekerja dan bekerjasama, serta tidak terlalu birokratis;
- 5) Kerja sama harus memiliki jaringan yang kuat dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta;

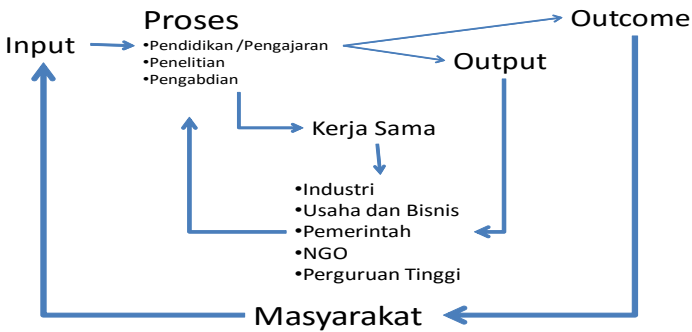
- 6) Kerja sama harus berorientasi paada pengembangan *networking*, *funding* dan *empowering* kelembagaan (pusat-pusat studi);
- 7) Kerja sama harus diletakkan sebagai perantara, bukan tujuan;
- 8) Kerja sama harus diletakkan dalam perspektif me-realisasikan visi dan misi PTKI;
- 9) Kerja sama harus diletakkan dalam basis kesetaraan, bukan dominasi antara satu institusi dengan institusi yang lain sehingga kedua belah pihak mendapat keuntungan yang setara;
- 10) Kerja sama harus diletakkan dalam perspektif **pen-citraan** dan menjaga nama baik institusi.

Bentuk dan Bingkai

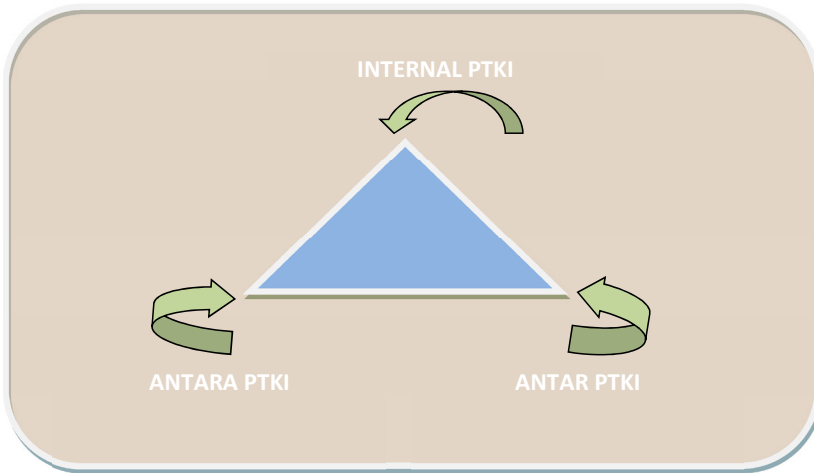




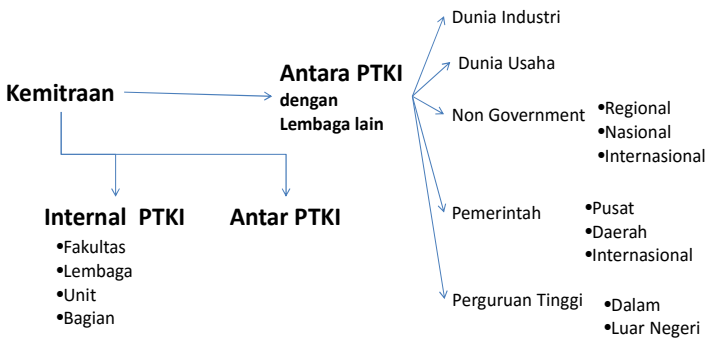
Proses



Bingkai kerja sama dapat diimplementasikan meliputi: internal PTKI, antar PTKI dan antara PTKI dengan lembaga lain



Trilogi Kemitraan Empiris



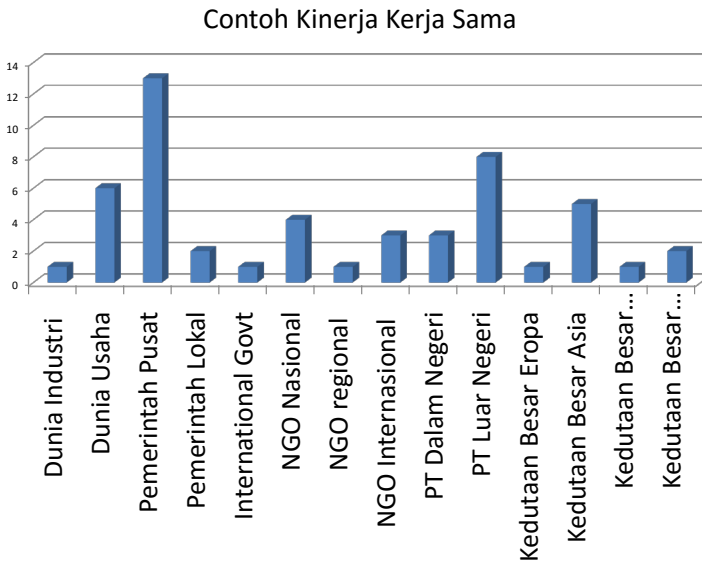
Adapun mitra kerja sama PTKI dapat meliputi:

- a. Institusi-institusi akademik, baik PTKIN maupun PTKIS, dalam maupun luar negeri. Kerja sama pada tingkat ini sangat penting untuk saling tukar informasi, pengetahuan, hasil penelitian dan pengembangan sistem birokrasi. Jika kerja sama di level ini bisa dimaksimalkan, maka, peluang PTKI untuk semakin

- dikenal di tingkat nasional, regional, dan global akan semakin terbuka;
- b. Institusi pemerintah pusat dan daerah. PTKI adalah institusi yang dibangun dan didanai oleh pemerintah. Relasi yang dibangun antara PTKI dan pemerintah seharusnya didasarkan pada *mutual benefit*, saling menguntungkan dan saling memberi manfaat;
 - c. NGO, baik dalam maupun luar negeri. Kepentingannya adalah agar ada *link* antara dunia akademik dengan kalangan NGO yang selama ini banyak bergerak di dunia akar rumput. Hubungan kerja sama antara dua institusi ini akan bisa menghasilkan sinergi dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan agama dan sosial yang berbasiskan pada konteks lokal atau realitas kongkret masyarakat;
 - d. Organisasi-organisasi Islam di dalam dan luar negeri. Kedudukan PTKI sebagai institusi akademik yang berbasis Islam membuat institusi ini harus banyak berkomunikasi dengan institusi-institusi berbasis Islam (*Islamic-based institutions*);
 - e. Lembaga-lembaga donor. Banyak sekali aktivitas-aktivitas PTKI yang bisa melibatkan lembaga-lembaga donor. Sekarang ini di beberapa PTKI sudah banyak pusat-pusat kajian yang berdiri. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membuat pusat-pusat kajian itu berfungsi secara maksimal adalah dengan cara me-*link* kan dengan lembaga-lembaga donor;
 - f. Alumni PTKI. Kerja sama ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kiprah alumni yang telah dilahirkan oleh PTKI di masyarakat.

Secara kongkret, adapun jenis- jenis kerja sama antara lain sebagai berikut:

- 1) *Exchange* tenaga ahli;
- 2) *Visiting professor* dan dosen;
- 3) Beasiswa dalam dan luar negeri;
- 4) *Joint research* dan publikasi;
- 5) Workshop/Training/Seminar;
- 6) Pengembangan sarana pendidikan;
- 7) *Student/staff exchange*.



Problematina, Kekuatan dan Peluang

Kerja Sama di lingkungan PTKI tentu memiliki sejumlah problem mendasar. Secara garis besar, problem tersebut meliputi **kelembagaan, peraturan perundang-**

undangan, SDM yang terbatas, dan **dana** yang minim. Semuanya itu ikut menentukan tingkat problematika yang dihadapi oleh setiap organisasi atau institusi. Selain itu, secara kultural, Kerja Sama juga memiliki problematika lain sebagai berikut:

Pertama, pada segi eksternal, lingkungan masyarakat tempat kerja sama berada terus mengalami perubahan. Orientasi hidup dan kehidupan masyarakat yang bergeser pada kecenderungan yang materialistik menyebabkan pandangan masyarakat tentang Perguruan Tinggi (Islam khususnya) ikut bergeser. Dalam konteks demikian, PTKI diasumsikan kurang mampu memberikan jaminan masa depan. Pada masyarakat tertentu di mana agama Islam masih mengakar dan mengalir dalam denyut nadi kehidupan umat, kekhawatiran tersebut memang dapat ditepis. Tetapi, di banyak tempat, sulit dipungkiri adanya kenyataan bahwa PTKI secara umum masih relatif sepi karena animo masyarakat juga relatif kurang.

Kedua, pada segi internal, banyak kenyataan menunjukkan bahwa otonomi PTKI belum identik dengan kemajuan. Otonomi yang sesungguhnya menjadi kekuatan kerja sama ternyata "**tidak**" **diimbangi** dengan **sumber daya manusia yang fokus, militan, dan profesional**. Hal ini mengakibatkan munculnya keadaan stagnan dalam mengelola kerja sama. Jika masalah ini tidak sedini mungkin diantisipasi secara cepat dan akurat, keberadaan kerja sama sebagai bagian dari *the community learning center* perlahan-lahan niscaya akan surut dan hanya akan berada di atas meja untuk masa-masa mendatang. Secara rinci, problematika kerja sama dapat diuraikan sebagai berikut:

Perundang-undangan

Meski Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 telah terbit, tetapi, payung hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat dan khusus mengenai kerja sama belum ada dan masih menggunakan peraturan internal PTKI, artinya belum masuk ke dalam nomenklatur Kemenpan dan RB. Ada dua hal penting yang harus digarisbawahi terkait dengan masalah ini. *Pertama*, kelahiran payung hukum dalam peraturan konstitusional harus dilihat dan ditempatkan dalam kerangka **kebutuhan dan cita-cita transformasi** PTKI menjadi beberapa UIN (bukan semata-mata diukur dengan jumlah mahasiswa - yang sudah barang tentu - terkait banyak dengan ketersediaan ruang kuliah).

Kedua, sejalan dengan hal tersebut, payung hukum dimaksud hendaknya dipandang dan ditempatkan sebagai kerangka membangun kembali (menata, bukan merusak) sistem kehidupan kampus yang yang berkualitas dan konstitusional. Perkembangan baru aspek perundang-undangan ini menuntut agar kerja sama dengan segala program dan yang menanganinya dapat dipayungi secara yuridis formal seperti bidang-bidang yang lain.

Otonomi PT

Isu mengenai otonomi PT telah berkembang seiring dengan munculnya desakan kuat perlunya demokratisasi dan asumsi kuat di kalangan masyarakat -tak pelak merupakan sebagian imbas dari *euphoria* reformasi- bahwa,

PTKI merupakan institusi pendidikan yang lebih memahami kelebihan dan kelemahan diri mereka sehingga mereka mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk memajukan dirinya. PTKI dipandang lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, terutama *input* pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai kebutuhan dan tingkat perkembangan mahasiswa. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 telah memperkuat otonomi sebuah perguruan tinggi.

Berdasarkan asumsi tersebut, bila diberi kesempatan secara memadai, PTKI sebenarnya memiliki kemauan dan kemampuan mempertanggungjawabkan kinerja dan mutu pendidikannya kepada *stakeholders*. Dengan demikian, persaingan sehat dengan lembaga pendidikan lain menjadi dimungkinkan. Untuk itu, setiap PTKI, secara mandiri, dapat menempuh upaya-upaya kreatif-inovatif dengan dukungan orang tua mahasiswa, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lainnya. Aspirasi masyarakat mengenai otonomi pendidikan tinggi secara jelas telah diakomodasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Isu seputar otonomi pendidikan tinggi ini menjadi penting karena pada dasarnya otonomi menjadi sebagian karakter utama kerja sama PTKI. Namun, masalah ini sangat mungkin berubah menjadi ancaman jika kerja sama tidak memiliki kemampuan memadai dalam mengimplementasikan nilai-nilai otonomi tersebut dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Revitalisasi Visi dan Misi

Visi merupakan citra diri atau pandangan masa depan kerja sama tentang keberadaan dirinya dalam memberikan pelayanan kepada sivitas akademika dan masyarakat. Adapun misi merupakan tugas-tugas strategis yang harus dilaksanakan oleh kerja sama untuk mewujudkan visinya. Selain menetapkan visi dan misi, kerja sama juga perlu menetapkan target-target kualitas yang hendak dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Visi dan misi menjadi salah satu indikator penting pencapaian *effective university model* (model universitas efektif) yakni model pendidikan yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan *proses* untuk mencapai *hasil* pendidikan yang bermutu. Revitalisasi visi dan misi kerja sama, dengan demikian, harus dipandang sebagai isu pokok dan penting karena pengabaian dalam hal ini akan berimplikasi buruk bagi keseluruhan proses kerja sama, dan pada titik akhir, akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendukung *academic excellence* di lingkungan PTKI.

Rekonstruksi Tujuan dan Kualitas

Salah satu kritik yang ditujukan kepada kerja sama (antara lain) adalah maraknya pengumpulan MoU. CITRA Padahal, jika diamati, dari sekian MoU yang ada, maka, hanya sebagian kecil saja yang tidak implementatif. Oleh karena itu, "tujuan" menjadi penting bukan saja karena fungsinya sebagai motivator, dinamisator, dan pengarah seluruh kegiatan kerja sama, tetapi lantaran tujuan me-

rupakan bagian integral dari visi dan misi organisasi PTKI. Tujuan juga memberikan panduan yang jelas kepada pemegang otoritas manajemen guna menentukan target kerja sama yang jelas, yang akan dicapai *day to day*.

Sejalan dengan tujuan dan target mutu kerja sama di atas, **kualitas** sebagai sasaran akhir bidang kerja sama dalam sebuah perguruan tinggi menjadi penting untuk dicermati. Kualitas merupakan sejumlah keadaan atau kemampuan tertentu yang terukur sebagai **hasil** dari **proses** pendidikan tinggi. Dengan memahami logika ini, maka, menjadi sangat masuk akal apabila rancangan program pendidikan tinggi dikonstruksi berdasarkan atau berbasis pada kualitas yang diinginkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kerja sama. Pembentukan dan pengembangan kerja sama seringkali hanya didasarkan pada motivasi intrinsik dan mengabaikan nilai-nilai kualitatif tertentu.

Pengembangan SDM

Dalam upaya membangun 'model perguruan tinggi yang efektif' seperti disinggung di muka, pengembangan sumber daya manusia bidang kerja sama menjadi isu pokok dan penting dengan alasan bahwa sumber daya manusia merupakan *brainware* yang sangat menentukan dua aspek lainnya: *hardware* dan *software*.

Pengembangan SDM PTKI, baik pimpinan, tenaga pengajar maupun administratif, baik dalam bentuk *inservice* maupun *afterservice*, harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan akan perlunya SDM yang memenuhi standar kualifikasi profesional untuk mewujudkan pendidikan yang

berorientasi pada mutu. Namun, pada sisi lain, pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PTKI tidak cukup berorientasi pada pengembangan kemampuan profesional. Pengembangan juga harus difokuskan pada pola rekrutmen, pemetaan, dan pengembangan kesejahteraan semua pihak.

Di lingkungan PTKI sebenarnya banyak SDM yang berkualitas dalam membangun jaringan kerja sama, namun, untuk menyamakan langkah dan gerak bersama tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu dicermati seperti kesamaan niat, tujuan, dan target (antar mereka sendiri mungkin berbeda) serta apresiasi PTKI terhadap mereka. Pada poin inilah diperlukan pemantaban manajemen.

Pemantaban manajemen merupakan suatu keniscayaan pada lembaga kerja sama. Kesatuan manajemen pengelolaan PTKI merupakan kebijakan pimpinan masing-masing. Pembangunan manajemen itu sendiri bermakna menumbuh kembangkan kultur manajemen pada semua unit yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tercakup dalam upaya ini adalah pengembangan *leadership* atau kepemimpinan yang kuat, memiliki keterampilan manajerial yang memadai, serta lebih jauh lagi, pengembangan kemampuan segenap pihak dalam lingkaran manajemen untuk secara bersama-sama melakukan pemberdayaan potensi internal dan eksternal guna meraih kualitas yang dikehendaki.

Pada kasus-kasus tertentu di mana manajemen penyelenggaraan PTKI masih ada yang berbasis pada kultur KKN, pengembangan manajemen berbasis **kepemimpi-**

nan, kebersamaan, persatuan, kesejahteraan, dan pemberdayaan potensi internal dan eksternal tidak berarti harus mengganti secara total kebiasaan yang ada, melainkan dapat dilaksanakan secara bersamaan. Hal ini perlu ditekankan mengingat tidak sedikit penyelenggaraan PTKI masih sangat bergantung pada sifat "kekeluargaan dan persahabatan" yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Kepemimpinan PTKI dapat dilihat secara umum dari kejelasan arah pengembangan institusi yang tertuang dalam visi, misi, dan tujuannya. Visi, misi, dan tujuan bidang kerja sama, misalnya, harus dapat dijadikan landasan dalam menentukan arah pengembangan di semua tingkat organisasi bidang kerja sama seperti *Center for Cooperation and International Affairs* (CDCIA), *Center for Promotion*, dan lainnya. Kualitas kepemimpinan juga tercermin dari mutu penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai program bidang kerja sama secara keseluruhan.

Masalah Finansial

Isu penting lainnya adalah masalah finansial. Data menunjukkan bahwa bidang kerja sama belum memiliki kekuatan finansial yang memadai. Bahkan, selama ini, berbagai sumber anggaran diperuntukkan bagi pengembangan Tri Dharma PT yang sedikit banyak masih mengabaikan fungsi kerja sama. Itulah sebabnya, bidang kerja sama harus mencari sumber dana sendiri dengan mengembangkan usaha-usaha komersial dan jaringan kerja sama yang menguntungkan.

Memang tidak sedikit data yang menunjukkan bahwa finansial dapat menjadi faktor utama merosotnya 'nafas' penyelenggaraan kerja sama itu sendiri. Keadaan demikian berpengaruh secara langsung pada *performance* bidang kerja sama seperti pusat promosi yang belum tertata secara apik, staf yang tidak tersedia atau bahkan ditiadakan. Bidang kerja sama, sebagai sebuah lembaga, bukanlah sesuatu yang klasik bila masalah finansial, sarana dan prasarana juga menjadi isu krusial dan penting bagi pengembangan kerja sama.

Kekuatan

Memperhatikan karakteristik bidang kerja sama seperti dipaparkan di atas, sebenarnya ada beberapa kekuatan yang dimiliki bidang kerja sama.

Pertama, secara historis, bidang kerja sama memiliki sejarahnya sendiri, peran, dan akar yang kuat di tengah-tengah dinamika PTKI. Dalam kompetisi global, tidak mungkin sebuah lembaga atau institusi itu bergerak sendirian. Sisi ini penting mengingat dari sinilah kekuatan kerja sama mengemuka, bekerja bersama dan bersama-sama bekerja demi umat, nusa, dan bangsa.

Konteks sejarah telah menunjukkan bahwa bidang kerja sama telah memiliki pengalaman untuk berkembang dalam segala situasi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa bidang kerja sama telah menjadi bagian penting dalam kehidupan PTKI. Secara filosofis, bidang kerja sama merupakan bagian dari nafas kehidupan PTKI yang dulunya tidak diperhatikan dengan baik.

Kedua, kekuatan lain bidang kerja sama tampak pada wataknya yang mandiri. Sejak dibentuk, bidang kerja sama merupakan wujud kongkret dari aspirasi arus bawah dan kebijakan hampir semua pimpinan PTKI. Sebagai institusi baru, bidang kerja sama sama sekali belum memiliki otonomi penuh untuk melangkah dan bergerak secara strategis dan dinamis.

Selain itu, bidang kerja sama PTKI juga memiliki kekuatan dalam bentuk *hardware capital* dan *software capital*:

- ***Capital***
 - ***Hardware Capital***
 - ⊙ Institusional
 - ⊙ SDM
 - ⊙ Legalitas
 - ⊙ Sarana dan Prasarana
 - ⊙ Finansial
 - ***Software Capital***
 - ⊙ Konsep Akademik
 - ⊙ Konsep Manajemen
 - ⊙ *Owner*
 - ⊙ *Leader*
 - ⊙ *Manager*
- ***Process***
 - Konsep
 - Manajemen
 - Produk
 - Pengguna

- **Product (SMART)**
 - o *Specific*
 - o *Measurable*
 - o *Achievable/Applicable*
 - o *Realistic/Rasional*
 - o *Time Schedule*

Users

- o Pemerintah Pusat dan Daerah
- o Kementerian Agama (Pusat dan Daerah)
- o Perguruan Tinggi
- o Organisasi Islam
- o Profesional
- o NGO
- o Praktisi
- o Pengusaha
- o Lembaga Lain (Dalam dan Luar Negeri)

Peluang

Selain apa yang dikemukakan di atas, terdapat sejumlah peluang cukup besar bagi arsitektur pengembangan kerja sama di masa mendatang. Saat ini, kaum kaya di Jeddah, Washington, Montreal, Hongkong, Singapore, dan Jakarta mempunyai persamaan yang jauh lebih besar dengan kaum kaya di Chicago, Baghdad, Canberra, Leiden, Paris, dan Yogyakarta daripada dengan kaum miskin di negeri mereka sendiri.

Orang-orang yang makmur juga semakin mudah untuk saling berkomunikasi dan menembus batas-batas nasional daripada dengan kaum miskin sebangsa di negaranya sendiri. Orientasi dasar ke arah kepentingan dan kesejahteraan manusia menuntut agar apa pun yang menjauhkan mereka dari kebersamaan dan kesejahteraan harus dipertanyakan tanpa memandang akibatnya bagi pertumbuhan pendidikan, ekonomi, politik, stabilitas, dan keteraturan tertentu.

Secara empiris, dewasa ini kerja sama keilmuan telah dibangun dan diwujudkan oleh para akademisi beberapa Perguruan Tinggi. Para akademisi Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran misalnya, saat ini sedang menjalin kerja sama membuat sebuah peralatan yang hanya dapat dibuat oleh akademisi Fakultas Teknik dan hanya dibutuhkan oleh Fakultas Kedokteran.

Seorang ilmuwan Amerika Serikat baru-baru ini juga telah menemukan *Partikel Organik Buatan Terkecil Berskala Nano Meter* yang sangat berguna bagi pengembangan teknologi dan kedokteran. Peluang semacam itulah yang harus diantisipasi dan diambil oleh bidang kerja sama PTKI, tentu dengan **program, dana, dan SDM** yang siap bekerja dan bekerjasama. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, Barbara Ward pernah berkata: "Kita harus belajar mencintai satu sama lain dan bekerjasama, atau kita semua akan lenyap".

Beberapa kelemahan PTKI di Indonesia adalah: (a) lemah dalam bahasa asing; (b) lemah dalam metodologi; (c) mental ilmu yang rendah; (d) kurang militan; (e) terlalu

academic-oriented (ekonomi dan politik terabaikan); (f) terlalu seremonialistik; (g) terlalu partisan. Oleh karena itu, dalam upaya penguatan citra PTKI dan sesuai pepatah Arab yang berbunyi, *al-Ghalabah li al-Aqwa* (Kemenangan itu berada di tangan yang lebih kuat), maka, setiap PTKI harus melahirkan sarjana-sarjana yang kuat dalam bidang moral, integritas, akademik (bahasa, metodolgi, dan mental ilmu), manajemen, jaringan dan kemitraan, serta citra positif PTKI.

Arsitektur Pengembangan Kerja Sama

Bidang kerja sama merupakan investasi masa depan PTKI. Secara kuantitatif, bidang kerja sama telah memiliki sekian banyak mitra kerja dengan berbagai lembaga keilmuan dan kelembagaan. Namun, secara kualitatif, bidang kerja sama belum maksimal dalam memberikan sumbangan riil bagi peningkatan kualitas **intelektual, material, spiritual,** dan **moral** sivitas akademika PTKI. Oleh karena itu, peran bidang kerja sama sesungguhnya bagaikan tombak bermata dua: tidak hanya berjasa dalam **proses pencerdasan**, namun juga **peningkatan kesejahteraan** sivitas akademika PTKI. Pada saat bersamaan, entitas dan *setting* sosiologis bidang kerja sama perlu melakukan langkah-langkah strategis dan penataan sebagai berikut:

1. Penataan Aspek Kelembagaan

Tidak dipungkiri bahwa bidang kerja sama merupakan lembaga baru di lingkungan PTKI. Sebagai lembaga baru, diperlukan komitmen pimpinan dalam melakukan

penataan kelembagaan dengan bidang-bidang lain. Penataan kelembagaan yang terpenting sebenarnya adalah keberadaan unit atau lembaga yang *men-support* bidang kerja sama, argumen akademik, analisis jabatan, dan analisis keuangannya. Jika ini tidak dilakukan, maka, bidang kerja sama tidak akan *visible*, bagaikan fatamorgana, bahkan, mungkin *wujuduhu ka 'adamih*.

Pada sisi yang lain, sering muncul kritik yang mengatakan bahwa bidang kerja sama memiliki kelemahan secara institusional. Oleh karena itu, penataan konstitusional dari aspek kelembagaan mutlak diperlukan. Tujuan pokok langkah strategis ini adalah agar ada stabilitas kelembagaan yang lebih konstitusional, kokoh, teratur, dan pengorganisasian yang tertib, khususnya manajemen kelembagaannya. Langkah-langkah penting yang harus ditempuh dalam kerangka stabilitas kelembagaan ini antara lain:

- a. Pengamanan dan pengawalan kelembagaan sesuai Statuta atau pedoman dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Konsolidasi dan koordinasi seluruh bagian yang terkait langsung dan tidak langsung dengan bidang kerja sama guna menyamakan orientasi dan semangat pengabdian, inovasi, dan pengembangannya;
- c. Menakar dan menyusun kembali visi-misi bidang kerja sama, serta merancang program-program aksi yang menekankan revitalisasi peran-peran kualitatifnya;
- d. Menata institusi bidang kerja sama yang berbasis pada otonomi pada satu sisi dan kebersamaan serta kemitraan antarkomponen pada sisi lain.

Rekonstruksi Tujuan dan Peningkatan Kualitas

Pada tahap berikutnya, setelah penataan pada aspek kelembagaan, bidang kerja sama perlu melakukan rekonstruksi **tujuan** dan **peningkatan kualitas**. Rekonstruksi **tujuan** adalah usaha mengkaji, merumuskan atau manata tujuannya dengan mengingat visi, misi, peran, dan fungsi, serta mempertimbangkan hal-hal baru yang bersifat kontekstual. Adapun peningkatan kualitas merupakan batasan-batasan spesifik dari sejumlah kemampuan dasar yang diharapkan menjadi corak dan ciri khas bidang kerja sama.

Rekonstruksi tujuan dan peningkatan kualitas dipandang sebagai upaya strategis guna mendekatkan bidang kerja sama dengan kepentingan dan kebutuhan mendesak sivitas akademika PTKI sehingga lembaga ini dapat menjadi alternatif masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan kehidupan mereka. Selain itu, rekonstruksi tujuan dan peningkatan kualitas akan menentukan gradasi dan cakupan tugas sehingga dapat menghindari inefisiensi dan inefektivitas program PTKI secara keseluruhan.

Pemberdayaan SDM

Untuk mendukung stabilitas kelembagaan, rekonstruksi tujuan dan peningkatan kualitas di atas, pengembangan dan pemberdayaan potensi sumber daya manusia bidang kerja sama menjadi mutlak dilakukan. SDM merupakan komponen penting dalam keseluruhan sistem dan proses-proses kerja sama. SDM merupakan *conditio*

sine quanon dari bidang kerja sama. Pengembangan dan pemberdayaan SDM bidang kerja sama dimaksudkan untuk membentuk sosok penyelenggara, penggerak, dan pengelolanya yang memiliki kualifikasi standar profesional seperti *performance, good communication, mastering* bahasa asing, baik Arab maupun Inggris. Oleh karena itu, berbagai bentuk pelatihan, baik yang bersifat *inservice* maupun *after service training*, atau dengan standar baku mutu yang jelas, mutlak diperlukan.

Pengembangan kerja sama juga merupakan upaya untuk membuka berbagai hubungan, baik dengan dan antarbidang kerja sama maupun dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Hubungan tersebut dimaksudkan untuk membangun kualitas baru dengan melakukan serangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi bidang kerja sama ke depan. Kegiatan-kegiatan kerja sama tersebut antara lain berbentuk pelatihan, *workshop* dan *sharing* program, pengembangan organisasi dan manajemen, kesejahteraan, dan sebagainya.

Bidang kerja sama tersebut dipandang memiliki nilai strategis karena: *pertama*, kerja sama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan antarinstitusi bidang kerja sama serta antara lembaga-lembaga dimaksud dengan dunia luar. *Kedua*, bidang kerja sama akan dapat membangun jaringan nasional, bahkan internasional dengan tujuan *imaging, networking, funding* dan *empowering* sehingga dapat membuka akses lebih jauh dan kontributif bagi pengembangan dan kemajuan bidang kerja sama itu sendiri.

Rincian Kerja Citra

Rincian Kerja Citra sebaiknya melalui:

1. Pelayanan Tamu:
 - a. Protokoler tamu luar negeri;
 - b. Penjamuan tamu;
 - c. Pengadaan *merchandises* untuk tamu khusus.
2. *MoU Drafting*
3. Keimigrasian
 - a. Urusan imigrasi, pelayanan passport, pelayanan visa dan KITAS
 - b. Menyelenggarakan workshop bagaimana mengurus passport, visa, dan keimigrasian lainnya.
4. *Fund Raising*
 - a. PTKI *Philantrophy*
 - b. Pelayanan Mahasiswa Luar Negeri
 - c. Peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya.
5. Riset Luar Negeri
 - a. Pengiriman mahasiswa PTKI ke Luar Negeri (*Student Exchange*)
 - b. **Pengiriman dosen PTKI** ke Luar Negeri (*Lecturer Exchange*)
 - c. Pengiriman beberapa pegawai PTKI ke Luar Negeri (*Official Exchange*)
 - d. Menyelenggarakan riset bersama bertaraf internasional

6. Penerjemahan dokumen akademik resmi ke dalam bahasa Arab-Inggris (ijazah, transkrip nilai) yang standar
7. Promosi ke sebagian negara-negara ASEAN melalui alumni dan tim
8. Kemitraan dengan Bank
9. Pembuatan peta kerja sama dalam negeri dan luar negeri

10. *Promotion Activities*

⊙ **Above The Line (Yang Tersurat)**

- a. Radio Advertisings/Ads
- b. TV Ads
- c. Newspaper Ads
- d. Advertorial
- e. Media Blocking Time/Space
- f. Web Content and Web Designer (Indonesia)
- g. Web Content and Web Designer (International)

⊙ **Below The Line**

a. **Events**

- ⊙ Seminar/Talk Show (Nasional 2 X, Regional 3 X)
- ⊙ Road Show to Schools
- ⊙ Edutainment Program (2 X/Year)

⊙ **Others**

- ⊙ Company Profile
- ⊙ Prospectus Books
- ⊙ Outdoor (Spanduk, Billboard, Ads Balloon)
- ⊙ Brochures, Leaflets
- ⊙ Posters (Plakat)

- ⊙ Stickers (Pelekat)
- ⊙ Merchandises (Dasi, Bross, Mug, Payung)

11. Public Relation Campaign

- a. Community Relations & Development
- b. Pelatihan untuk Masyarakat Sekitar
- c. Pengajian Rutin/Insidental (Masyarakat Luas)
- d. Pelatihan & Workshop untuk Siswa SMU/MA/SMK (Sederajat)
- e. Menerima Kunjungan Siswa SMU/MA/SMK (Sederajat): SOP
- f. Terlibat dalam Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Raya Keagamaan, Dll)

12. Employee Relations

- a. Employee of the Year Election
- b. Family Gathering
- c. Scholarship untuk Keluarga/Karyawan

13. Media Relations

- a. Press Centre
- b. Press Release
- c. Talk Show Radio/TV
- d. Printed Media Space/Advertorial
- e. Monthly Internal Media

14. Government Relations

- a. Kunjungan ke Instansi Pemerintah/Swasta
- b. Gathering & Lobbying

15. Students Relations

- a. Pemilihan Student's of the Year
- b. Pengembangan Kompetensi Mahasiswa (kunjungan ke perusahaan, pengikutsertaan ke sejumlah pelatihan, dan studi banding)
- c. Integrated Student Center

16. Students' Parent Relations

- a. Direct Mail
- b. Komunikasi via Telepon
- c. Gathering: Mengundang Orang Tua Menghadiri Jamuan Makan

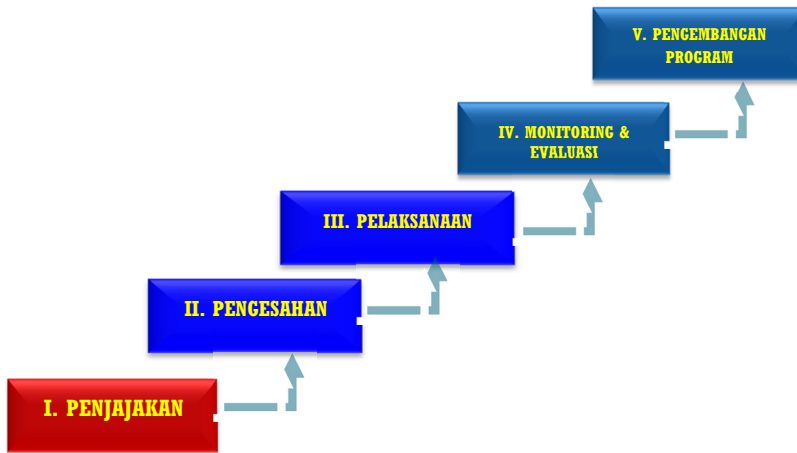
17. External Relations

- a. Kelompok Bisnis
- b. LSM
- c. Institusi Lain

18. Citra Kebersihan Kampus

Tahapan Realisasi Kerja Sama

Tahapan realisasi kerja sama PTKI dilaksanakan paling tidak meliputi lima tahapan, meliputi; penjajakan, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan program-program kerja sama. Di bawah adalah bagan tahapan tersebut.



I. Penjajakan

- o Dilakukan oleh unit/lembaga/fakultas/universitas
- o Diketahui oleh Kepala Unit
- o Dilaporkan kepada Warek/Rektor
- o Dibahas oleh pejabat-pejabat terkait
- o Ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana.

II. Pengesahan

- o Substansi MoU dibicarakan terlebih dahulu oleh universitas dan/atau unit dan mitra kerja;
- o Naskah MoU dikirim ke Biro/Bagian atau Lembaga yang terkait dengan Hukum untuk dikaji secara seksama;
- o Hasil kajian oleh bagian kerja sama dikirim ke pihak-pihak yang akan melakukan kerja sama;
- o Naskah MoU yang sudah disepakati bersama oleh unit dan mitra kerja, selanjutnya dikonsultasikan

kepada yang menangani bidang kerja sama untuk dipelajari ulang.

(a) jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Biro/Bagian;

(b) jika disetujui, akan diberikan paraf persetujuan;

(c) jika dibutuhkan pencermatan yang lebih detail, akan dibentuk tim khusus.

- o Naskah MoU yang sudah diparaf oleh pimpinan PTKI, selanjutnya disampaikan ke pimpinan sebagai laporan;
- o MoU yang sudah mendapatkan persetujuan selanjutnya dibuat rangkap dua untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.

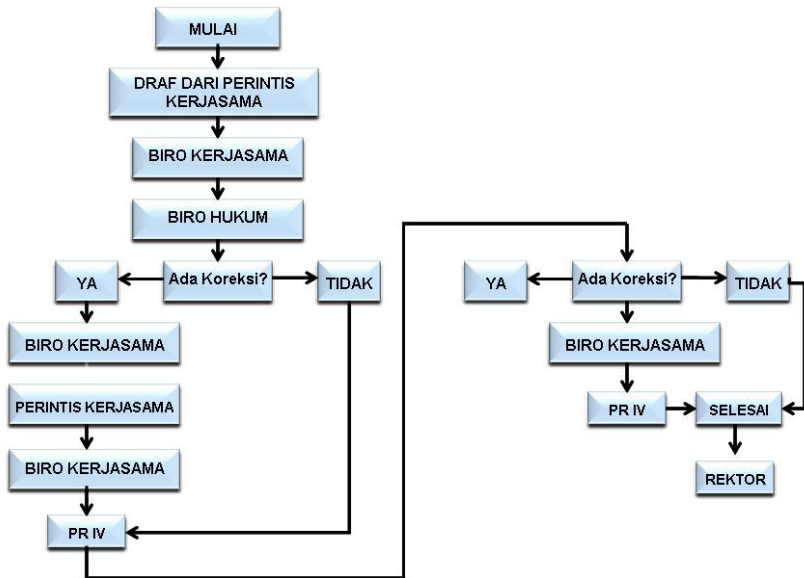
III. Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan setelah penandatanganan MoU. Agar pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai kesepakatan, perlu ditunjuk pelaksana kerja sama yang bertugas:

- o Menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis bersama mitra kerja;
- o Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama;
- o Membuat laporan secara berkala kegiatan kerja sama kepada pimpinan universitas.

IV. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Biro AAK untuk menjamin agar tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.



- a. Membentuk tim;
- b. Merancang anggaran;
- c. Mengadakan temu ahli;
- d. Melaksanakan kegiatan;
- e. Merumuskan hasil;
- f. Mempresentasikan hasil;
- g. Mensosialisasikan hasil;
- h. Bekerjasama dengan lembaga lain.
- i. Merumuskan indikator keberhasilan program meliputi, perencanaan atau persiapan; pelaksanaan/implementasi; evaluasi atau penilaian, dan hasil atau pelaporan.

Pedoman Kerja Sama

1. Kebijakan Rektor Membentuk Center/Pusat Studi

- Optimalisasi SDM kreatif
- Memberi ruang untuk kegiatan kreatif
- Mengembangkan kelembagaan di UIN
- Memperluas Networking
- Meningkatkan kesejahteraan
- Meningkatkan perolehan BLU

2. Prinsip Kerja Sama

- Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan;
- Menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- Menghargai keberadaan dan keragaman lembaga masing-masing.

3. Persyaratan Calon Mitra Kerja

- Kejelasan status hukum calon mitra;
- Calon mitra memiliki kualifikasi yang baik;
- Nilai strategi calon mitra;
- Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra
- Karakteristik dan aspek etika calon mitra
- Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, dan minat calon mitra;
- Kesiediaan calon mitra untuk menjalin kerja sama, saling percaya dan menanggung resiko secara bersama;

- Menyetujui keberadaan aturan dan kebijakan dalam pelaksanaan kerja sama.

4. Organisasi Pengelola Kerja Sama

1. Rektor

- a. Melakukan persetujuan MoU dengan pihak mitra;
- b. Melimpahkan kegiatan kerja sama kepada fakultas, lembaga, atau unit kerja sama yang relevan;
- c. Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
- d. Menandatangani MoU yang telah disepakati bersama.

2. Pembantu Rektor/Ketua Bidang Kerja Sama

- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan PTKI dan instansi lain;
- b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh fakultas, lembaga dan/atau unit kerja di lingkungan PTKI;
- c. Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan penjajagan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra meliputi, mengerjakan draft MoU dan mengecek setiap pasal dalam MoU; mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerja sama.

3. Biro pada PTKI

- a. Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerja sama PTKI dan melakukan manajemen *royalty*;
- b. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan MoU;

- c. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.

Lampiran:

1. **Undang-Undang Ri Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Bagian Kedua Belas: Kerja Sama Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pasal 48

- (1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Penelitian atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas Penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK;
- (4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang Penelitian.

2. **Undang-Undang Ri Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Bagian Keempat belas: Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi**

Pasal 50

- (1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi

internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan;

- (2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia;
- (3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. Hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;
 - b. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. Pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.

Perguruan tinggi dapat dinyatakan telah bermutu apabila, telah mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misi-misinya. Mampu memenuhi kebutuhan dan memuaskan stakeholders yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan profesional. Untuk mencapai tahadap itu, setiap perguruan tinggi harus merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin ketercapaian mutu.

